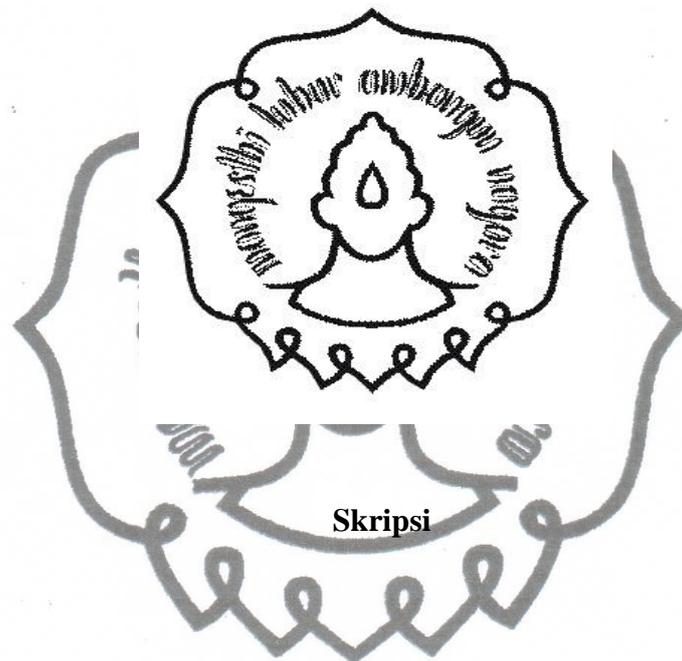


KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI

(Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal
dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres,
Kecamatan Jebres, Surakarta tahun 2011)



Skripsi

Oleh :

DWI HARTINI

K8407021

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011**

commit to user

KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI

(Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal
dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres,
Kecamatan Jebres, Surakarta tahun 2011)



Ditulis dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar
Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA
commit to user
2011

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, Juni 2011

Pembimbing I



Drs. Suparno, M.Si
NIP. 19481210 197903 1 002

Pembimbing II



Dra. Hj. Siti Rochani CH, M.Pd
NIP. 19540213 198003 2 001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi Persyaratan mendapat gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari : Senin

Tanggal : 04 Juli 2011

Tim Penguji Skripsi:

	Nama Terang	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. H. MH. Sukarno, M.Pd	
Sekretaris	: Drs Slamet Subagya, M.Pd	
Anggota I	: Drs. Suparno, M.Si	
Anggota II	: Dra. Hj. Siti Rochani CH, M.Pd	

Disahkan oleh
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.

NIP. 1960 07 27 1987 02.1.001

ABSTRAK

Dwi Hartini. K8407021. KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI (Studi Kasus Tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres, Surakarta). Skripsi Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi, (2) Mengetahui dampak adanya komersialisasi pendidikan di era globalisasi masyarakat, (3) Mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal terpancang. Sumber data dari informan atau narasumber, peristiwa atau aktivitas, dokumen dan arsip serta studi pustaka. Teknik cuplikan menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan observasi berperan pasif, wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi data (sumber) dan metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 1) Komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi yaitu (a) biaya pendidikan mahal, (b) banyaknya pungutan-pungutan lembaga pendidikan, (c) perdagangan di dunia pendidikan. 2) Dampak positif adanya komersialisasi pendidikan di era globalisasi bagi masyarakat yaitu (a) beban pemerintah membiayai pendidikan semakin berkurang, (b) lembaga pendidikan semakin kompetitif sehingga meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan, (c) menambah keuntungan dan pemasukan kas lembaga pendidikan, sedangkan dampak negatifnya yaitu (a) pendidikan semakin mahal (b) pendidikan sebagai ladang bisnis, (c) gejala stigmatisasi dan diskriminasi antara kaya dan miskin, (d) rantai kemiskinan yang sulit diputuskan melalui pendidikan, (e) tercipta privatisasi pendidikan, (f) sistem suap atau politik uang (*money politics*) semakin banyak, (g) memacu gaya hidup “besar pasak daripada tiang”, (h) perubahan misi pendidikan dari budaya akademik menjadi budaya ekonomi. 3) Upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi komersialisasi pendidikan di era globalisasi yaitu (a) pasrah dengan keadaan seperti pepatah Jawa “setiap anak membawa rejeki sendiri-sendiri”, (b) memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meminimalisir pengeluaran, (c) Pendidikan mahal serta keuangan keluarga yang minim memaksa masyarakat untuk meminjam dana dari bank atau orang lain bahkan menggadaikan atau menjual barang berharga, (d) Kerja keras untuk menambah pendapatan, (e) mengikuti program asuransi maupun tabungan pendidikan, (f) bagi pemerintah seharusnya memperbesar anggaran untuk membantu pendidikan.

ABSTRACT

Dwi Hartini. K8407021. EDUCATION COMMERCIALIZATION IN GLOBALIZATION ERA (Case Study on the Perception of Society toward the Power of Capital in Education Area in Jebres Village, Surakarta). Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. 2011.

The research is aimed to (1) know education commercialization which occurs in globalization era, (2) know the effect of education commercialization which occurs in globalization era among society, (3) know effort which society makes to face education commercialization which occurs in globalization era.

The research is a single case study which uses qualitative approach. The resources of the data are informant, incidents or activities, documents, archives and literature study. The technique which is used to get the sample is purposive sampling. The data are collected through observation with passive act, interview and documentation. Data validity which is used is data triangulation (resource) and method. The technique of data analysis is interactive analysis method.

Based on the research results, it can be concluded that 1) Education commercialization which occurs in globalization era are (a) expensive education cost, (b) other kinds of cost which is determined by education institutions, (c) trade in education area. 2) The positive effects of education commercialization in globalization era for society are that (a) government burdens to pay education cost decreases, (b) education institutions are getting more competitive so that education quality and facilities increase, (c) the income of education institutions treasury increases, while the negative effects are that (a) education becomes expensive, (b) education becomes a business area, (c) it raises the symptoms of stigmatization and discrimination between the rich and the poor, (d) poverty chain becomes difficult to break through education mission from academic culture to economic culture. 3) The efforts which society makes to face education commercialization in globalization era are (a) taking it for granted as Javanese aphorism says that “*setiap anak membawa rejeki sendiri-sendiri*”, (b) utilizing technology development to minimize outcome, (c) borrowing money from a bank or other people or pawning or selling their worth goods because of expensive education and their low budget, (d) working hard to increase their income, (e) taking insurance and saving for education, (f) government should increase the budget which is allocated to education.

MOTTO

Kegagalan merupakan langkah awal menuju sukses,
tetapi sukses sesungguhnya merupakan
jalan tak berketentuan menuju puncak sukses.

(Lambert Jeffries)

Tanamkan dalam diri sebuah kalimat tasbih dalam setiap detik,
satu gagasan dalam setiap menit dan satu karya dalam setiap jam.

(Penulis)



commit to user

PERSEMBAHAN



Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT,
kupersembahkan karya ini kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, engkau payung saat panas dan hujan hingga pelangi yang penuh warna itu akan muncul,
2. Kakak dan adik-adikku tersayang yang selalu kurindukan saat-saat canda tawa bersama,
3. Almamater.

commit to user

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dapat terselesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bantuan, saran, dorongan dan perhatian dari berbagai pihak serta banyaknya hambatan yang menyertai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati perkenankan peneliti menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. H. Syaiful Bachri, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
3. Drs. H. M.H. Sukarno, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Sebelas Maret.
4. Drs. Suparno, M.Si, Pembimbing I yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Dra. Hj. Siti Rochani CH, M.Pd, Pembimbing II yang dengan sabar dan pengarahan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan serta saran yang membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi.
6. Drs. Noor Muchsin Iskandar, M. Pd, Pembimbing Akademik terima kasih atas kesabaran dan petunjuk yang diberikan selama peneliti menempuh studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama mengenyam bangku kuliah.
8. Kepala Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta beserta staffnya atas ijin yang diberikan untuk mengadakan penelitian serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Sosiologi Antropologi '07, yang selalu memberi warna kebersamaan dan kekeluargaan selama menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Surakarta, Juli 2011

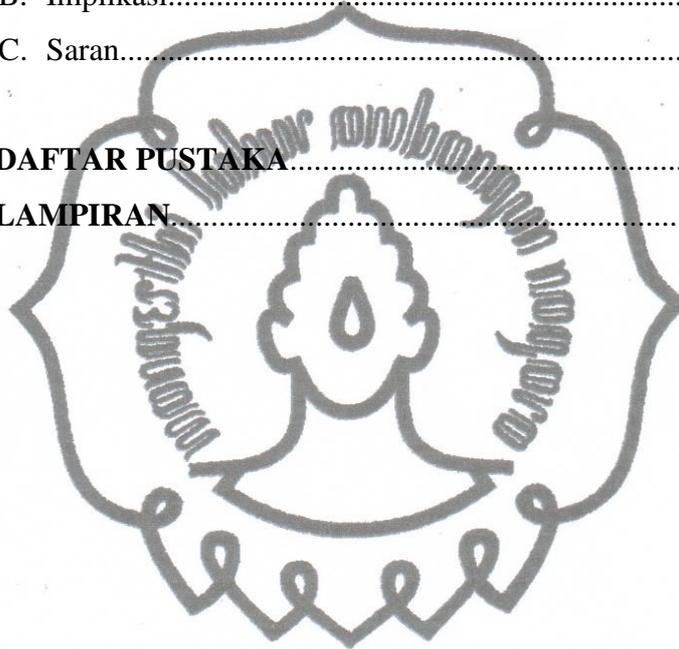
Peneliti

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Tinjauan tentang Pendidikan.....	7
a. Pengertian Pendidikan.....	7
b. Hakikat Pendidikan.....	9
2. Tinjauan tentang Komersialisasi Pendidikan	15
a. Pengertian Komersialisasi Pendidikan.....	16
b. Dampak Komersialisasi Pendidikan.....	19

3. Tinjauan tentang Globalisasi.....	25
a. Pengertian Globalisasi.....	25
b. Kategori Globalisasi.....	28
c. Masyarakat, Pendidikan dan Globalisasi.....	29
B. Penelitian yang Relevan.....	34
C. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
B. Bentuk dan Strategi Penelitian.....	39
C. Sumber Data	41
D. Teknik Cuplikan.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Validitas Data.....	46
G. Teknik Analisis Data	47
H. Prosedur Penelitian.....	49
BAB IV SAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA...	52
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Kelurahan Jebres, Kec. Jebres.....	52
a. Keadaan Geografis.....	52
b. Keadaan Penduduk	53
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian.....	59
1. Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi.....	61
2. Dampak adanya Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi Bagi Masyarakat.....	71
3. Upaya Masyarakat dalam Menghadapi Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi.....	79
C. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian.....	85
1. Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi.....	86
2. Dampak adanya Komersialisasi Pendidikan di Era	96

	Globalisasi Bagi Masyarakat.....	
	3. Upaya Masyarakat dalam Menghadapi Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi.....	102
BAB V	SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.....	108
	A. Simpulan.....	108
	B. Implikasi.....	110
	C. Saran.....	112
	DAFTAR PUSTAKA.....	114
	LAMPIRAN.....	117



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Waktu dan Kegiatan Penelitian..... 38



commit to user

DAFTAR GAMBAR

1. Skema 1 Kerangka Berfikir..... 37
2. Skema 2 Model Analisis Data Interaktif..... 49



commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

1. Interview Guide.....	118
2. Fieldnote.....	120
3. Peta.....	156
4. Foto-foto Penelitian.....	158
5. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi.....	161
6. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada PD I.....	162
7. Surat Permohonan Ijin Penelitian kepada Kepala Kelurahan.....	163
8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	164

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang berkualitas sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Adanya pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan kehidupan dan taraf hidup seorang individu agar menjadi lebih baik, serta memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai manusia. Pendidikan adalah instrumen penting bagi setiap bangsa untuk meningkatkan daya saing dalam percaturan politik, ekonomi, hukum, budaya serta pertahanan pada tata kehidupan masyarakat dunia secara global sehingga menyebabkan perubahan gaya hidup.

Melalui proses pendidikan, diharapkan terciptanya manusia Indonesia yang utuh, unggul, memiliki visi misi jauh ke depan, ingin maju dan berkembang sehingga siap menanggung resiko, mempunyai wawasan luas, mampu menerapkan ide-ide secara optimal, mampu berkomunikasi, berkoordinasi dengan orang lain serta mempunyai semangat kewirausahaan dalam menghadapi era globalisasi yang semakin menguat. Pendidikan selain sebagai suatu pembentuk watak atau kepribadian juga mempersiapkan sumber daya manusia yang handal serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dahulu, era globalisasi merupakan kondisi yang tidak terelakkan oleh semua bangsa di dunia bahkan oleh umat manusia di bumi ini. Globalisasi bukanlah sesuatu yang kecil dan mampu ditangani serta terselesaikan secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan berpengaruh terhadap kehidupan suatu bangsa untuk masuk dan memperoleh dampak-dampak yang ditimbulkan arus globalisasi tersebut. Dampak yang ditimbulkan arus globalisasi tersebut telah melanda di bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia pada khususnya, baik bidang sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan dalam bidang pendidikan.

Dunia pendidikan di Indonesia juga mendapatkan pengaruh besar akibat pesatnya arus globalisasi yang berkembang saat ini. Salah satu pengaruh akibat

pesatnya globalisasi bagi bangsa Indonesia adalah dalam hal peningkatan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang masih rendah. Bahkan dalam lingkup regional, bangsa Indonesia berada pada peringkat 6 dari 10 negara ASEAN. Peringkat tersebut lebih rendah daripada Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand bahkan Filipina. Permasalahan lain di bidang pendidikan saat ini tidak lain adalah sekolah masih bertumpu pada semangat mulia dengan visi kerakyatan serta menjadikan dunia pendidikan sebagai “*ladang bisnis*” untuk memperoleh keuntungan para penyelenggara pendidikan sehingga hal tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi.

Pendidikan di era globalisasi saat ini telah terjebak dalam arus kapitalisasi yang dalam istilah lain bernama komersialisasi pendidikan. Adanya biaya pendidikan yang tidak murah berakibat pada banyaknya anak yang berasal dari kelas ekonomi bawah sulit mendapatkan akses pendidikan yang lebih bermutu. Sekolah kemudian menerapkan aturan seperti pasar yang berimplikasi pada visiologis pendidikan yang salah. Keberhasilan pendidikan hanya didasari pada besarnya jumlah lulusan sekolah yang dapat diserap oleh sektor industri. Pendidikan semacam ini tidak untuk menjadikan manusia-manusia melek sosial, padahal sebetulnya tujuan pendidikan untuk mengembangkan intelektual yang ada pada siswa (Andrias Harefa, 2005: 151)

Reformasi di dunia pendidikan hanya sebatas perubahan, seperti contoh pergantian nama Ujian Akhir Nasional (UAN) menjadi Ujian Nasional (UN), tes calon mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang dulu bernama SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) sekarang menjadi SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menjadi Kementerian Pendidikan Nasional dan perubahan nama yang terdapat pada wilayah pendidikan dasar dan menengah seperti SLTP menjadi SMP, SMU menjadi SMA. Indonesia memiliki sekitar 21.000 SLTP dan 9000 SMU (tidak termasuk MTS dan MA) sehingga jika terjadi pergantian nama sekolah tersebut masing-masing memerlukan biaya sekitar 2 juta (untuk membuat papan nama, stempel, amplop dan kertas kop sekolah), maka diperlukan biaya 60 milyar. Sehingga dengan jumlah biaya yang dikeluarkan tersebut cukup untuk merehabilitasi 1.000 gedung SD yang terancam roboh.

Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di dunia perguruan tinggi, tetapi juga di sekolah dasar sampai sekolah menengah keatas. Walaupun sekarang sekolah sudah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi hal tersebut masih belum mencukupi biaya pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Biaya sekolah saat ini sudah mulai ikut menentukan siapa yang akan sekolah dan kemana arah pendidikan khususnya masyarakat Indonesia hendak melangkah. Tanpa adanya uang tidak mungkin seorang anak yang kurang mampu dapat menikmati pendidikan sekolah. Uang sangat berperan dalam kehidupan manusia yang paling dasar. Selain itu, uang juga menjadi value atau nilai yang semakin dominan dalam pandangan dunia pendidikan Indonesia saat ini. Sebagai contoh salah satu orangtua murid yang berasal dari Kelurahan Jebres, Surakarta untuk masuk Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar harus mengeluarkan biaya antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1.000.000,00 untuk dapat masuk Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Atas mencapai Rp 1.000.000,00 sampai Rp 5.000.000,00.

Dengan demikian, baik dan buruk pengaruh masuknya uang pungutan melalui Komite Sekolah ke lembaga pendidikan atau sekolah membuktikan bahwa adanya komersialisasi sekolah, dengan salah satu cirinya adalah pungutan dari anak menjadi pekerjaan sekolah. Akibatnya banyak orangtua sebagai bagian dari masyarakat Kelurahan Jebres yang mempunyai anak sekolah membuat kalkulasi biaya sekolah anak dan uang yang akan didapat sesudah anak tersebut selesai lulus dari sekolah. Pandangan ini juga secara tidak langsung menempatkan anak bukan sebagai subjek yang dididik, tetapi sebagai asset dalam dunia pendidikan terutama sekolah.

Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta persiapan dana pendidikan sejak dini. Masyarakat Kelurahan Jebres yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan, sehingga harus memiliki perencanaan keuangan sejak awal, agar pendidikan anak terus berlanjut dan tidak putus sekolah. Akibat tanggung jawab orang tua sangat berat terhadap pendidikan untuk membiayai anak sejak lahir

sampai menginjak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, setiap warga negara berhak mendapatkan dan mengikuti pendidikan dasar, maka pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional atau biasa disebut dengan Sisdiknas yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”. Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan bantuan pembiayaan, layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Harapan agar pemerintah mampu memberikan kebijakan dan peduli terhadap pendidikan masyarakat Indonesia untuk membiayainya apalagi dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini yang banyak mengalami problema rusaknya lembaga pendidikan terutama di era globalisasi. Dengan adanya globalisasi dunia yang berpengaruh dalam kehidupan manusia sehingga menuntut manusia untuk mengikuti perubahan pendidikan, tidak hanya bidang sosial, politik maupun ekonomi. Dalam bidang pendidikan akibat globalisasi juga mengakibatkan lahirnya komersialisasi pendidikan yang semakin terlihat menggejala. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul ***“Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta tahun 2011)”***. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengubah pemikiran pihak-pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan dalam pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang lebih dalam. Dunia pendidikan sebagai suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya diperlukan solusi cerdas dalam menyelesaikan persoalan komersialisasi pendidikan serta bentuknya karena telah meresahkan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi ?
2. Bagaimana dampak adanya komersialisasi pendidikan di era globalisasi saat ini bagi masyarakat ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi?
2. Mengetahui dampak adanya komersialisasi pendidikan di era globalisasi saat ini bagi masyarakat ?
3. Mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi saat ini.

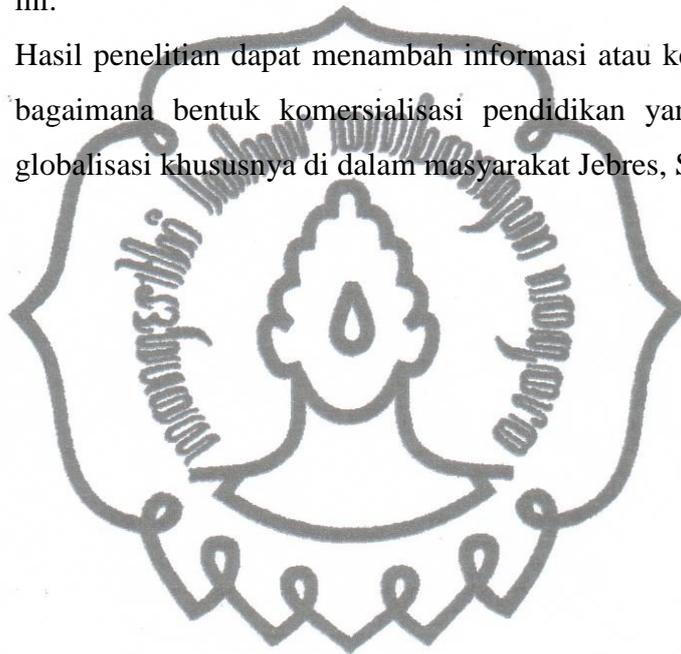
D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta 2011) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial.
 - b. Menambah wawasan tentang masalah sosial yang terjadi terutama di dunia pendidikan.
 - c. Dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti-peneliti sejenis untuk tahap selanjutnya. *commit to user*

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pengamat atau pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan untuk mengetahui realitas yang terjadi dalam pendidikan di era globalisasi ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga di Bidang Pendidikan untuk meninjau kembali keadaan dunia pendidikan saat ini.
- c. Hasil penelitian dapat menambah informasi atau keterangan tentang bagaimana bentuk komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi khususnya di dalam masyarakat Jebres, Surakarta.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian dilaksanakan untuk menerangkan suatu fenomena sosial sehingga memerlukan sebuah kajian pustaka. Dari pustaka terdapat teori yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti untuk mengungkapkan permasalahan dan mencoba menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Sehingga fungsi utama suatu teori adalah memberi landasan penjelasan untuk melakukan prediksi. Adapun teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan tentang Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang hayat dalam kehidupan manusia. Secara universal pendidikan dapat dijadikan alat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan serta kebiasaan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi utuh yang mampu mengembangkan atau mengubah kognisi serta afeksi dirinya sebagai warganegara yang baik.

Pendidikan menurut Bahasa Yunani berasal dari kata *Pedagogi*, yaitu kata "*paid*" artinya anak dan "*agogos*" artinya membimbing. Sehingga istilah *pedagogi* diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak (*the art and science of teaching children*). Menurut Bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata "*educare*", yang artinya mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Dalam Bangsa Jerman, pendidikan berasal dari kata "*erziehung*" yang hampir sama dengan "*educare*" yang mempunyai arti membangkitkan kekuatan terpendam, mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Sedangkan dalam Bahasa Jawa, pendidikan berasal dari kata "*panggulawentah*" (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak. (<http://www.scribd.com/doc/24676437/DefinisiPendidikan> Menurut-Para-Ahli).

Pengertian pendidikan menurut arti etimologi atau bahasa yang dikemukakan di atas adalah pendidikan berasal dari empat bahasa yaitu bahasa Yunani, bahasa Romawi, bahasa Jerman dan bahasa Jawa. Dari keempat definisi pendidikan tersebut, pendidikan diartikan sebagai proses mengembangkan kematangan potensi, kejiwaan, perasaan dan kepribadian anak dari lahir sampai menginjak dewasa untuk mampu mengenal dunia. Menurut Dewey dalam Riant Nugroho (2008 : 19), “pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, baik dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, yang sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial”. Dengan pendidikan diharapkan seorang individu menjadi lebih siap dalam menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Paulo Freire (2001: 104) juga mendefinisikan “pendidikan sebagai jalan menuju pembebasan yang permanen melalui tahap memanusiakan manusia atau humanisasi”. Artinya pendidikan tidak hanya mengajarkan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya, tetapi juga menyadarkan manusia untuk memanusiakan manusia lain sesuai dengan haknya tanpa adanya paksaan.

Selain itu, menurut Djayakarta dalam Benni Setiawan (2006 : 37), “pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda, yaitu suatu pengangkatan manusia muda ke tahap insan sehingga dapat menjalankan hidupnya sebagai manusia utuh dan membudayakan”. Proses memanusiakan manusia dalam pendidikan dianggap sebagai rangkaian proses pemberdayaan potensi dan kompetensi individu untuk menjadi manusia berdaya yang berkualitas sepanjang hayat. Pendidikan mampu mengangkat kehidupan manusia ke dalam kelas sosial yang lebih tinggi seperti yang diungkapkan oleh Clark yang menyatakan bahwa pendidikan dapat dipergunakan untuk membantu penduduk dalam meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang lebih tinggi melalui usaha mereka sendiri (Ravik Karsidi, 2005: 185). Mengutip dari pendapat dari Ki Hajar Dewantara dalam Darmaningtyas (2005: 262), “pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan

hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya”. Selain itu, dalam pasal 1 Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan definisi pendidikan diartikan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari pemahaman tentang definisi pendidikan di atas dapat memberikan arah bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melekat pada setiap kehidupan bersama atau dalam bahasa politik disebut dengan negara bangsa. Pendidikan adalah usaha yang sadar dilakukan orang dewasa untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, baik dewasa jasmani maupun rohani yang mampu berdiri sendiri dibawah hidup bermasyarakat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Sehingga, peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

b. Hakikat Pendidikan

Pendidikan merupakan *transfer of knowledge, transfer of value dan transfer of culture and transfer of religius* yang diarahkan dalam upaya untuk memanusiakan manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Paula Freire (2001 : 104) bahwa pada dasarnya pendidikan mempunyai tujuan sebagai proses pembebasan. Sedangkan, Gerald L. Gutek dalam H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 21) menyatakan bahwa “proses pendidikan adalah proses memberikan kemampuan individu untuk memberikan makna terhadap diri dan lingkungannya”. Pandangan individualistik ini bertentangan dengan

pandangan materialistik yang melihat manusia sebagai produk dari alam sekitarnya.

Dengan demikian, hakikat pendidikan merupakan upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati bersama berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan. Hakikat pendidikan dapat diartikan juga sebagai kemampuan untuk mendidik diri sendiri agar mampu menciptakan manusia yang berkualitas. Sehingga hakikat pendidikan sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Berikut beberapa rumusan tentang hakikat pendidikan menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008 : 26-38) :

1) Pendidikan sebagai Pengembangan Kepribadian

Proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup upaya yang sangat luas. Ada banyak teori tentang kepribadian, struktur, pengembangan maupun tujuan sehingga proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup berbagai upaya luas mampu kehilangan fokusnya. Setiap masyarakat mengharapkan partisipasi dari hasil pendidikan terhadap masing-masing pribadi sesuai dengan bakat dan kemampuannya untuk mengembangkan kepribadian dalam pengertian etis agar mampu berpartisipasi memberikan sesuatu yang berharga untuk masyarakat. Menurut Riant Nugroho bahwa “pengembangan kepribadian tersebut sesuai dengan bakat yang dimiliki agar dapat menyumbangkan kemampuannya secara optimal untuk diri sendiri maupun masyarakat bangsanya” (2008 : 29).

Pengembangan kepribadian bukan hanya terbatas pada perkembangan kepribadian dalam arti personal, tetapi perkembangan kepribadian yang menyangkut aspek-aspek personal dan sosial. Perkembangan kepribadian yang menyangkut aspek personal dan sosial ini seperti yang tertulis dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu “Untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yaitu

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohaninya serta mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan”.

2) Pendidikan sebagai Pengembangan Akhlak Mulia serta Religius

Dalam masyarakat modern yang berdiferensiasi, tugas utama lembaga pendidikan adalah pengembangan akal budi manusia agar dapat mengembangkan kepribadiannya. Pengembangan kepribadian manusia dalam masyarakat maju yang berdiferensiasi bukan hanya terjadi di dalam lembaga-lembaga pendidikan, tetapi juga dalam berbagai lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut Ravik Karsidi (2007 : 47) bahwa “lembaga pendidikan sebagai lembaga mempunyai tujuan untuk pengembangan seluruh aspek pribadi peserta didik termasuk aspek religius dan akhlak mulia dengan pengenalan serta perwujudan nilai-nilai etis dalam kehidupan seseorang”. Pengembangan religius dan akhlak mulia menempati tempat yang khusus dalam pendidikan nasional. Sehingga dapat dibedakan antara pendidikan religius dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan religius sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama tertentu, sedangkan pendidikan budi pekerti sifatnya lebih umum berkaitan dengan nilai-nilai universal dari manusia yang beradab. Tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi yang bersusila dan beradab sebagai anggota masyarakat, masyarakat etnisnya, masyarakat bangsanya yang bhinneka serta sebagai anggota bagian dari masyarakat manusia yang beradab.

3) Pendidikan sebagai Pengembangan Warga Negara yang Bertanggungjawab

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban masing-masing termasuk dalam bidang pendidikan. Seperti yang disetujui dalam

UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Berdasarkan isi pasal tersebut jelas bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan sudah dijamin oleh hukum yang pasti dan bersifat mengikat. Artinya, tidak ada pihak yang merintang atau menghalangi maksud seseorang untuk belajar dan mendapatkan pengajaran. Negara melindungi dan memfasilitasi perkembangan individu sepenuhnya sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab negara. Setiap warga negara juga mempunyai tanggungjawab untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat agar negara dapat melaksanakan fungsinya dalam melindungi serta memfasilitasi perkembangan warga negaranya termasuk penyelenggaraan pendidikan yang dibutuhkan oleh warga anggotanya.

Warga negara tidak hanya memperoleh fasilitas dari negara, tetapi juga diperbolehkan dan harus menuntut negara untuk melindungi hak-hak asasi kemanusiaannya. Sehingga setiap warga negara Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik dengan memenuhi berbagai kewajiban untuk negara seperti membayar pajak tepat waktu, patuh terhadap Undang-Undang, menghormati simbol-simbol negara sebagai kesepakatan bersama di dalam hidup bersama dalam masyarakat bangsa.

Selain itu, sebagai warga negara yang baik dituntut kewajiban untuk membela negaranya, menjaga citra bangsa atau identitas bangsa serta memberikan sumbangan bagi keharuman nama bangsanya. Apalagi dalam era globalisasi saat ini, tidak ada tempat bagi pengembangan nasionalisme yang sempit, tetapi pemupukan kerjasama yang lebih erat antarbangsa. Era globalisasi tidak hanya mengurangi batas-batas suatu bangsa, tetapi lebih memperkuat perasaan kebangsaan dalam rangka bekerjasama dengan bangsa-bangsa dalam meningkatkan taraf hidup kemanusiaan.

4) Pendidikan untuk Mempersiapkan Pekerja-pekerja yang Terampil dan Produktif

Perkembangan industri yang pesat di dunia bisnis untuk mencari keuntungan (profit) telah melahirkan perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang multinasional. Akibatnya perubahan budaya global komersialistis juga merambah ke dunia pendidikan. Marx dalam Nurani Soyomukti (2010 : 319) menyatakan bahwa “pendidikan memberikan respons tuntutan terhadap pekerja-pekerja yang diminta oleh perkembangan industri”. Idealisme pendidikan dasar hingga perguruan tinggi mulai meredup dan disesuaikan dengan tujuan pragmatis dari lembaga-lembaga pendidikan.

Pendidikan telah menjadi identik dengan pelatihan sehingga pendidikan dikuasai dengan falsafah pragmatisme. Menurut pandangan tersebut, pendidikan manusia diciptakan untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil, agar dapat hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bekerja. *Workaholic* merupakan sosok yang ideal dalam masyarakat modern. Manusia dilahirkan bukan untuk bekerja, tetapi bekerja untuk hidup. Bekerja merupakan pengabdian terhadap kehidupan yang lebih baik dan bukan budak dari eksistensi manusia itu sendiri. Sehingga, pekerjaan menjadi sesuatu yang penting karena mampu menyumbangkan segala kemampuan, talenta, kreativitas untuk mengembangkan diri dan kemaslahatan orang banyak.

Pekerjaan bukan menjadi tujuan akhir kehidupan manusia, tetapi sarana perwujudan kemanusiaan setiap manusia. Masing-masing individu manusia dikaruniai bakat untuk mewujudkan kemanusiaan yang baik untuk diri sendiri dan sesamanya. Manusia yang merdeka adalah manusia yang mengembangkan keberadaannya melalui pekerjaan yang dimiliki sehingga mampu mengabdikan diri dalam kehidupan pribadinya sebagai anggota masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab.

Menurut Paulo Freire (2001:84) mengungkapkan bahwa “pendidikan untuk pekerjaan merupakan sesuatu yang mulia apabila

ditujukan kepada pembebasan manusia”. Manusia dikembangkan untuk menguasai suatu pekerjaan dengan cara mengembangkan kreativitas seseorang. Pendidikan untuk memiliki pekerjaan bukan melahirkan robot-robot sebagai suatu bagian dari mesin raksasa dalam suatu industri, tetapi manusia-manusia bebas dan kreatif yang dapat menciptakan berbagai perubahan sehingga menjadi salah satu *agent of change* di dalam masyarakat modern yang tetap bebas dan kreatif. Manusia yang bebas dan kreatif tidak akan membentuk suatu kelompok yang eksklusif seperti dalam pembentukan kelas-kelas pekerja dalam teori Marxisme, tetapi manusia sebagai pribadi yang *independent*, penuh kreativitas dan terus maju ke depan. Sehingga telah menjadi sosok pribadi yang demokratis dan dapat mengembangkan masyarakat yang demokratis.

5) Pendidikan sebagai Pengembangan Pribadi Paripurna atau Seutuhnya

Pengertian paripurna atau seutuhnya merupakan istilah politik bukan istilah yang mengandung nilai-nilai saintifik. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, tetapi dikaruniai bakat yang berbeda-beda. Pendidikan bertujuan untuk membentuk atau mengembangkan pribadi manusia yang utuh sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pengembangan kepribadian manusia seutuhnya adalah lebih tepat apabila dikatakan “pengembangan pribadi sebagaimana adanya”. Keberadaan manusia adalah keberadaan dalam keragaman sehingga pengembangan kepribadian manusia dalam keragamannya berarti menitikberatkan pada kreativitas manusia dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Pendidikan manusia seutuhnya atau pendidikan kepribadian paripurna mengasumsikan adanya perbedaan dalam keragaman manusia yang berkembang utuh sesuai kemampuannya masing-masing.

Pengakuan kepada keberagaman manusia yang berdasarkan adanya bakat berbeda-beda di antara manusia yang satu dengan yang lain berarti pengakuan terhadap hak asasi manusia untuk mengembangkan

bakatnya. Kebijakan pendidikan yang tepat adalah memberikan fasilitas luas terhadap peserta didik dengan bantuan pendidik mengembangkan pribadinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Namun, hal tersebut menjadi hal yang tidak mungkin, jika dilihat dari segi teori maupun praktik. Dalam penyusunan kebijakan pendidikan perlu didukung penelitian lapangan yang disusun dengan program yang dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Hal ini dilakukan agar semua peserta didik dalam kelompoknya masing-masing dalam kelas dapat mengikuti program yang disajikan dalam kurikulum sesuai tingkat pendidikan yang dikembangkan.

Dari hakikat pendidikan yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan terjadi di dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk yang dididik atau dapat dididik dan yang mendidik sesamanya. Jadi pendidikan sebagai pengembangan pribadi manusia paripurna adalah mempunyai hakekat pelaksanaan kebijakan pendidikan yang melibatkan seluruh unsur pendidikan untuk membawa anak didik yang berbeda-beda tersebut dapat berkembang secara utuh sebagai manusia yang berbudaya dan bermoral yang berkarakter cerdas dan kuat.

2. Tinjauan tentang Komersialisasi Pendidikan

Dalam era pasar bebas dan bisnis yang serba kompetitif saat ini berlaku apa yang diramalkan oleh Titus Maccius Plautaus (184 SM) bahwa "*homo homini lupus*" atau setiap orang bakal tega memakan orang lain. Hal tersebut ternyata menjadi sebuah kenyataan yang berlaku dalam dunia pendidikan terutama pada saat tahun ajaran baru banyak perguruan tinggi bahkan sekolah-sekolah berlomba untuk menarik berbagai tarif atau biaya pendidikan. Pendidikan dikomersilkan dengan alasan karena mutu pendidikan memerlukan biaya pendidikan yang memadai. Sehingga sekolah yang bermutu dianggap sebagai sekolah yang mahal dan hanya dapat dinikmati oleh golongan orang *the have* atau golongan orang-orang berada. Sesuai dalam filsafat materialisme Marx, yang menyatakan bahwa sepanjang kehidupan manusia hidup dalam wilayah material yang nyata dalam

rangka melakukan aktualisasi kebutuhan ekonomi, bahwa uang adalah sesuatu yang bernilai dan mewujudkan kualitas manusia.

a. Pengertian Komersialisasi Pendidikan

Komersialisasi pendidikan mempunyai makna dalam memperdagangkan pendidikan, menurut kamus kata komersial atau *commercialize* berarti memperdagangkan. Dikemukakan oleh Milton Friedman dan Frederik Van Hayek dalam Agus Wibowo (2008 : 115) bahwa “komersialisasi pendidikan merupakan keadaan pendidikan yang berpegang pada masyarakat industri dan selera pasar (*market society*)”. Selain itu, juga diungkapkan oleh Habibie dalam Darmaningtyas (2005: 257), bahwa “komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrument untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat”. Adanya komersialisasi pendidikan telah menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bahwa pendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin yang siap mem-*supply* pasar industri dan diukur secara ekonomis. Sedangkan menurut pendapat Giroux dalam Agus Wibowo (2008 : 115), “adanya komersialisasi pendidikan telah mengubah institusi pendidikan yang berbasis efisiensi ekonomis menjadi perusahaan penyedia elite masyarakat dan kuli kerja”. Akibat komersialisasi pendidikan inilah, banyak lembaga pendidikan yang kemudian menganut paradigma pendidikan yang bersifat ekonomis. Banyak lembaga pendidikan yang akhirnya gagal mengimplikasikan bahwa proses pembelajaran menjadi salah satu pilar utama dalam humanisasi hidup manusia.

Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga telah menciptakan jurang pemisah antara pihak yang mempunyai modal dan pihak yang mempunyai sedikit modal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ivan Illich dalam Benny Susanto (2005 : 119), “komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern mengabdikan kepada kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas”. Akibatnya pendidikan yang humanisasi tidak tercapai dalam

proses pendidikan karena adanya komersialisasi pendidikan menurut Satriyo Brojonegoro hanya mampu dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modal untuk mengakses pendidikan (Darmaningtyas, 2005 : 31).

Dengan demikian, dari pengertian komersialisasi pendidikan menurut para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komersialisasi pendidikan merupakan suatu keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dalam hal ekonomis (keuntungan) sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan dalam proses humanisasi tidak tercapai. Akibatnya individu yang berasal dari kelas sosial rendah tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas seperti individu yang berasal dari kelas sosial atas.

Selain istilah komersialisasi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, komersialisasi pendidikan menurut Agus Wibowo (2008 : 111) juga mengacu pada dua pengertian yang berbeda bahwa :

komersialisasi hanya mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pendidikan serta perlengkapan yang serba mahal. Selain itu, komersialisasi pendidikan juga mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan penarikan uang pendaftaran dan uang sekolah saja, tetapi mengabaikan kewajiban yang harus diberikan kepada siswa.

Komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pembiayaan sangat mahal. Pada pengertian ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat, sehingga lembaga tersebut tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan, tetapi uang pembayaran sekolah sangat mahal. Pemungutan biaya tinggi hanya untuk memfasilitasi jasa pendidikan serta menyediakan infrastruktur pendidikan bermutu, seperti menyediakan fasilitas teknologi informasi, laboratorium dan perpustakaan yang baik serta memberikan kepada para guru atau dosen gaji menurut standar. Sedangkan untuk sisa anggaran yang diperoleh, digunakan untuk menanamkan kembali bentuk infrastruktur pendidikan. Komersialisasi

pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, tetapi dapat menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan nasional.

Komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang kuliah, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini biasa dilakukan oleh lembaga atau sekolah-sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan, tetapi tidak sepadan dengan uang yang pungut. Laba atau selisih anggaran yang diperoleh oleh lembaga pendidikan atau sekolah tersebut biasanya tidak ditanam kembali ke dalam infrastruktur pendidikan, tetapi dipergunakan untuk memperkaya atau menghidupi pihak-pihak yang tidak secara langsung bekerja menyajikan pelayanan di lembaga tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah anggota yayasan atau badan amal pendidikan yang menguasai lembaga pendidikan. Komersialisasi jenis ini melaksanakan praktik pendidikan dengan maksud memperoleh gelar akademik tanpa melalui proses serta mutu yang telah ditentukan sehingga dapat membunuh idealisme pendidikan Pancasila. Hal tersebut jelas tercantum di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 pasal 1 yang berbunyi bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara

Komersialisasi pendidikan dan privatisasi pendidikan sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Privatisasi berarti keinginan untuk mencari keuntungan yang hampir mempunyai kesamaan dengan komersialisasi. Berikut beberapa alasan penyebab terjadinya komersialisasi pendidikan yaitu:

1. Swastanisasi pendidikan sebagai bagian dari liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang pendidikan. Menurut Ritzer (2005: 564-565), *commit to user* privatisasi pendidikan adalah konsekuensi logis

dari “McDonalsasi Masyarakat” (*McDonaldization Of Society*) yang menjunjung prinsip kuantifikasi, efisiensi, terprediksi dan teknologisasi dalam setiap sendi kehidupan. Seperti halnya barang-barang konsumsi, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai *public good*, tetapi *private good* yang tidak lagi harus disediakan oleh pemerintah secara massal untuk menjamin harga murah.

2. Pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan. Sebagai contoh mengalami kesulitan dana akibat krisis ekonomi. Keadaan tersebut dapat menjadi sebuah kebenaran, tetapi dapat juga menjadi sebuah kebohongan. Artinya, pemerintah bukan dikatakan tidak mampu, tetapi tidak memiliki visi untuk berinvestasi di bidang pendidikan.
3. Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik. Sehingga lembaga pendidikan menjadi tidak efisien (mahal dan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan), tidak kompetitif (tidak termotivasi untuk bersaing meningkatkan mutu) dan tidak berkembang sebab swastanisasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan “*fund raising*”, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orangtua sebagai target utama perolehan dana.

c. Dampak Komersialisasi Pendidikan

Secara teoritis, komersialisasi pendidikan yang terjadi telah memberi pengaruh atau dampak terhadap proses pendidikan di Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Berikut beberapa kebaikan dari adanya komersialisasi pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai aspek lain yang lebih mendesak.
2. Memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam *commit to user* mencerdaskan bangsa.

3. Lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif sehingga terjadi peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan.
4. Gaji para pendidik (guru maupun dosen) dapat lebih ditingkatkan. Kesejahteraan yang lebih baik diharapkan dapat memacu kepuasan kerja dan kinerja mereka dalam mencerahkan anak didik.

Lemahnya kebijakan pemerintah dan penegakan hukum dapat mendistorsi swastanisasi pendidikan yang sebelumnya bertujuan mulia. Komersialisasi pendidikan juga dapat membawa dampak sosial yang tidak dapat diharapkan jika tidak disertai aturan dan etika sosial yang benar serta jelas. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya komersialisasi pendidikan di Indonesia yaitu :

1. Pendidikan menjadi mahal
Pendidikan menjadi “barang mewah” yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas khususnya bagi yang kurang mampu. Hal ini dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat kurang mampu yang akhirnya berdampak pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak dan kriminalitas.
2. *Gap* dalam kualitas pendidikan
Privatisasi pendidikan dapat meningkatkan kompetisi yang mampu menciptakan polarisasi lembaga pendidikan. Lembaga yang menang dalam persaingan dan perburuan dana akan menjadi sekolah unggulan. Lembaga pendidikan yang kalah akan semakin terpuruk menjadi sekolah “kurang gizi”.
3. Diskriminasi
Kesempatan memperoleh pendidikan semakin sempit dan diskriminatif. Masyarakat dari kelas sosial tinggi dapat memperoleh pendidikan relatif mudah, sedangkan masyarakat yang berasal dari kelas sosial rendah semakin sulit sehingga cenderung mendapatkan pendidikan yang seadanya.

4. Stigmatisasi

Adanya segregasi kelas sosial antara kaya dan miskin. Konsekuensinya terjadi pelabelan sosial bahwa sekolah ternama adalah sekolah milik orang dari kelas sosial tinggi. Sebaliknya, sekolah sederhana adalah sekolah bagi masyarakat kelas sosial rendah. Masyarakat biasa yang bersusah payah menyekolahkan anaknya, harus menerima kenyataan menjadi warga kelas dua karena “sumbangan dana pendidikannya” rendah.

5. Perubahan Misi Pendidikan

Komersialisasi dapat menggeser “budaya akademik” menjadi “budaya ekonomis” sehingga mengubah tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan masyarakat. Para pendidik kemudian berubah menjadi pribadi yang memiliki mentalitas “pedagang” daripada mentalitas pendidik. Mencari pendapatan tambahan lebih menarik daripada mengembangkan pengetahuan akibatnya lebih terdorong untuk mengumpulkan “kredit koin” daripada “kredit point”.

6. Memacu komersialisasi dan gaya hidup “besar pasak daripada tiang” akibatnya banyak peserta didik dari kalangan kelas sosial tinggi yang membawa barang mewah seperti mobil mahal ke sekolah.

7. Memperburuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan masa depan. Adanya dorongan misi untuk meningkatkan akumulasi kapital sebesar-besarnya, lembaga pendidikan kemudian lebih banyak menerima pelajar-pelajar yang berasal dari kelas sosial atas walaupun memiliki kecerdasan yang sedang. Pelajar yang berprestasi tetapi kurang mampu, tidak dapat sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat mengancam kepemimpinan masa depan. Sehingga mobilitas sosial vertikal hanya akan menjadi milik masyarakat yang mampu sekolah tinggi, meskipun secara intelektual diragukan.

8. Rantai kemiskinan semakin mustahil diputuskan oleh pendidikan. Secara sederhana, rantai kemiskinan dapat digambarkan karena miskin

orang tidak dapat sekolah, karena tidak sekolah, seseorang tidak dapat pekerjaan yang baik karena tidak dapat pekerjaan sehingga menjadi miskin begitu seterusnya. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutus rantai kemiskinan (*vicious circle of poverty*) semakin kehilangan fungsinya. Dalam konteks ini, komersialisasi pendidikan dapat mengarah pada pelanggaran “*poverty trap*” jebakan kemiskinan.

Era globalisasi saat ini telah mengancam kemurnian dalam pendidikan sebagai contoh banyaknya sekolah yang didirikan dengan tujuan sebagai media bisnis. Selain itu, munculnya sekolah-sekolah swasta elit yang bersaing menawarkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan juga tidak jauh berbeda dalam memungut biaya pendidikan yang tinggi. Sehingga banyak yang menawarkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan dengan imbalan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Ideologi kapitalisme menjadi sumber ketimpangan sehingga terdapat pandangan bahwa orang yang berkualitas adalah orang yang memiliki banyak kelimpahan material. Dalam pemikiran Marx tentang masalah pendidikan yang menyatakan bahwa :

Pendidikan merupakan proses historis dalam kehidupan manusia yang ditentukan oleh perkembangan masyarakat berdasarkan kondisi material ekonomi yang berkembang. Pendidikan sebagai struktur atas (superstruktur) yang ditentukan oleh ekonomi (hubungan produksi dan alat-alat produksi) sebagai struktur bawah (basis struktur) yang merupakan suatu pondasi perkembangan masyarakat. Pendidikan sebagai proses diajarkannya filsafat, ideologi, agama dan seni diajarkan sehingga menjadi media sosialisasi pandangan hidup dan kecakapan yang harus diterima masyarakat (terutama anak-anak). Selain itu, pendidikan juga sangat berkaitan erat dengan politik karena berada pada wilayah atas dari struktur masyarakat yang ada (Marx dalam Nurani Soyomukti, 2010: 358)

Menurut Marx, pendidikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai kecakapan hidup serta media sosialisasi dalam masyarakat. Namun, peran pendidikan juga mempunyai keterkaitan dengan masalah ekonomi bahkan menjadi faktor yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses tercapainya

pendidikan yang berkualitas. Sehingga maraknya komersialisasi pendidikan di era globalisasi saat ini juga menimbulkan berbagai opini pro dan kontra yang dilontarkan oleh masyarakat melalui tulisan-tulisan di media massa yang merupakan suatu fenomena yang begitu memprihatinkan pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan nasional dalam praktiknya masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan kecenderungan dunia pendidikan saat ini yang banyak terjebak ke arah komersialisasi bahwa pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Menurut Achmad F. Syaifudin dalam Menghargai Kerja keras bisa Dibangun Lewat Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih berorientasi pada hasil daripada prosesnya. (Kompas, 17/09/2004). Sedangkan Lidus Ardi dalam artikel pendidikan yang ditulis dalam Irawaty A. Kahar (Universitas Sumatra Utaranya, 23/01/2007) menyebutkan bahwa “pendidikan mahal di Indonesia juga masih jauh dari mutu, sehingga menimbulkan adanya komersialisasi di dunia pendidikan”.

Fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi maupun sekolah dengan status yang kurang jelas tumbuh subur terutama di kota besar bahkan merambah ke kota kecil. Dengan berbagai cara, lembaga pendidikan tersebut mengiklankan dan menawarkan program pendidikan untuk mendapatkan gelar seperti MBA (*Magister Bisnis Administration*) maupun MM (*Magister Management*) tanpa melalui proses pembelajaran. Lembaga-lembaga tersebut lebih mementingkan keuntungan daripada mutu sehingga dapat membunuh idealisme pendidikan Indonesia. Selain itu, muncul juga sekolah-sekolah dengan program dan perlengkapan yang serba mahal mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pada tingkat perguruan tinggi yang hanya dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi mapan.

Dalam pemikiran Marx, keadaan ini merupakan hubungan produksi kelas dominan yang cenderung mempunyai kesempatan untuk menguasai alat produksi dan melanggengkan kekuasaan penindasan. Hal ini jelas adanya bahwa lembaga atau sekolah-sekolah tersebut sebagai penguasa (kelas kapitalis) yang kemudian akan mengambil tenaga buruh demi kepentingannya yang tidak lain adalah masyarakat yang menyekolahkan anaknya terutama bagi yang kurang mampu.

Fenomena dan fakta pendidikan di atas merupakan suatu masalah yang lambat laun secara politik bakal menumbuh suburkan *culture capitalism* maupun *ideologi neoliberalism* di lembaga pendidikan khususnya di Indonesia dengan modus klasik “komersialisasi pendidikan”. Sehingga berakibat pada menurunnya mutu pendidikan nasional serta merusak budaya bangsa tanpa menghiraukan nilai-nilai moral bahkan dari segi sosial pendidikan mahal tidak mengangkat strata sosial masyarakat yang kurang mampu. Hal inilah yang kemudian membuat Karl Marx yakin bahwa basis bagi pendidikan adalah perkembangan ekonomi sebagai cara manusia untuk menghadapi alam untuk memenuhi kehidupan dan mengembangkannya. Dalam perubahan masyarakat inilah yang kemudian memunculkan kelas-kelas yaitu kelas tuan yang memegang kekuasaan untuk mengendalikan dan menindas kelas budak.

Monopoli terhadap alat-alat produksi, tenaga produksi (*productive force*) berupa sumber-sumber material yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebab terjadinya eksploitasi masyarakat oleh pihak yang menguasai. Pendidikan menjadi hal yang eksklusif dan jauh dari masyarakat umum bahkan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu (elit penguasa). Kemudian berkembang lagi bahwa pendidikan mulai bergeser perannya bukan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi menjadi sarana untuk menyebarkan hegemoni kekuasaan agar penindasan yang dilakukan menjadi hal yang biasa tanpa perlawanan.

Masyarakat kemudian diorganisir dengan ditentukan oleh hubungan ekonomi penindasan. Hubungan sosial dibangun untuk mematenkan tatanan bahwa sedikit orang yang berkuasa sedangkan kebanyakan orang mengalami kemiskinan. Dalam masyarakat inilah kemudian pendidikan dijadikan cara untuk mendukung masyarakat berkelas tersebut. Menurut teori Francis Fukuyama yang memproklamirkan kemerdekaan kapitalisme bahwa kapitalisme saat ini telah menghegemoni dunia pendidikan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari proses komersialisasi pendidikan Indonesia yang dapat dilihat dan dipahami dalam dua pengertian. *Pertama*, pendidikan yang dijadikan layaknya industri yang menghasilkan uang dan keuntungan yang berlipat-lipat. *Kedua*, sistem pendidikan

yang diformat sedemikian rupa (oleh skenario kapitalisme) untuk menyiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan dunia industri-kapitalis.

Sedangkan Peter McLaren juga mengatakan bahwa dalam dunia kapitalisme, sekolah adalah bagian dari industri, sebab sekolah adalah penyedia tenaga kerja atau buruh bagi industri.

Ada tiga pengaruh kapitalisme terhadap sekolah yaitu :

1) Hubungan antara kapitalisme dan pendidikan telah mengakibatkan praktek-praktek sekolah yang cenderung mengarah kepada kontrol ekonomi oleh kaum kelas sosial tinggi atau elit.

2) Hubungan antara kapitalisme dan ilmu telah menjadikan tujuan ilmu pengetahuan sebatas mengejar keuntungan.

Perkawinan antara kapitalisme dengan pendidikan serta kapitalisme dan ilmu telah menciptakan pondasi bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai material dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan martabat manusia. Pada akhirnya peserta didik dalam dunia pendidikan kita kehilangan sensitifitas kemanusiaan digantikan dengan kalkulasi kehidupan materialisme.

(<http://jalanpencerahan.wordpress.com/tulisanpencerahan/tatkalakapitalisme-kangkangi-pendidikan/>)

Sekolah sebagai bagian dari pendidikan menurut Peter McLaren di atas telah terbukti bahwa pendidikan telah terpengaruh kuat oleh mekanisme industri dan bisnis, sehingga sekolah menjadi instrumen produksi ekonomi. Bahkan tanpa adanya paksaan, kurikulum pendidikan juga ikut terpengaruh, misal dalam hal menentukan ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Akibatnya terciptalah kurikulum yang sepenuhnya berwatak kapitalistik. Indikator lain terbukti bahwa hanya sedikit jam pelajar yang menyediakan jam untuk ilmu-ilmu humaniora dan moral dibandingkan dengan pelajaran lainnya.

2. Tinjauan tentang Globalisasi

a. Pengertian Globalisasi

Istilah Globalisasi, pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarah, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara

komunis. Kata "*globalisasi*" diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah universal yang ruang lingkupnya meliputi seluruh dunia. Globalisasi sebagai proses juga mempunyai keterkaitan dengan *globalution* yaitu padanan kata dari *globalization* dan *evolution* (Nurani Soyomukti, 2010: 42). Sehingga globalisasi merupakan hasil perubahan (evolusi) dari hubungan masyarakat yang membawa kesadaran baru tentang hubungan atau interaksi antarumat manusia. Globalisasi sebagai suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia tidaklah mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia (Edison A. Jamli, 2005).

Era globalisasi menurut Mochtar Buchori (1995 : 140) adalah "proses yang mendorong umat manusia untuk beranjak dari cara hidup dengan wawasan nasional menuju ke arah cara hidup dengan wawasan global". Dalam wawasan ini dunia dipandang sebagai suatu sistem yang utuh, bukan hanya ditinjau dari letak geografis yang bernama negara atau bangsa. Situasi kehidupan yang bersifat global inilah, gejala dan masalah tertentu hanya dapat dipahami dan diselesaikan dengan baik jika masyarakat sebagai bagian dari negara atau bangsa mampu meletakkan kerangka yang bersifat global, bukan dalam kerangka lokal, nasional atau regional.

Menurut John Huckle, globalisasi adalah suatu proses dimana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Sementara itu, Priyono Tjiptoherjanto mengemukakan bahwa konsep globalisasi pada dasarnya mengacu pada pengertian ketiadaan batas negara. Achmad Suparman juga menyatakan bahwa globalisasi sebagai suatu proses yang menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Sehingga, globalisasi belum memiliki definisi yang tepat, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*) sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. (<http://salimahtantowi.wordpress.com/2009/03/15/pendidikandalamdinamika-globalisasi/>).

Menurut pendapat Sujiyanto globalisasi adalah “Sebagai proses yang berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia” (Sujiyanto, 2007: 97). Sebagaimana dikutip Malcom Waters dalam Tim Kreatif LKM UNJ (2011 : 21) yang menyatakan bahwa “globalisasi sebagai sebuah perubahan sosial yang didalamnya terdapat kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut”. Dilihat dari pandangan sosial, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, sedangkan dari sudut pandang teknologi yaitu perputaran arus informasi yang dinamis dan mampu melancarkan bisnis. Sedangkan menurut Anthony Giddens dalam Nurani Soyomukti (2010: 42) mendefinisikan “globalisasi sebagai arus utama yang membawa dampak mahahebat terhadap ruang waktu yang mengalami percepatan atau terjadinya *time space distanziation*”. Sehingga interaksi manusia dengan teknologi, manusia dengan manusia semakin intensif sehingga makna baru didapat dari objektivikasi, baik rasional maupun irasional karena perkembangan basis material maupun IPTEK yang terus berubah.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan definisi globalisasi secara khusus dan luas. Definisi secara khusus bahwa globalisasi mempunyai arti mengglobal atau menyatu atau menjadi satu yang tidak ada batasnya, sedangkan globalisasi dunia adalah menyatunya negara-negara di dunia ini yang mengglobal seakan-akan negara ini tidak ada batasnya sehingga segala yang berkembangan dalam suatu negara dapat diserap dengan mudah dan cepat oleh negara yang lain khususnya dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan definisi globalisasi secara luas globalisasi yang ingin menciptakan suatu kesatuan negara dengan meminimalisasi batas-batas teritorial maupun kebijakan-kebijakan regional atau dengan kata lain bagaimana menciptakan kekuatan dunia yang kuat. Selain itu, globalisasi juga merupakan waktu atau zaman yang ditandai oleh munculnya berbagai gejala serta masalah yang menuntut umat manusia

dituntut untuk menggantikan pola-pola perspsi dan pola-pola pikir tertentu, dan pola-pola yang bersifat nasional semata-mata ke pola-pola yang bercakupan global.

b. Kategori Globalisasi

Mengutip pendapat J.A. Scholte (2002 : 15-17) yang menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima kategori pengertian tentang globalisasi secara umum. Kelima kategori definisi tersebut berkaitan satu sama lain dan masing-masing mengandung unsur yang khas. Berikut kelima kategori pengertian globalisasi secara umum :

1. Globalisasi sebagai internasionalisasi

Globalisasi dalam konsep ini dipandang sebagai kata sifat (*adjective*) untuk menggambarkan hubungan antarbatas dari berbagai negara. Globalisasi menggambarkan pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi internasional. Semakin besar volume perdagangan dan investasi modal, maka ekonomi antarnegara semakin terintegrasi menuju ekonomi global.

2. Globalisasi sebagai liberalisasi

Dalam pengertian ini, globalisasi merupakan sebuah proses penghapusan hambatan-hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antarnegara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa-batas. Sehingga jika setuju dengan pendapat pentingnya menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan kontrol modal biasanya berlindung di balik globalisasi.

3. Globalisasi sebagai universalisasi

Dalam pemahaman ini, kata *global* digunakan sebagai proses mendunia dan globalisasi merupakan proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia. Contoh klasik dari konsep ini adalah penyebaran teknologi komputer, televisi maupun internet.

4. Globalisasi sebagai *westernisasi* atau modernisasi

Globalisasi dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika, adanya struktur-struktur sosial modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme bahkan birokratisme) disebarkan ke seluruh penjuru dunia yang dalam prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mendarahdaging serta merampas hak *self determination* rakyat setempat.

5. Globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial (sebagai persebaran supra-teritorialitas)

Globalisasi dalam kategori ini dipahami sebagai sebuah proses yang melahirkan sebuah transformasi dalam spatial organisasi dari hubungan sosial dan transaksi ditinjau dari segi ekstensitas, intensitas, kecepatan dan dampaknya yang memutar mobilitas antarbenua atau antarregional serta jaringan aktivitas.

Dari kelima kategori pengertian globalisasi di atas maka adanya globalisasi dapat dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi dari hubungan ekonomi, sosial dan kultural yang menembus sekat-sekat geografis ruang dan waktu. Dengan demikian, globalisasi hampir melingkupi semua hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi serta transportasi.

c. Masyarakat, Pendidikan dan Era Globalisasi

Pendidikan merupakan rangkaian proses pemberdayaan potensi dan kompetensi individu untuk menjadi manusia berkualitas yang berlangsung sepanjang hayat. Adanya pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara, agar menjadi warga negara yang berkualitas sesuai cita-cita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga pendidikan mampu untuk menunjang kehidupan dan taraf hidup agar menjadi lebih baik serta memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai manusia.

Dunia pendidikan merupakan suatu proses tanpa akhir yang dilakukan oleh siapapun, terutama negara. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan, pendidikan telah ada seiring dengan lahirnya peradaban manusia. Sehingga, letak pendidikan dalam masyarakat mengikuti perkembangan corak sejarah manusia. Menurut R.S Peters dalam Siti Murtiningsih (2004 : 3) menyatakan bahwa “pada hakikatnya pendidikan tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat”.

Harapan pendidikan berkualitas menjadi hal yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat dari kelas sosial yang tinggi bahkan masyarakat yang berasal dari kelas sosial rendah. Seperti yang diungkapkan oleh Ngainum Naim (2009 : 259) bahwa “seiring meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan berkualitas juga menjadi incarannya”. Bagi masyarakat yang secara ekonomi sudah cukup mapan, biaya pendidikan bukan menjadi pertimbangan utama. Kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya lebih diutamakan sehingga mampu menjadi individu yang bermutu dan siap menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks.

Pandangan inilah yang membuktikan bahwa masyarakat mempunyai harapan tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga-lembaga pendidikan favorit, baik sekolah atau perguruan tinggi. Lembaga pendidikan diyakini memiliki kualitas yang memadai dalam meningkatkan kualitas anak-anaknya. Fenomena ini dapat terlihat menjelang awal tahun ajaran baru, sekolah atau perguruan tinggi favorit dikejar oleh para pendaftar. Kenyataan inilah yang akhirnya membuktikan bahwa pendidikan merupakan sarana yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dalam meningkatkan status sosial seseorang. Hal ini juga diungkapkan oleh Clark dalam Ravik Karsidi (2005: 185) yang menyatakan bahwa “pendidikan dapat dipergunakan untuk membantu penduduk dalam meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang lebih tinggi melalui usaha mereka sendiri”. Dengan kenyataan yang ada sehingga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh lembaga

pendidikan yang ada untuk terus meningkatkan kualitasnya agar animo masyarakat pun lebih tinggi dan meningkat.

Formulasi pendidikan berkualitas juga didesak masyarakat agar tetap murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan sosial masyarakat terutama lapisan sosial kelas bawah. Hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat memiliki tingkat perekonomian yang memadai. Bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari apalagi membiayai pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Padahal setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Seperti yang tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional atau biasa disebut dengan Sisdiknas yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”.

Pendidikan yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan dan taraf hidup manusia agar menjadi lebih baik serta memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai manusia untuk saat ini sulit untuk tercapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena fungsi dan tujuan luhur pendidikan tersebut sekarang mulai luntur oleh prioritas melayani persaingan global daripada memeliharanya. Praktik lembaga pendidikan formal yang seharusnya menjadi transformasi dan konservasi nilai-nilai budaya telah terpengaruh oleh kepentingan kaum pemodal. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, apalagi menyangkut dengan situasi pendidikan yang banyak berorientasi dengan masalah mahalnnya biaya pendidikan sekarang. Selain itu, era pasar bebas juga merupakan tantangan baru bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia.

Dalam realitas pendidikan Indonesia, pengaruh globalisasi membangun peran ambivalen terhadap hakikat keaslian pendidikan. Globalisasi telah berhasil mengubah arah pendidikan menuju visi kapitalisme.

Pendidikan berorientasi pasar, berlogika kuantitas hingga upaya privatisasi pendidikan merupakan beberapa contoh dari gejala ketertundukkan hakikat pendidikan terhadap hasrat kapitalisme global. Terdapat tiga perubahan mendasar menurut Nurani Soyomukti (2008 : 7-8) yang akan terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia karena arus globalisasi. *Pertama*, “dunia pendidikan akan menjadi objek komoditas dan komersil seiring dengan kuatnya hembusan paham neo-liberalisme yang melanda dunia”. Paradigma dalam dunia komersial adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinyu. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Tidak dapat dihindari lagi apabila sekolah masih membenani orang tua murid dengan sejumlah anggaran berlabel uang komite atau uang sumbangan pengembangan institusi meskipun pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibatnya dunia pendidikan semakin sulit dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari suatu negara yang mempunyai hak sama dalam memperoleh pendidikan.

Kedua, menurut Nurani Soyomukti perubahan yang terjadi dibuktikan dengan mulai longgarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh Negara (2008 : 08). Tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global, seperti IMF dan World Bank, membuat dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan perubahan. Lahirnya UUD 1945 yang telah diamandemen, UU Sisdiknas dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralistis menjadi desentralistis. Sekilas terlihat bahwa pemerintah masih mengontrol sistem pendidikan di suatu negara melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Namun, pada kenyataannya tuntutan untuk berkompetensi dan adanya tekanan institusi global yang kemudian membuat dunia politik dan pembuat kebijakan cenderung digerran oleh pasar.

Perubahan yang terakhir bahwa “globalisasi akan mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan” (Nuransiyanto, 2008 : 08). Pemanfaatan teknologi baru, seperti komputer dan internet telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Pemanfaatan multimedia yang portable dan menarik menjadi pemandangan yang biasa dalam praktik pembelajaran di dunia pendidikan Indonesia. Sehingga diperlukan ketepatan dalam memahami pengaruh dan dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan. Dampak globalisasi dunia terhadap suatu negara yang membahayakan perkembangan kehidupan harus mendapatkan perhatian karena dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya perlu adanya perkembangan khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya perlu ditolak, misalnya budaya mabuk-mabukan, minuman keras, narkoba, tari-tarian bugil atau setangan telanjang, *blue film* maupun hidup kumpul kebo. Untuk menolak dampak-dampak yang negatif ini Bangsa Indonesia harus membudayakan dengan kuat diantaranya budaya yang terdapat di dalam Pancasila sebagai Dasar Negara dan agama yang dianut masing-masing yang syah diakui oleh negara. Jadi, adanya anggapan bahwa proses globalisasi membuat dunia seragam akan menghapus identitas dan jati diri ternyata tidaklah benar. Apalagi dengan kecenderungan bahwa kebudayaan lokal dan etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tidak berguna. Kemajuan IPTEK telah membuat surutnya peranan kekuasaan ideologi dan kekuasaan negara.

Masalah penyesuaian masyarakat dalam menghadapi era globalisasi telah menuntut masyarakat untuk mengikuti sistem pendidikan yang berwawasan global sebagai *social investment* agar mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Sistem pendidikan yang cenderung kapitalis kemudian tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek pendidikan, tetapi juga sebagai objek pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi

kesejahteraan manusia dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara mampu bertahan hidup serta mencapai kesejahteraan, kesuksesan, berkualitas dan kompetitif dalam konteks globalisasi.

B. Penelitian yang Relevan

Pendidikan menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia untuk menyambut masa depan. Dengan pendidikan yang tinggi berarti seseorang telah mempunyai potensi atau kesempatan untuk menempati kelas sosial yang layak (tinggi). Proses pencapaian pendidikan yang tinggi tidaklah mudah, harus melalui usaha sadar yang kemudian mampu mendewasakan seorang individu yang belum dewasa. Dalam karya yang ditulis oleh Humidatun Nisa³, dengan mengambil judul penelitian “Komersialisasi Pendidikan dan Hilangnya Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Siswa (Studi Fenomenologis pada Siswa Putus Sekolah di Kota Malang)” merupakan syarat utama untuk dapat menyelesaikan dan mendapat gelar Sarjana (S1) di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Tema tentang komersialisasi pendidikan menjadi kenyataan yang tidak dapat ditolak sebagai gambaran dari pendidikan yang terjadi Indonesia, penelitian ini lebih difokus terhadap fenomena putus sekolah di Indonesia khususnya di kota Malang. Banyak faktor yang menyebabkan siswa mengalami putus sekolah, dan salah satu penyebabnya adalah biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat apalagi yang berasal dari kelas sosial bawah.

Fenomena putus sekolah yang terjadi di Kota Malang menjadi hal yang berlawanan dengan keadaan dan fakta sebenarnya apalagi Kota Malang yang dipandang sebagai kota berpendidikan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan fenomena putus sekolah yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Malang. Fenomena putus sekolah yang terjadi mempunyai hubungan erat dengan komersialisasi pendidikan terhadap pemenuhan ekonomi, sosial, budaya siswa. *commit to user*

Penelitian ini dilakukan terhadap 5 siswa dari 12 siswa yang putus sekolah di Kota Malang, berdasarkan data yang diperoleh dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Malang (FMPP) pada tahun 2009. Dari hasil penelitian yang diperoleh tersebut menyatakan bahwa kategori komersialisasi pendidikan yang terjadi hingga berefek dengan adanya putus sekolah mempunyai hubungan dengan salah satu faktor biaya-biaya gratis yang ditawarkan oleh sekolah tentang biaya seragam yang gratis, LKS gratis dan biaya gratis yang lain yang pada kenyataannya tidak benar realitasnya.

C. Kerangka Berpikir

Masyarakat Kelurahan Jebres, Surakarta sebagai bagian dari warga negara Indonesia pada hakekatnya mempunyai kesempatan sama dalam memperoleh pendidikan layak sesuai yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Sedangkan dalam pasal 28 B ayat (1) yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan umat manusia”. Selain itu, dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, pendidikan nasional juga bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. dan pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

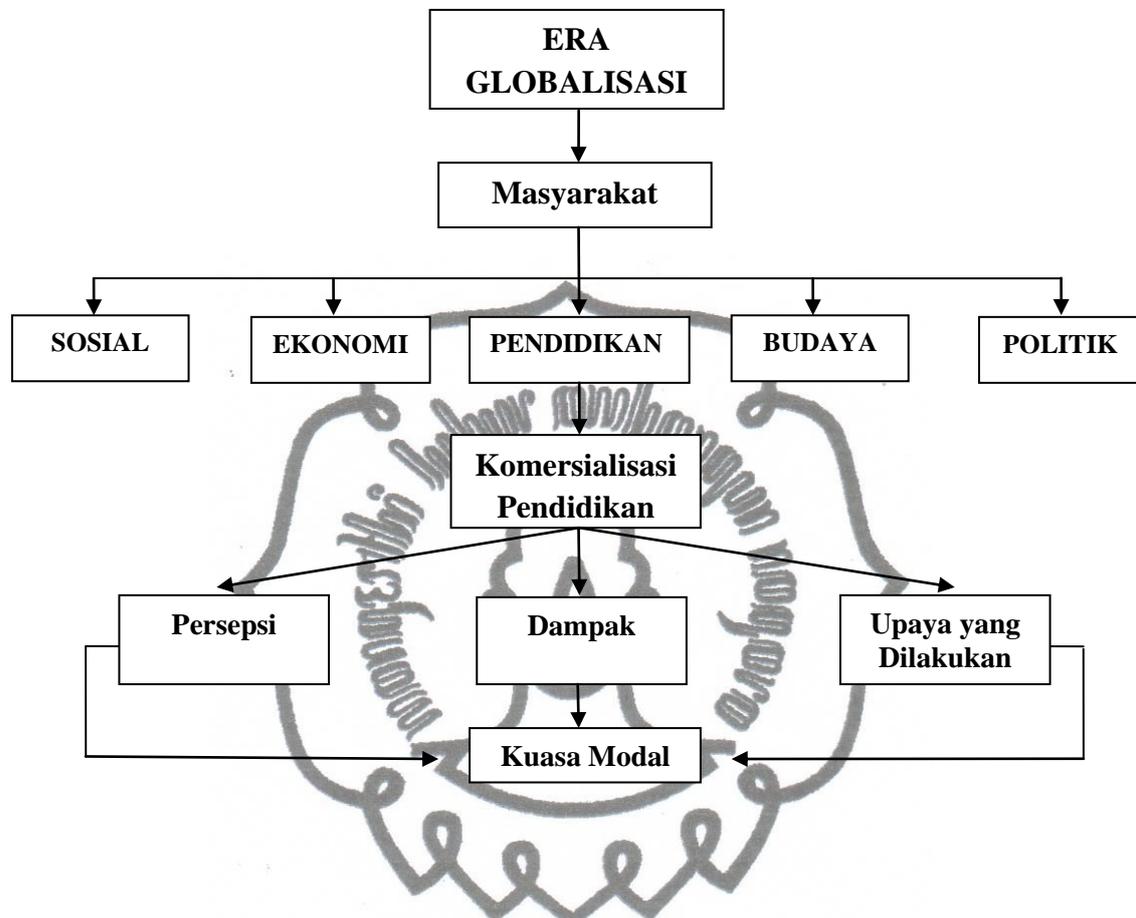
Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat seperti halnya masyarakat Kelurahan Jebres juga harus mempunyai kedudukan sama untuk memperoleh pendidikan yang tepat agar bebas dari kebodohan serta mampu mengantarkannya menjadi manusia yang berguna. Hal ini tanpa ada masalah dalam membedakan gender, strata sosial, etnis, golongan, agama maupun status untuk memperoleh perlindungan di bidang pendidikan. Hak pendidikan menjadi hak setiap warga negara karena jika hak ini berhasil diimplementasikan dengan baik maka bangsa ini akan memperoleh kemajuan karena pendidikan merupakan pondasi kehidupan bernegara.

Era globalisasi yang semakin melanda tidak hanya berpengaruh terhadap bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya, dunia pendidikan saat ini juga telah terkena pengaruh akibat globalisasi yang begitu terlihat kasat mata. Sebagai contoh ketika semua bangsa sepakat mengumandangkan slogan *education for all*, tetapi globalisasi pendidikan menciptakan *education for rich people only*. Hal ini dapat dilihat dari fenomena mahalny biaya masuk perguruan tinggi maupun sekolah yang berkualitas bahkan berstandar internasional.

Adanya peran ganda tersebut pada akhirnya akan menciptakan kapasitas sosial yang terbelah. Orang-orang berkualitas dan kompetitif hanya akan dimiliki oleh kelas sosial tinggi yang mampu membiayai pendidikan yang mahal. Sedangkan kelas sosial lain yang lebih rendah adalah orang-orang yang tidak berkualitas, tidak kompetitif bahkan hanya akan menjadi orang pinggiran bahkan dalam kuantitas yang banyak. Keterbelahan kapasitas sosial ini pada akhirnya akan berdampak pada makin lebarnya jurang kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Akibatnya komersialisasi pendidikan yang sudah ada mempunyai potensi semakin membesar sehingga tidak hanya merugikan pihak yang secara finansial tertutup peluangnya untuk menikmati pendidikan. Bahkan dalam jangka panjang, negara dan bangsa Indonesia akan merasakan akibatnya. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan ditemukan di kelompok atau kelas masyarakat yang latar belakangnya memang memungkinkan secara materiil (modal).

Dengan demikian komersialisasi pendidikan dapat berakibat pada pragmatisme cara berfikir dan bertindak. Pendidikan hanya dipandang sebagai investasi sehingga nilai-nilai yang ditanamkan dalam dunia pendidikan terbatas pada nilai-nilai yang berguna bagi dunia usaha dan bukan untuk pengembangan ilmu serta pengetahuan itu sendiri. Adanya fenomena mahalny pendidikan pada era globalisasi saat inilah yang kemudian berakibat pada terciptanya komersialisasi pendidikan. Berikut ini skema kerangka berpikir yang akan mempermudah dalam memahaminya :



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kos dan kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) tepatnya di Kelurahan Jebres, Surakarta. Subyek penelitian yaitu masyarakat Kelurahan Jebres yang mempunyai anak sekolah Kelurahan Jebres tepatnya yang mempunyai anak sekolah di berbagai jenjang pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi. Pemilihan tempat ditentukan dengan pertimbangan karena peneliti tinggal di Kelurahan Jebres, Surakarta sehingga mengetahui bagaimana keadaan masyarakat terutama dalam hal pendidikan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian terhitung sejak proses penyusunan proposal sampai penyusunan laporan akhir yaitu dimulai dari bulan Januari 2011 sampai Juni 2011. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat perubahan waktu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang diperlukan dalam penelitian. Perincian waktu penelitian sebagai berikut :

No	Kegiatan	TAHUN 2011					
		Jan'11	Feb'11	Mar'11	Apr'11	Mei'11	Juni'11
1.	Penyusunan Proposal						
2.	Perijinan						
3.	Pengumpulan Data						
4.	Analisis Data						
5.	Penyusunan Laporan						

Tabel 1. Waktu dan Kegiatan Penelitian

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi serta menjelaskan makna dibalik sebuah realita. Peneliti melihat peristiwa di lapangan, berupaya menemukan apa yang sedang terjadi dalam dunia yang diteliti (Burhan Bungin, 2003: 82). Penelitian kualitatif merupakan penelitian multimetode dengan satu fokus masalah penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif juga memiliki sudut pandang naturalistik dan pemahaman interpretif tentang pengalaman manusia (Agus Salim, 2006 : 35-38). Menurut H.B. Sutopo sudut pandang naturalistik (2002 : 33) adalah topik penelitian kualitatif yang diarahkan pada kondisi asli atau sebenarnya dari subyek penelitian. Kondisi subyek tersebut tidak dipengaruhi oleh perlakuan (*treatment*) secara ketat oleh peneliti. Sedangkan, sudut pandang interpretif dalam penelitian kualitatif adalah penafsiran data (termasuk penarikan kesimpulan) secara idiografis, yaitu mengkhususkan kasus daripada mengikuti hukum-hukum generalisasi. Interpretasi dalam penelitian kualitatif tidak mengarah generalisasi dari hasil penelitiannya (H.B.Sutopo, 2002: 44). Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975 : 5) dalam Lexy J. Moleong (2007 : 4) mendefinisikan "metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

Tugas peneliti dalam penelitian kualitatif menurut H.B Sutopo (2002 : 35) yaitu menggambarkan atau menjelaskan tentang situasi yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data dari lapangan. Pendekatan kualitatif meliputi latar ilmiah dan individu secara holistik (utuh) sehingga tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi sebagai bagian dari keutuhan atau keseluruhan. Menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam Lexy J.Moleong (2007: 5) yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan metode yang telah ada. Disamping itu, dalam konteks Jane Richie, penelitian kualitatif adalah "upaya untuk menyajikan dunia

commit to user

sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti” (Lexy J. Moleong, 2007 : 6).

Dari definisi tentang penelitian oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian meliputi perilaku, persepsi, tindakan yang sifatnya secara holistik dan naturalistik. Penafsiran kualitatif secara interpretif atas pengalaman manusia dengan menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan dengan metode yang sistematis.

2. Strategi Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian kualitatif yang digunakan, maka strategi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah strategi studi kasus, Strategi studi kasus merupakan strategi penelitian pada kasus tertentu untuk mempelajari, menerangkan atau memahami suatu kasus tanpa adanya paksaan. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok jika pokok pertanyaan suatu penelitian berhubungan dengan “*how*” atau “*why*”. Menurut Yin (2000 : 18), “studi kasus adalah suatu empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata jika batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multi sumber bukti dimanfaatkan”. Studi kasus digunakan untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian yaitu tentang komersialisasi pendidikan di era globalisasi. Data dari lapangan kemudian disusun dalam bentuk teks yang menekankan pada permasalahan yang bersifat kekinian.

Studi kasus dalam penelitian ini dikhususkan menjadi studi kasus tunggal terpancang. Menurut Sutopo, H.B (2002 : 112), “Studi kasus tunggal adalah penelitian yang hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi atau satu objek)”. Jumlah sasaran (lokasi studi) tidak menentukan penelitian berupa studi kasus tunggal maupun ganda, walaupun penelitian dilakukan di beberapa lokasi (beberapa kelompok atau sejumlah pribadi), jika sasaran studi memiliki karakteristik sama atau seragam maka penelitian tersebut tetap merupakan studi kasus tunggal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian terpancang karena sasaran, tujuan serta masalah ditetapkan terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai data dalam suatu penelitian. Menurut Lofland yang dikutip dalam Moleong (2007: 157) mengatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber data yang relevan dapat dijadikan sasaran penggalian informasi dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut :

1. Informan (narasumber)

Dalam penelitian kualitatif, informan memiliki kedudukan yang penting untuk memperoleh informasi dengan baik dan benar permasalahan yang akan dikaji peneliti dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Menurut H.B Sutopo (2002 : 50), “Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi”. Informan bukan sekedar memberikan tanggapan, tetapi lebih memilih arah dan selera dalam memberikan informasi yang dimiliki. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Jebres tepatnya yang mempunyai anak sekolah di berbagai jenjang pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi. Selain itu, ada Informan lain sebagai pembanding yaitu pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat setempat serta pihak yang mempunyai hubungan dengan instansi pendidikan misalnya para pendidik atau kepala sekolah.

2. Peristiwa dan Aktifitas

Data penelitian dapat dikumpulkan dari peristiwa, aktivitas dan perilaku sebagai sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut HB. Sutopo (2002 : 51) yang menyatakan bahwa “Dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, peneliti mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung”. Sehingga peristiwa atau aktivitas diamati secara langsung merupakan aktivitas yang masih berlangsung pada saat penelitian.

Dalam sebuah penelitian perlu adanya kajian terhadap aktivitas yang dilakukan meskipun tidak harus secara langsung diamati. Peristiwa atau aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi masyarakat

Kelurahan Jebres, Surakarta terhadap komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi.

3. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang sama pentingnya dengan sumber data lain di dalam suatu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumen yang dapat digunakan adalah penelitian-penelitian relevan yang telah dilakukan di tempat yang berbeda dan data yang diperoleh di institusi pendidikan yang terkait serta data yang diperoleh dari internet. Selain itu, beragam foto dan catatan lapangan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang komersialisasi pendidikan di era globalisasi.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan di beberapa tempat yaitu perpustakaan Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, perpustakaan FKIP UNS, perpustakaan FISIP UNS, perpustakaan pusat UNS dan perpustakaan lain yang mendukung serta mempunyai referensi yang berkaitan dengan jalannya penelitian.

D. Teknik Cuplikan

Teknik cuplikan sangat dibutuhkan dalam setiap penelitian karena terdapat suatu kemungkinan adanya keterbatasan yang muncul seperti dalam hal waktu, tenaga dan biaya. Sehingga dalam menentukan sumber data, peneliti harus memutuskan siapa dan berapa jumlah narasumber yang diperlukan, apa dan dimana aktivitas serta dokumen apa saja yang akan dikaji sebagai sumber informasi utama. Keputusan ini didasarkan teknik cuplikan yang dipandang sesuai dengan kondisi pada saat penelitian. Menurut Sutopo, H.B (2002 : 55) yang menyatakan bahwa “Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi”. Cuplikan diambil untuk mewakili informasi dengan kelengkapan dan kedalaman yang tidak tergantung pada jumlah informan.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. *Purposive sampling* yaitu teknik mendapatkan sample dengan memilih individu-individu yang dianggap

mengetahui informasi, mengetahui permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data (Goetz Le Compte dalam H.B. Sutopo, 2002: 185). Sedangkan menurut Patton yang dikutip dalam Sutopo, H.B (2002 : 185), “Purposive sampling adalah pemilihan Informan yang dipandang paling kuat sehingga terdapat kemungkinan pilihan Informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data”.

Dalam penelitian ini, dipilih Informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang memiliki kebenaran dan pengetahuan yang mendalam. Dengan teknik *purposive sampling*, peneliti tidak menjadikan semua masyarakat sebagai informan, tetapi peneliti memilih informan yang dipandang mengetahui dan cukup memahami tentang komersialisasi pendidikan di era globalisasi terutama masyarakat yang mempunyai anak sekolah di berbagai jenjang pendidikan di Kelurahan Jebres, Surakarta serta mampu untuk diajak bekerjasama, seperti bersikap terbuka dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Informan, peristiwa dan aktifitas, dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan Langsung (*Observasi*)

Observasi adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis (James A.Black & Dean J. Champion, 1992:286). Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai proses dan tindakan suatu objek yang diteliti yaitu manusia, tempat dan

situasi sosial. H.B Sutopo (2002: 64) menjelaskan bahwa “teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda dan rekaman gambar”. Menurut Spradley dalam H.B Sutopo (2002 : 65-69) “Observasi dapat dibagi menjadi observasi tak berperan dan observasi berperan yang terdiri dari berperan pasif, berperan aktif dan observasi berperan”, masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

a. Observasi tak berperan

Dalam observasi ini, peran peneliti tidak diketahui oleh subjek yang diteliti. Observasi ini dapat dilakukan dengan jarak jauh untuk mengamati perilaku seseorang atau sekelompok orang di suatu lokasi tertentu dengan memilih tempat khusus yang berada di lokasi, tetapi di luar perhatian kelompok yang diamati.

b. Observasi Berperan

Dalam observasi ini, peneliti mendatangi lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian sehingga kehadirannya diketahui oleh pihak yang diamati.

1) Observasi berperan pasif

Observasi berperan pasif atau disebut juga dengan observasi langsung dilaksanakan secara formal maupun informal, untuk mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi di tempat kejadian.

2) Observasi Aktif

Peneliti tidak hanya berperan dalam bentuk dialog yang mengarah pada pendalaman dan kelengkapan data, tetapi juga dapat mengarahkan peristiwa yang sedang dipelajari demi kemantapan data.

3) Observasi Berperan Penuh

Peneliti memiliki peran dalam lokasi studinya sehingga benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan yang ditelitinya dan peran peneliti tidak bersifat sementara sehingga peneliti tidak hanya mengamati, tetapi berbuat sesuatu, berbicara dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi berperan pasif dengan mendatangi lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di Kelurahan

Jebres, Surakarta untuk melihat dan mengamati situasi serta kondisi yang ada sehingga mendapatkan kebenaran dan melihat kenyataan yang terjadi.

2. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002: 135).

Menurut H.B Sutopo (2002 : 59), “Ada dua jenis teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur yang disebut dengan wawancara mendalam (*indept interviewing*)”. Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang sering disebut dengan wawancara terfokus. Dalam wawancara terstruktur, masalah ditentukan oleh peneliti sebelum wawancara dilakukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur atau mendalam dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “*open ended*” dan mengarah pada kedalaman informasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dan mendalam yang bersifat “*open ended*”. Wawancara dilakukan dengan *face to face*, bebas, suasana informal dan pertanyaan tidak terstruktur, tetapi tetap mengarah pada masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Jebres tepatnya yang mempunyai anak sekolah di berbagai jenjang pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi. Selain itu, ada Informan lain sebagai pembanding yaitu pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat setempat serta pihak yang mempunyai hubungan dengan instansi pendidikan misalnya para pendidik atau kepala sekolah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mencatat dan mempelajari data yang sudah ada di instansi-instansi terkait. Dokumen tertulis maupun arsip memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif terutama jika kajian penelitian mengarah pada latar belakang atau peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan masa kini yang sedang diteliti.

Menurut Sutopo, H.B (2002 : 54), “Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu”. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekaman wawancara dan hasil foto serta arsip monografi Kelurahan Jebres, Surakarta yang relevan dan mendukung penelitian.

F. Validitas Data

Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan yang sesungguhnya. Validitas artinya senyatanya atau sebenar-benarnya (Lawrance Neuman, 2000: 171). Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif kesahihannya diperoleh dengan teknik triangulasi. Pengujian validitas data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara *Triangulasi Data* yaitu, “*measuring distance between objects by making observations from multiple positions*” (Lawrance Neuman, 2000 : 124-125). Maksudnya untuk mendapatkan data yang tidak hanya diambil dari satu sumber melainkan dari beberapa sumber. Hal ini di maksudkan untuk mengecek kebenaran data yang sejenis yang diperoleh dari sumber lain. Dengan kata lain, suatu data akan dikontrol oleh data yang sama namun dari sumber yang berbeda.

Menurut Moleong (2007 : 330), “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan data itu”. Menurut Sutopo, H.B (2002 : 78) dengan mengutip Patton, teknik triangulasi ada empat macam yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama.
2. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data maupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
3. Triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. *commit to user*

4. Trianggulasi teori (*theoretical triangulation*) yaitu trianggulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan trianggulasi data (sumber) dan trianggulasi metode. Trianggulasi data yaitu pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber untuk mengumpulkan data yang sama. Informasi yang diperoleh selalu dibandingkan dan diuji dengan data atau informasi yang lain untuk mengecek kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Sedangkan trianggulasi metode yaitu pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Untuk mengembangkan validitas data penelitian, peneliti juga menggunakan teknik review informan atau *cross check* data. Teknik ini dilakukan dengan cara menginformasi ulang data yang telah disusun kepada informan, kegunaannya adalah untuk memperoleh kebaikan dan kebenaran data, sehingga jika ada kesalahan atau ketidaklengkapan dari hasil informasi sebelumnya, khususnya yang dipandang sebagai informan kunci.

G. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan hal penting dalam penelitian karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Menurut Bodgan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong (2007 : 248) menyatakan bahwa “Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mentesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Menurut Miles dan Huberman (1992 : 20) “Analisis alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote* (catatan lapangan). Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang penelitian hingga laporan akhir untuk mempertegas, mempermudah, membuang hal yang tidak penting serta mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

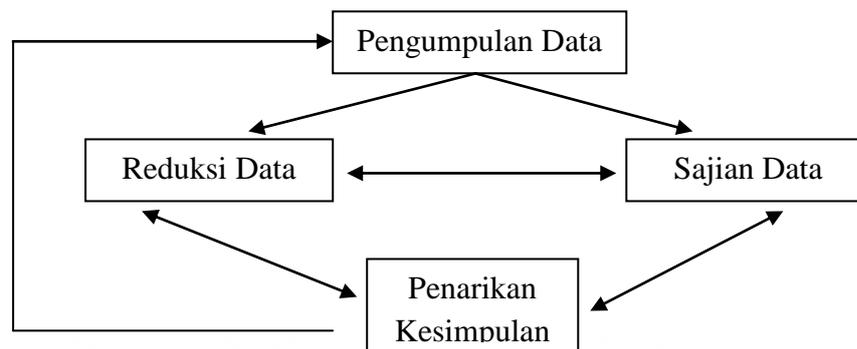
2. Penyajian Data atau Display

Penyajian data adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan dengan melihat penyajian data, dapat dipahami dengan berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman penyajian data yang dapat meliputi berbagai matriks, gambar, skema dan tabel. Semuanya dirancang untuk merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan penelitian yang telah diteliti dari awal hingga akhir. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan akhir ditentukan sampai proses pengumpulan data berakhir. Dalam melakukan penarikan kesimpulan peneliti bersikap terbuka yang artinya apabila pada akhir penelitian menggunakan data yang kurang akurat, peneliti tidak segan-segan untuk mengadakan penyimpulan ulang.

Komponen analisis tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbentuk siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara keempat komponen yaitu pengumpulan data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, proses analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif

Keterangan :

Peneliti melakukan pengumpulan data yang dianggap membantu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data direduksi dengan melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote* (catatan lapangan). Proses ini berlangsung terus sepanjang penelitian hingga laporan akhir untuk mempertegas, mempermudah dan membuat fokus, membuang hal yang tidak penting serta mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Setelah reduksi data peneliti menyajikan data yaitu merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak. Setelah data tersajikan, maka penulis menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari awal hingga akhir pencarian. Dalam melakukan penarikan kesimpulan peneliti bersikap terbuka artinya jika di akhir penelitian ditemukan data yang kurang akurat maka peneliti tidak segan-segan untuk mengadakan penyimpulan ulang.

H. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan secara pasti seperti halnya penelitian kuantitatif. Menurut Husnaini Usman dan Purnomo Setiady A, (2000:82-84), langkah-langkah penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi lima yaitu :

1. Studi pendahuluan untuk penjajagan keadaan di lapangan agar lebih fokus.
2. Pembuatan pradesain penelitian yaitu membuat desain tentang teori, instrumen penelitian dan mendesain analisis data.
3. Seminar pradesain yaitu melakukan seminar sebagai umpan balik dari proposal penelitian untuk mengadakan perbaikan tulisan.
4. Pengumpulan data dan memasuki lapangan meliputi memilih lokasi atau tempat, informan (pelaku) dan kegiatan (aktivitas) di lapangan.
5. Analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Akan tetapi, langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan mengambil prosedur penelitian dari H.B.Sutopo (2002 : 187-190) yang meliputi empat tahap, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Untuk lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut :

a. Persiapan

- 1) Menyusun proposal penelitian yang meliputi pengajuan judul dan tulisan proposal penelitian kepada dosen pembimbing.
- 2) Membuat desain penelitian yaitu dengan mengumpulkan bahan atau sumber materi penelitian yang berasal dari lapangan berupa data dan pengamatan awal serta menyiapkan instrumen penelitian atau alat observasi.
- 3) Mengurus perizinan penelitian.
- 4) Menyiapkan instrument penelitian atau alat observasi.

b. Pengumpulan Data

- 1) Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan berperan serta atau observasi partisipan.
- 2) Membuat *fieldnote* (catatan lapangan) dan transkrip hasil wawancara.
- 3) Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan.

c. Analisis Data

- 1) Menentukan teknik analisis data yang tepat sesuai desain penelitian yang meliputi reduksi data (pembuatan matriks hasil penelitian lapangan),

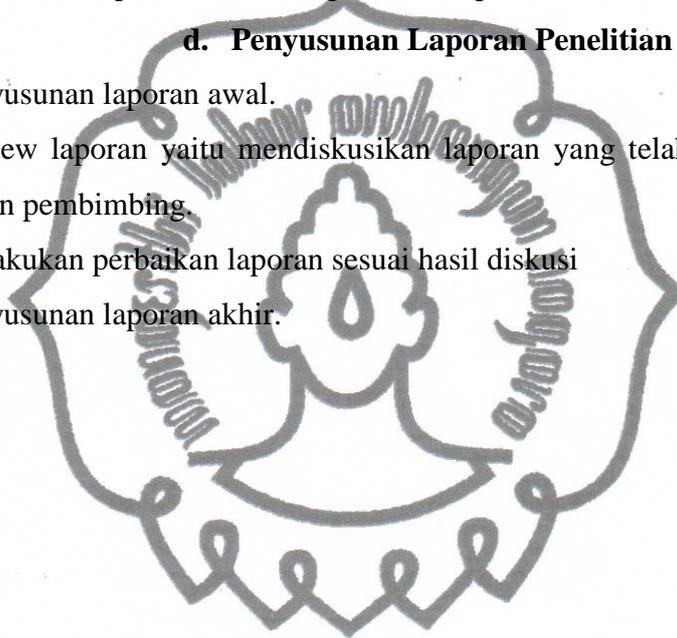
commit to user

penyajian data (pembuatan matriks hasil lapangan dengan matriks teori) dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

- 2) Mengembangkan hasil intepretasi data dengan analisis lanjut kemudian disesuaikan dengan hasil temuan di lapangan.
- 3) Melakukan pengayaan dalam menganalisis data yang sudah ada dengan dosen pembimbing.
- 4) Membuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian.

d. Penyusunan Laporan Penelitian

- 1) Penyusunan laporan awal.
- 2) Review laporan yaitu mendiskusikan laporan yang telah disusun dengan dosen pembimbing.
- 3) Melakukan perbaikan laporan sesuai hasil diskusi
- 4) Penyusunan laporan akhir.



BAB IV

SAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres

a. Keadaan Geografis

Kota Surakarta atau disebut juga dengan Solo atau Sala merupakan kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Kota dengan luas 44,04 km² ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan dilewati oleh Sungai Bengawan Solo yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong terkenal yaitu Bengawan Solo. Sedangkan di sebelah barat Kota Surakarta dibatasi oleh Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Kota Surakarta mempunyai garis lintang 7°36'00"-7°56'00" Lintang Selatan dan garis bujur 110°45'15"-110°45'35" Bujur Timur. Keadaan alam kota yang mendapat sebutan sebagai Kota Budaya tersebut mempunyai wilayah yang sebagian besar terdiri dari pegunungan yang berbatu gamping. Suhu udara maksimum Kota Surakarta adalah 32,5° C, sedangkan suhu udara minimumnya adalah 21,9° C. Selain itu, Kota Surakarta juga mempunyai rata-rata tekanan udara yaitu 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 75%. Kecepatan anginnya mencapai 4 Knot dengan arah angin 240°. Kota Surakarta beriklim tropis, sedang musim penghujan dan kemarau bergantian sepanjang 6 bulan tiap tahunnya.

Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya seperti Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten maupun Boyolali secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta. Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta tersebut adalah sebagai berikut

commit to user

- a. Kecamatan Pasar Kliwon mempunyai 9 kelurahan
- b. Kecamatan Jebres mempunyai 11 kelurahan
- c. Kecamatan Banjarsari mempunyai 13 kelurahan
- d. Kecamatan Lawiyen (disebut juga Laweyan) mempunyai 11 kelurahan.
- e. Kecamatan Serengan mempunyai 7 kelurahan

Kecamatan Jebres sebagai bagian dari Kota Surakarta terletak di bagian utara yang terbagi atas 11 kelurahan yaitu Kelurahan Sudiroprajan, Gandekan, Sewu, Jagalan, Pucang Sawit, Jebres, Mojosongo, Tegalarjo, Purwadiningratan, Kepatihan Wetan dan Kepatihan Kulon. Wilayah kecamatan Jebres berbukit-bukit dan hampir semua pemukiman di Kota Surakarta terletak di kecamatan tersebut. Kelurahan Jebres merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Jebres mempunyai luas wilayah 317 Ha dan terdiri dari 36 RW serta 128 RT. Batas wilayah kelurahan dibagian utara dibatasi oleh Kelurahan Mojosongo dan Kabupaten Karanganyar. Wilayah bagian selatan kelurahan Jebres dibatasi oleh Kelurahan Purwodiningratan, Jagalan dan Pucang Sawit. Sedangkan untuk wilayah bagian timur dibatasi oleh Kabupaten Karanganyar dan bagian barat dibatasi oleh Kelurahan Tegalarjo.

b. Keadaan penduduk

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Jebres menurut jenis kelamin, pertumbuhan penduduk dan usia berdasarkan data monografi bulan Februari tahun 2011 tercatat ada 31.175 jiwa, dengan jumlah 8.867 kepala keluarga. Dari keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Jebres yaitu 31.175 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 15.449 jiwa dan penduduk perempuan 15.726 jiwa. Sehingga jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

Laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Jebres tercatat pada tingkat kelahiran sebanyak 33 jiwa dan tingkat kematian sebanyak 21 jiwa.

Untuk laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Jebres pada tingkat migrasi (keluar atau masuk) sejumlah 59 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi ditempati oleh kelompok umur 30-39 tahun baik laki-laki maupun perempuan memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 2.329 jiwa (laki-laki) dan 2.897 jiwa (perempuan). Sedangkan untuk rentang usia antara 0-4 tahun memiliki jumlah penduduk rendah yaitu 576 jiwa (laki-laki) dan 566 jiwa (perempuan). Selanjutnya kelompok umur 5-9 tahun sejumlah 2.370 jiwa, kemudian 10-14 tahun sejumlah 2.492 jiwa sedangkan untuk kelompok umur 15-19 tahun sejumlah 2.479 jiwa. Kelompok umur 20-24 tahun ditempati oleh 2.406 jiwa, dilanjutkan kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 2.954 jiwa, kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 5.850 jiwa, kelompok umur 40-49 jiwa sebanyak 4.767 jiwa dan kelompok umur 50-59 sebanyak 3.656 jiwa serta untuk yang terakhir kelompok umur 60 tahun ke atas sebanyak 3.059 jiwa.

2) Mata Pencaharian

Penduduk di Kelurahan Jebres memiliki beragam mata pencaharian dari keseluruhan jumlah penduduknya yaitu sebesar 31.175 jiwa. Mata pencaharian penduduk berdasarkan umur di atas 17 tahun ke atas menurut data monografi bulan Februari tahun 2011 adalah mayoritas penduduk Kelurahan Jebres bekerja sebagai karyawan, baik sebagai karyawan disektor pendidikan, perekonomian, pariwisata, kesehatan maupun jasa dengan jumlah 8.265 jiwa. Sedangkan diurutkan kedua ditempati oleh penduduk khususnya perempuan yang hanya mengurus rumah tangga sebesar 3.170 jiwa. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki yaitu yaitu 2.329 jiwa (laki-laki) dan 2.897 jiwa (perempuan). Lembaga pendidikan yang cukup banyak dan berkualitas menjadikan pelajar atau mahasiswa menduduki urutan ketiga penduduk di Kelurahan Jebres yaitu 2.603 jiwa. Pelajar atau mahasiswa tersebut tidak hanya berasal wilayah Kota Surakarta saja, tetapi juga berasal dari luar kota. Untuk minoritas

mata pencaharian penduduk Kelurahan Jebres adalah bekerja sebagai sebagai anggota TNI sebesar 60 jiwa dan POLRI sebesar 40 jiwa. Selanjutnya penduduk yang bekerja sbagai wiraswasta sebanyak 2.026 jiwa dan penduduk yang belum atau tidak bekerja sebanyak 2.006 jiwa. Penduduk yang bekerja sebagai buruh juga sebanyak 1.705 jiwa yang kemudian disusul oleh penduduk yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 589 jiwa dan yang telah pensiunan atau purnawirawan sebanyak 586. Terakhir penduduk yang bekerja sebagai guru atau dosen sebanyak 265 jiwa dan mata pencaharian lain-lain sebanyak 1.828 jiwa.

3) Tingkat Pendidikan

Menurut data monografi tahun 2011, tingkat pendidikan Kelurahan Jebres dikatakan baik apalagi didukung dengan sarana pendidikan yang memadai. Sarana pendidikan formal yang memadai dapat dilihat dari jumlah 12 sekolah SD, 5 sekolah SMP, 4 sekolah SMA serta terdapat perguruan tinggi seperti UNS Surakarta, ISI Surakarta, STIKES, Solo Techno Park serta lembaga pendidikan dan keterampilan. Sarana pendidikan yang memadai mendorong masyarakat khususnya Kelurahan Jebres mampu mengakses dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Jebres sudah mencapai tingkat yang baik. Selain didukung oleh sarana pendidikan yang mendukung, kemajuan pendidikan di Kelurahan Jebres juga dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang sudah mengenyam pendidikan di atas sekolah menengah lanjutan bahkan menempuh pendidikan yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Jumlah penduduk yang telah lulus strata 3 ada 10 jiwa sedangkan untuk strata 2 berjumlah 157 jumlah. Jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan hingga strata 2 dan strata 3 lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang telah menempuh pendidikan Diploma IV atau S1 yaitu 1.878 jiwa dan penduduk yang telah menempuh pendidikan Diploma III atau SM yaitu 1.138 jiwa. Penduduk yang telah

menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajatnya ada 8.783 jiwa serta penduduk yang telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatnya berjumlah 5.261 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama lebih besar yaitu 14.044 jiwa daripada penduduk yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi yaitu sebesar 3.183 jiwa. Dalam data monografi tahun 2011, jumlah penduduk yang hanya lulus Sekolah Dasar (SD) terlihat cukup banyak yaitu sebesar 5.764 jiwa yang disertai dengan penduduk yang tidak lulus Sekolah Dasar sebesar 2.371 jiwa. Sedangkan untuk penduduk yang belum lulus Sekolah Dasar (SD) ada 1.657 jiwa dan jumlah penduduk yang tidak atau belum sekolah ada 3.014 jiwa. Walaupun tingkat pendidikan Kelurahan Jebres secara umum, tetapi masih sedikit penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi khususnya perguruan tinggi.

4) Keadaan Penduduk Menurut Agama

Dari jumlah penduduk Kelurahan Jebres secara keseluruhan yang berjumlah 31.175 jiwa mempunyai kepercayaan masing-masing. Mayoritas penduduk Kelurahan Jebres memeluk agama Islam dengan jumlah 23.294 jiwa. Ada juga pemeluk agama Kristen yang menduduki urutan kedua yaitu sebesar 5.444 jiwa, sedangkan untuk penduduk pemeluk agama Katholik menduduki urutan keempat yaitu berjumlah 2.341 jiwa. Selain itu, terdapat juga pemeluk agama Hindu yang berjumlah 55 jiwa dan pemeluk agama Budha yaitu 32 jiwa. Untuk urutan terakhir yaitu minoritas pemeluk agama Konghucu yaitu berjumlah sebesar orang.

5) Sarana dan Prasarana Kelurahan Jebres

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Jebres menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan kelurahan tersebut. Prasarana dalam hal ini adalah bangunan dalam bentuk fisik. Berikut

sarana dan prasarana Kelurahan Jebres menurut Potensi Kelurahan Jebres Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

a) Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian Kelurahan Jebres sudah dikatakan cukup baik, menurut data potensi Kelurahan Jebres tahun 2010 terdapat 1 pasar yang baru selesai dibangun pada awal tahun 2010 yaitu Pasar Panggung Rejo yang letaknya tepat di belakang Kantor Kecamatan Jebres. Selain itu, terdapat juga Jebres Square yang masih dalam tahap pembangunan dan penyempurnaan. Adanya supermarket juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan kebutuhan para mahasiswa atau pelajar yang berada di Kelurahan Jebres. Banyaknya toko-toko dan rumah makan yang tidak terhitung banyaknya, selain mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kelurahan Jebres pada khususnya juga mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa atau pelajar di Kelurahan Jebres yang umumnya berasal dari luar Kelurahan Jebres. Dengan demikian, keberadaan sarana perekonomian tersebut sangat mendukung perkembangan perekonomian penduduk Kelurahan Jebres untuk mengembangkan usaha dan menjadi pendapatan utama atau hanya sekedar pendapatan tambahan. Bahkan dengan adanya sarana perekonomian yang baik juga dapat mendukung objek wisata yang ada di Kelurahan Jebres dalam memfasilitasi para pengunjung.

b) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kelurahan Jebres juga dapat dikatakan sangatlah baik. Hal ini disebabkan karena tidak hanya ditemukan Sekolah Dasar, SMP atau bahkan SMA, tetapi terdapat juga beberapa perguruan tinggi yang menunjukkan bahwa Kelurahan Jebres tersebut sudah mampu dikatakan kelurahan yang telah maju apalagi dari segi pendidikan. Sarana pendidikan perguruan tinggi yang terdapat di Kelurahan Jebres adalah UNS Surakarta, ISI Surakarta, STIKES AISYIYAH Surakarta, Solo Techno Park dan Lembaga Pendidikan

Keterampilan. Sarana pendidikan SMA/SMK yaitu SMA Muhammadiyah 3, SMK Cokro Aminoto, SMK Warga dan SMA Tri Pusaka. Untuk sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Advent, SMP Negeri 8, SMP Tri Pusaka, SMP Negeri 16 dan SMP Muhammadiyah 7. Sedangkan untuk sarana pendidikan Sekolah Dasar adalah SD Advent, SD Negeri Petoran, SD Negeri Tugu, SD Negeri Tegal Kuniran, SD Negeri Sanggrahan, SD Muhammadiyah, SD Negeri Gulon, SD Negeri Ngoresan, SD Negeri Bulu Kantil, SD Negeri Kandang Sapi, SD Negeri Purwoprajan 1 dan SD Negeri Purwoprajan 2. Dengan demikian dari segi sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Jebres dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh ketersedianya sarana pendidikan di suatu tempat.

c) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan Kelurahan Jebres juga mempunyai fasilitas yang begitu memadai. Hal ini dapat dilihat dari sarana yang dimiliki begitu lengkap tidak hanya Dokter, Bidan atau Mantri-mantri kesehatan yang dapat ditemukan. Selain itu, di Kelurahan Jebres juga terdapat rumah sakit terbesar di Kota Surakarta yaitu RSUD Dr Moewardi Surakarta dan juga RSJD Surakarta yang khusus menangani orang-orang sakit jiwa. Selain rumah sakit, di Kelurahan Jebres juga terdapat Puskesmas Ngoresan dan Kandang Sapi, Puskesmas Keliling, Posyandu Balita maupun Lansia. Di Kelurahan Jebres juga mempunyai Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta, balai ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi orang-orang dengan kecacatan tubuh. Sedangkan untuk Palang Merah Indonesia Cabang Surakarta juga berada di Kelurahan Jebres. Kelurahan Jebres juga memiliki Medical Centre STIKES Aisyiyah serta banyak ditemukan apotik dan toko-toko obat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jebres dalam hal kesehatan.

d) Sarana Pariwisata

Sebagai Kota Budaya, Kelurahan Jebres sebagai bagian dari Kota Surakarta juga memiliki objek wisata yang mampu mendatangkan wisatawan asing atau lokal sehingga dapat menambah penghasilan penduduknya. Objek wisata yang ada di Kelurahan Jebres adalah Kolam Renang Tirtomoyo, Bengawan Sport Centre, Bengawan Tennis, Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), Taman Budaya Surakarta (TBS), Motel serta Lapangan Bulutangkis Futsal maupun Sepakbola.

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan oleh semua orang sebagai bagian dari suatu negara. Secara teknis, jika seseorang bertanggung jawab terhadap diri sendiri berarti suatu upaya untuk memberikan satu kondisi terbaik. Kondisi terbaik untuk diri sendiri berarti kemampuan yang memungkinkan seseorang menghadapi setiap masalah dengan cara dan hasil yang sebaik-baiknya. Hal inilah yang kemudian menjadi citra khusus yang harus dimiliki oleh setiap orang sehingga eksistensinya dalam hidup diakui oleh masyarakat luas. Kenyataan di masyarakat bahwa individu-individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi sering menjadi sosok istimewa dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan bekal kemampuan yang diperoleh dari proses pendidikan maka orang-orang tersebut akan menjadi sumber inspirasi dan pengembangan kualitas kehidupan masyarakat. Sehingga dunia pendidikan yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan.

Dunia pendidikan Indonesia di era globalisasi dianggap belum dapat mencapai titik keberhasilan yang diharapkan bersama. Permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia begitu banyak dan rumit sehingga solusi yang dilakukan untuk keluar dari permasalahan tersebut tidaklah mudah. Setiap tahun, wajah pendidikan Indonesia masih dikecewakan oleh hasil Ujian Nasional (UN) yang semakin *commit to user* menurun bahkan banyak sekolah-sekolah di

Indonesia yang anak didiknya tidak lulus hingga 100 %. Kegagalan yang terjadi pada program yang telah disusun dan direncanakan merupakan tanda bahwa proses pembelajaran yang dilakukan selama setahun tidak mengalami perubahan. Hal inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh *civitas academia*. Semua pegiat pendidikan harus bahu membahu menyelesaikan setiap permasalahan tersebut. Dengan demikian, kekurangan dan kegagalan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat terselesaikan secara sinergis oleh semua elemen pendidikan di Indonesia.

Permasalahan selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu menyangkut masalah biaya pendidikan di era globalisasi saat ini yang semakin mahal. Setiap jenjang pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan untuk tingkat Taman Kanak-kanak biaya pendidikan yang harus dikeluarkan hampir mendekati atau bahkan jauh lebih mahal daripada sekolah lanjutan sehingga menyaingi biaya pendidikan untuk perguruan tinggi. Banyak pungutan-pungutan yang ditarik oleh sekolah sehingga biaya yang dikeluarkan oleh orang tua peserta didik semakin banyak dan mahal setiap tahunnya. Setiap tahun orang tua selalu berusaha agar anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikannya hingga tingkatan yang tertinggi agar menjadi manusia yang bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.

Deskripsi hasil dan analisis data penelitian yang dilakukan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta ditujukan terhadap anggota masyarakat yang mempunyai anak sekolah baik di jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas bahkan Perguruan Tinggi serta terhadap tokoh masyarakat terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan data yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian yaitu mengenai komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi, dampak komersialisasi pendidikan bagi masyarakat serta upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi saat ini. Adapun nama subjek dari penelitian di bawah ini merupakan samaran dari nama yang sebenarnya.

1. Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi

Pendidikan nasional Indonesia pada hakikatnya mempunyai fungsi mengembangkan potensi dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga menciptakan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, bertanggungjawab serta menjadi warga negara yang demokratis. Namun, fungsi dan tujuan luhur dunia pendidikan Indonesia di era globalisasi saat ini telah dikacaukan oleh prioritas pelayanan persaingan global yang semakin marak daripada memeliharanya. Bahkan praktik lembaga pendidikan formal yang seharusnya menjadi wahana transformasi dan konservasi nilai-nilai budaya telah disandera oleh kepentingan industri kaum pemodal.

Pendidikan merupakan kebutuhan paling utama dalam kehidupan manusia sehingga proses pendidikan dan kegiatan pembelajaran harus terencana dan dalam penyusunannya tidak dapat terlepas dari faktor pembiayaan. Hal ini disebabkan karena di dalam pelaksanaannya ada banyak hal yang harus dilakukan, disiapkan dan selanjutnya diadakan agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan lancar. Berbagai hal harus disiapkan dan disediakan oleh semua pihak, khususnya dalam hal sarana prasarana pendidikan serta pembelajaran sehingga dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan dana tersebut maka kebutuhan sarana prasarana serta operasional pendidikan dapat disediakan oleh sekolah.

Biaya pendidikan di era globalisasi saat ini tidaklah murah, apalagi jika dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia yang masih tergolong dalam tingkatan menengah ke bawah. Tingginya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan di sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas bahkan taman kanak-kanak. Berikut penuturan Ibu Budi yang menyekolahkan satu dari dua buah hatinya di Taman Kanak-kanak :

commit to user

“...Mahal pisan Neng sekolah sekarang, tiap bulan aja SPP harus bayar Rp 50.000,00, kadang sekolah Sinta juga mengadakan rekreasi kalo gak berarti yo kegiatan di luar sekolah. Jadi ya tiap bulan gak hanya ngeluarke uang SPP, tapi ngeluarke dana juga untuk kegiatan kuwi, kadang bayar Rp 40.000,00 atau Rp 100.000,00 kadang ke taman pintar, kebun binatang kalau gak cuma out bond”. (W /Bu Budi/09/05/2011).

Berbeda dengan apa yang dialami oleh Ibu Ratih, anaknya yang juga masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak, biaya yang harus dikeluarkan lebih sedikit daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh Ibu Budi. Namun, keadaan tersebut bukan berarti beliau tidak mengeluh dengan pendidikan yang semakin mahal saat ini.

“Sekolah saiki yo emang mahal banget Mbak, padahal ijek sekolah TK, yen diitung suwe-suwe kayak biyai wong kuliah. Sekolah saiki yo kadang kakeen iuran, iuran ngge pentas seni, peringatan-peringatan hari besar nasional atau keagamaan....”. (Sekolah sekarang ya memang mahal banget Mbak, padahal masih sekolah TK, kalo diitung lama-lama seperti membiayai anak kuliah. Sekolah sekarang terkadang terlalu banyak iuran-iuran, iuran untuk pentas seni, peringatan-peringatan hari besar nasional atau keagamaan....). (W/ Ibu Ratih/20/04/2011).

Selain keluhan yang dialami oleh Ibu Budi dan Ibu Ratih, Ibu Surti yang sedang menyekolahkan anaknya di Taman Kanak-kanak juga mengalami hal yang serupa apalagi ketiga anaknya sedang menempuh pendidikan diakhir tahun ajaran. Berikut penuturan langsung dari Ibu Surti :

“...Yen keberatan yo mesti tapi emang jaman saiki pendidikan mahal gak kaget lagi jadi sudah biasa kalo pusing”. (W/ Ibu Surti/20/04/2011).

Dari pernyataan 3 (tiga) Informan di atas yaitu Ibu Budi, Ibu Ratih dan Ibu Surti yang sama-sama menyekolahkan anaknya di Taman Kanak-kanak menunjukkan bahwa biaya pendidikan di era globalisasi saat ini bisa dikatakan tidak mengenal jenjang pendidikan. Walaupun masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak, tetapi biaya yang harus dikeluarkan cukup menguras kantong para orang tua peserta didik, ditambah dengan pungutan-pungutan lain diluar pungutan wajib dari sekolah. Dengan perekonomian

keluarga yang cukup serta jumlah tanggungan keluarga yang masih sedikit, bukan berarti orang tua tidak mengeluh dengan biaya pendidikan saat ini. Apalagi bagi orang tua yang penghasilannya pas-pasan serta jumlah tanggungan keluarga yang banyak. Selain orang tua peserta didik, Ibu Dewi yang merupakan salah satu pengajar Taman Kanak-kanak di Kelurahan Jebres juga merasa iba dengan orang tua yang kurang mampu karena pengeluaran biaya pendidikan di Taman Kanak-kanak jumlahnya hanya selisih sedikit dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

“Sekolah tempat mengajar saya memang lumayan mahal Mbak...Menjelang kelulusan, sekolah juga mengadakan acara perpisahan jadi orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan dan kenang-kenangan untuk sekolah”. (W/ Ibu Dewi/14/05/2011).

Pernyataan Ibu Dewi tentang biaya pendidikan sekarang juga didukung oleh Pak Bondan sebagai seorang pendidik, yang merasa iba dengan orang tua peserta didik dalam membiayai pendidikan saat ini, berikut pengungkapannya :

”Kasian, iba dengan orang tua murid yang pekerjaan dan penghasilannya gak tetap kayak saya Mbak, apalagi di tempat saya mengajar, study tour yang notabene ditujukan untuk tujuan edukasi ternyata hanya embel-embel semata. Nyatanya malah banyak menguntungkan pihak sekolah terutama para guru”. (W/ Pak Bondan/11/05/2011).

Berdasarkan penuturan yang berasal dari pihak pendidik yaitu Ibu Dewi yang merupakan pendidik salah satu Taman Kanak-kanak di Kelurahan Jebres juga merasakan mahalnya biaya pendidikan yang dialami oleh orang tua peserta didiknya. Sedangkan dijenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Pak Bondan sebagai pengajar di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kota Surakarta juga merasakan mahalnya pendidikan di era globalisasi seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi. Pungutan-pungutan lain diluar pungutan wajib ternyata menjadi salah satu hal yang memberatkan orang tua peserta didik, sebagai contoh adanya piknik yang diadakan hampir rutin setiap bulan serta *study tour* yang diadakan untuk tujuan *edukasi* ternyata kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

Adanya program pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban orang tua peserta didik terutama dijenjang pendidikan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama pada kenyataannya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) untuk anak sekolah di Kota Surakarta juga kurang meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Hal ini disebabkan karena bantuan pendidikan tersebut tidak diperuntukan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (*playgroup*) hingga Perguruan Tinggi sehingga hanya orang-orang tertentu orang yang mampu mengenyam pendidikan layak hingga jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Berikut pengakuan langsung Pak Bagyo dan Ibu Pur yang sama-sama sedang menyekolahkan buah hatinya menyikapi hal tersebut :

“Dana BOS seko pemerintah pusat karo BPMKS pemerintah Kota Surakarta ngge bantu orang tua murid ternyata kurang membantu....”. (Dana BOS dari pemerintah pusat dan BPMKS Kota Surakarta yang mempunyai tujuan membantu orang tua ternyata kurang membantu...)(W /Pak Bagyo/2/04/2011).

Dengan demikian, bantuan yang dicanangkan pemerintah sebenarnya kurang begitu membantu orang tua dalam membiayai sekolah anaknya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pungutan-pungutan diluar pungutan wajib seperti buku-buku pelajaran, *study tour* maupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Sedangkan untuk kegiatan *study tour* anak kedua Pak Bagyo yang diadakan saat menjelang kenaikan XII tersebut dipertegas oleh beliau bahwa :

“Bahkan pas sekolah nganakne study tour nyang Bali mending gak usah melu wae, wong yo duite ora gur sithik Mbak”. (Bahkan ketika sekolah mengadakan *study tour* ke Bali lebih baik tidak ikut serta, sebab uang yang dikeluarkan tidaklah sedikit). (W/ Pak Bagyo/02/04/2011).

Berdasarkan penuturan Pak Bagyo di atas yang menyatakan bahwa kegiatan *study tour* yang memerlukan biaya tidak sedikit menjadikan beban tersendiri baginya, sehingga anaknya tidak mengikuti kegiatan tersebut. Pendapat Pak Bagyo tentang *commit to user* bantuan pemerintah yang kurang membantu

biaya pendidikan saat ini serta pungutan diluar pungutan wajib yang menjadi beban juga dialami oleh orang tua yang sedang membiayai pendidikan anaknya. Menurut Ibu Pur adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang merupakan kebijakan pemerintah juga hanya sedikit membantu beban orang tua peserta didik, berikut penuturan beliau tentang hal tersebut :

“Lha kepiye maneh Mbak, enek BOS karo BPMKS yo tetep bayar sekolah kenyataane sekolah anakku yo ditarik SPP...Jare sekolah gratis tapi yo gak enek kenyataane, malah sekolah jaman saiki akeh biaya thethek bengek...” (Lha mau gimana lagi Mbak, ada BOS dan BPMKS ya tetep saja membayar sekolah, kenyataane sekolah anakku ya ditarik SPP... Katanya sekolah gratis, tetapi ya tidak ada kenyataannya, malah sekolah jaman sekarang banyak biaya ini itu...). (W/ Ibu Pur/02/04/2011).

Pernyataan Pak Bagyo dan Ibu Pur di atas membuktikan bahwa sekolah gratis melalui bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya kurang begitu membantu beban orang tua karena pada kenyataannya masih banyak iuran atau pungutan lain yang harus dibayar. Program bantuan dari pemerintah tersebut pada kenyataannya bukan menjadi kebebasan orang tua untuk tidak mengeluarkan biaya pendidikan anaknya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pungutan-pungutan yang ada, seperti buku pelajaran yang harus dibeli, biaya ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah bahkan *study tour* yang terkadang hanya menghabiskan biaya tanpa tujuan yang jelas.

Pendidikan mahal tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak sebagai jenjang pendidikan rendah bahkan di Sekolah Dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) setelah Sekolah Menengah Pertama. Keluhan tentang biaya pendidikan mahal juga dialami oleh orang tua peserta didik yang menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan Sekolah Dasar seperti halnya Ibu Wati yang sedang menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar. Menurut Ibu muda yang sedang mengandung anaknya yang kedua mengatakan bahwa:

commit to user

“Pendidikan saiki yo ngene Mbak, yen diitung-itung emang mahal. Kabeh dibayar ngge duwit, sithik-sithik ngeluarin duwit. Akeh iuran terus pungutan-pungutan gak terduga, uang ngge rekreasilah, renang, les pelajaran tambahan nek gak yo gerak jalan atau out bond”. (Pendidikan sekarang ya begini Mbak, kalau diitung-hitung memang mahal. Semua dibayar dengan uang, sedikit-sedikit mengeluarkan uang. Banyak iuran atau pungutan-pungutan yang tidak terduga, uang untuk rekreasilah, renang, les pelajaran tambahan atau jika tidak berarti gerak jalan atau *out bond*). (W/ Ibu Wati/02/04/2011).

Menurut Ibu Wati pendidikan sekarang begitu mahal, semua dihitung dengan materi akibatnya banyak iuran atau pungutan diluar iuran wajib, seperti halnya iuran rekreasi, renang, biaya tambahan pelajaran bahkan *out bond* sekalipun. Pendidikan yang mahal dirasakan oleh Ibu Wati sejak anaknya duduk dibangku sekolah Taman Kanak-kanak, hal ini dipertegas dengan ungkapan langsung beliau sebagai berikut :

“Pendidikan mahal ki yo tak rasakne pas anak saya masih TK.... Yen biaya pendidikan anak saya saiki neng SD Ngoresan per bulan gratis, tapi pas masuk bayar uang gedung....”. (Pendidikan mahal sudah dirasakan sejak anak saya masih TK...Kalau biaya pendidikan anak saya sekarang duduk di SD Ngoresan per bulan gratis, tapi pas masuk bayar uang bangunan....). (W/ Ibu Wati/02/04/2011).

Selain pendidikan mahal karena banyaknya pungutan di luar pungutan wajib, menurut penuturan Ibu Wati pendidikan mahal juga dialami sejak anaknya duduk di Taman Kanak-kanak hingga sekarang kelas 4 Sekolah Dasar. Selain itu, program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang ditujukan untuk Sekolah Menengah Pertama kenyataannya kurang membantu beban orang tua peserta didik yang memiliki anak Sekolah Dasar. Sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di bangku Sekolah Menengah Pertama, Ibu Budi dan Pak Bagyo juga mengalami hal yang sama yaitu mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini. Walaupun mendapat keringanan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), Ibu Budi yang

menyekolahkan anaknya di Sekolah Menengah Pertama salah satu sekolah favorit di Kota Surakarta kelas VIII juga mengalami kesulitan mengenai biaya pendidikan untuk anaknya tersebut. Hal ini dituturkan langsung bahwa :

“Pas masuk sekolah habisnya kira-kira sampai Rp 1.500.000,00 Neng, ngge bayar seragam, daftar ulang terus uang gedung.... Ngelu maneh pas mule jalani kelas VIII Neng, bukannya pengeluaranturun, tapi dana tambah banyak...” (W/ Ibu Budi/09/05/2011).

Berdasarkan penuturan Ibu Budi di atas bahwa bantuan pemerintah tidak menyeluruh membantu beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Sebab biaya pendidikan masih tetap mahal bahkan semakin banyak pungutan diluar pungutan wajib dengan label kegiatan yang berasal dari sekolah. Keluhan tentang pendidikan mahal yang dialami oleh Ibu Budi, juga dirasakan oleh Pak Bagyo sebagai orangtua yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Menengah Pertama. Berikut penuturan langsung beliau tentang biaya pendidikan anaknya yang ketiga :

“Yo ginilah Mbak yen nyekolahke anak akeh, akeh ngeluh juga opo maneh yen awal tahun ajaran...”. (Ya beginilah Mbak kalo menyekolahkan banyak anak, banyak mengeluhnya apalagi kalau awal ajaran baru...). (W/ Pak Bagyo/02/04/2011).

Pak Bagyo mengungkapkan bahwa menyekolahkan bukanlah hal mudah apalagi jika menyekolahkan banyak anak, dengan biaya yang mahal dan pungutan yang beranekaragam tidak menutup kemungkinan beliau untuk tidak mengeluh. Hal ini semakin terasa saat tahun ajaran baru dengan iuran-iuran yang dikeluarkan oleh sekolah kepada orang tua peserta didik. Selain itu, Pak Bondan yang memiliki tanggungan menyekolahkan satu anaknya dengan penghasilan yang tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan berarti beliau juga tidak mengeluh tentang mahalnya pendidikan di era globalisasi. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh Pak Bondan yang sedang menyekolahkan anaknya di Kota Metropolitan.

”...Gak cuma kebutuhan hidup yang mahal, biaya pendidikannya juga begitu melambung jauh daripada di Surakarta. Kalo dipikir memang bikin pusing, tapi apa boleh buat sudah jadi tanggung

jawab orang tua Mbak, apapun dilakukan biar anak tetep sekolah”.
(W/ Pak Bondan/11/05/2011).

Dari penuturan Pak Bondan bahwa sebagai orangtua yang berpendidikan dan mempunyai penghasilan tetap, beliau juga mengeluh dengan biaya pendidikan sekarang yang mahal apalagi tempat anaknya mengenyam pendidikan di Kota Metropolitan yang berbeda jauh dengan biaya pendidikan khususnya di Kota Surakarta. Walaupun hidup dengan saudara sendiri yaitu adik dari istrinya, tetapi beliau tetap memenuhi tanggungjawab sebagai orangtua yang mempunyai anak sekolah yaitu memenuhi kebutuhan setiap bulan, baik untuk biaya pendidikan maupun biaya kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga didukung oleh pernyataan beliau dibawah ini :

”Kaget banget Mbak, masa uang masuk mencapai Rp 4.000.000,00 untuk uang gedung, sumbangan pengembangan pendidikan, seragam dan kegiatan orientasi sekolah. Pokoknya beban banget Mbak pas kuwi opo maneh keadaan anak saja jauh...”. (W/ Pak Bondan/11/05/2011).

Biaya pendidikan yang melambung tinggi apalagi di Kota Metropolitan seperti Jakarta, pendidikan yang mahal menjadi beban tersendiri bagi Pak Bondan. Tidak hanya dana yang dikeluarkan saat masuk pertama kali, tetapi dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan buku pelajaran juga tergolong mahal. Kegiatan ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh anak Pak Bagyo ternyata juga menjadi tambahan pengeluaran apalagi jika kegiatan dilakukan di luar sekolah.

Selain itu, sebagai orangtua yang anaknya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, Ibu Surti juga mengeluh tentang pungutan sekolah apalagi untuk Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajatnya yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ditambah dengan penghasilan beliau yang terkadang kurang mencukupi kebutuhan ketiga anaknya yang sedang mengenyam pendidikan.

“....Jelang Ujian Nasional, akeh iuran maneh ngge tuku nek gak fotokopi buku, kadang Rp. 15.000,00 sampe Rp 30.000,00....” (.... Menjelang Ujian Nasional, pengeluaran untuk membeli atau

fotokopi buku pelajaran juga harus dipenuhi, biasanya antara Rp 15.000,00 hingga Rp 30.000,00....). (W /Ibu Surti20/04/2011).

Di jenjang pendidikan yang lebih tinggi keluhan tentang mahalnya pendidikan juga dirasakan oleh Pak Wagiyono. Sebagai orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya dijenjang Perguruan Tinggi, beliau menuturkan bahwa :

“Pusing juga Mbak yen bayare kuwi langsung semono gedhene, pas mlebu kuliah wae Rp 7.997.500,00....)”. (Pusing juga Mbak kalau bayarnya itu langsung sebesar itu, waktu masuk kuliah saja Rp 7.997.500,00....) (W/ Pak Wagiyono/22/04/2011).

Dengan demikian, walaupun dalam UU Sisdiknas (pasal 49) telah diberlakukan peraturan yang merekomendasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mengalokasikan dana minimal 20 persen dari APBN dan APBD di luar gaji pendidikan, tetapi pada kenyataannya pendidikan masih belum bersahabat terutama untuk masyarakat kecil. Hal ini disebabkan karena biaya pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama hanya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)-nya yang gratis.

Berdasarkan penuturan Informan di atas yaitu Pak Bagyo, Ibu Budi, Ibu Ratih, Ibu Wati, Ibu Surti, Ibu Dewi dan Pak Wagiyono dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pendidikan mahal juga disebabkan karena banyaknya pungutan-pungutan lain seperti piknik atau *study tour* yang disertai label sebagai kegiatan rutin sekolah, praktek-praktek, kegiatan-kegiatan sekolah dalam rangka memperingati hari keagamaan maupun hari besar nasional serta buku-buku pelajaran bahkan LKS yang ternyata masih begitu memberatkan orang tua peserta didik untuk memenuhinya.

Pendidikan yang berkualitas memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga semua orang yang ingin menikmati pendidikan tinggi juga harus mengeluarkan dan membayar dengan biaya yang mahal. Walaupun Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010, tetapi pengkajian penerapan konsep *commit to user* Undang-undang tersebut dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan masih

menjadi momok dan teror bagi orang tua yang akan meneruskan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti Perguruan Tinggi.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Pur bahwa :

“...Paling ribet maneh yen wes enek pungutan ngge praktek-praktek, pihak kampus mesti narik dewe Mbak, opo maneh yen prakteke gak di dalam kampus”. (W/ Ibu Pur/02/04/2011).
(...Paling ribet lagi kalau sudah ada pungutan untuk praktek-praktek, pihak kampus mesti memungut sendiri Mbak, apalagi kalau prakteknya tidak di dalam kampus) (W/ Ibu Pur/02/04/2011).

Mahalnya biaya pendidikan yang dialami oleh Ibu Pur ternyata juga dialami oleh Pak Wagiyono yang menyekolahkan anaknya di bangku kuliah salah satu Perguruan Tinggi favorit di Kota Surakarta selama hampir 2 semester. Berikut pengungkapan langsung dari Pak Wagiyono tentang pengeluaran anaknya saat memasuki bangku perkuliahan :

“...bayar awal kuliah sekitar Rp 7.997.500,00, sak kelinganku ngge bayar BPL, SPP, laborat terus biaya macem-macem lainne. Yen bayaran per semester, bayare yo lumayan akeh Mbak wonk nyampe Rp 2.614.500,00”. (...bayar awal kuliah sekitar Rp 7.997.500,00 dengan rincian untuk membayar BPL, SPP dan biaya lainnya. Untuk masalah biaya per semester, biayanya lumayan banyak Mbak sampai Rp 2.614.500,00) (W/ Pak Wagiyono/22/04/2011).

Berdasarkan penuturan Ibu Pur dan Pak Wagiyono yang sedang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, biaya pendidikan mahal dan melambung tinggi begitu dirasakan apalagi saat awal masuk kuliah. Dengan demikian, dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Informan yaitu Pak Bagyo, Ibu Budi, Ibu Ratih, Ibu Surti, Ibu Dewi, Ibu Wati, Pak Wagiyono dan Ibu Pur, banyaknya pungutan-pungutan di lembaga pendidikan saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya komersialisasi pendidikan di Indonesia semakin marak terjadi. Dari beberapa Informan tersebut, mahalnya pendidikan tidak hanya dirasakan oleh orang tua yang menyekolahkan anaknya di jenjang Perguruan Tinggi, tetapi di jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak biaya pendidikan juga tidak kalah mahal. Sedangkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, walaupun mendapat bantuan keringanan dari pemerintah, tetapi biaya pendidikan tetap

mahal begitu juga biaya pendidikan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Hal ini disebabkan karena banyaknya pungutan-pungutan selain pungutan wajib seperti Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan maupun uang bangunan. Pungutan-pungutan tersebut beraneka ragam mulai dari pungutan buku-buku pelajaran yang dijual oleh pihak pendidik, seragam sekolah pada awal masuk sekolah, iuran untuk kegiatan-kegiatan sekolah (pentas seni, peringatan hari besar nasional maupun keagamaan), praktek-praktek di dalam maupun di lapangan (di luar sekolah atau kampus) bahkan pungutan untuk kegiatan *study tour* atau piknik yang berlabelkan untuk tujuan edukasi.

2. Dampak adanya Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi Bagi Masyarakat

Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melakukan perombakan kondisi kehidupan manusia di masa depan. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban masing-masing termasuk untuk dapat menikmati pendidikan. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Berdasarkan isi pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang sudah dijamin oleh hukum secara pasti dan bersifat mengikat. Artinya tidak ada pihak yang menghalangi seseorang untuk belajar dan mendapatkan pengajaran karena negara melindungi dan memberi fasilitas perkembangan individu sepenuhnya sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Dalam realita pendidikan Indonesia, pengaruh globalisasi membangun peran ambivalen terhadap hakikat autentik pendidikan. Namun, orientasi pendidikan di era globalisasi saat ini dikacaukan oleh prioritas melayani persaingan global daripada memelihara harmoni lokal. Globalisasi dinilai telah berhasil mengubah arah pendidikan menuju visi kapitalisme. Pendidikan berorientasi pasar, berlogika kuantitas hingga upaya privatisasi pendidikan merupakan beberapa contoh dari gejala ketertundukan hakikat

pendidikan terhadap hasrat kapitalisme global. Akibatnya pendidikan yang bermutu di era globalisasi saat ini juga tidak jauh berbeda dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai sekolah anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rudi sebagai pendidik yang sudah hampir 30 tahun berkecimpung di dunia pendidikan :

“Pendidikan sekarang tak tidak ubahnya pasar atau supermarket yang menyediakan berbagai barang yang diperlukan oleh pelanggan, sedangkan guru atau dosen merupakan kasir yang selalu melayani pelanggan yang tidak lain adalah para murid mereka sendiri...”. (W/ Pak Rudi/16/05/2011).

Dari penuturan Pak Rudi di atas pendidikan mahal di era globalisasi saat ini sudah menjadi *trend* akibatnya pendidikan diibaratkan sebagai pasar atau supermarket yang menyediakan berbagai barang yang diperlukan oleh pelanggan, sedangkan guru atau dosen merupakan kasir yang selalu melayani pelanggan yaitu para murid mereka sendiri. Biaya pendidikan yang mahal sebenarnya mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas lembaga pendidikan di Indonesia, apalagi di era globalisasi saat ini segala sesuatu banyak dinilai dengan materi. Akibatnya sekolah negeri favorit saat ini hampir tidak berbeda jauh dengan sekolah swasta dalam masalah biaya pendidikan. Lembaga-pendidikan saling bersaing dalam masalah mutu dan fasilitas untuk menarik peminat yang banyak sehingga biaya pendidikannya pun semakin mahal. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Pur tentang keluhan beliau mengenai buku yang digunakan anaknya yang masih Sekolah Dasar :

“Lha kepiye maneh Mbak, sekolah wae nganjurke yen siswane kudu pake buku merknya Paltinum, padahal merk kuwi hargane mahal...”. (Lha mau gimana lagi Mbak, sekolah menganjurkan kalo siswanya harus memakai buku merknya *Platinum*, padahal merk buku itu harganya mahal...). (W/ Ibu Pur/02/04/2011).

Berdasarkan pengakuan Ibu Pur di atas anjuran sekolah untuk memakai buku yang bermerk *Platinum* pada kenyataannya memberatkan orang tua peserta didik. Apalagi dengan harga yang hampir mencapai Rp 200.000,00. Walaupun mahal, tetapi anjuran sekolah untuk memakai buku tersebut menunjukkan bahwa terdapat praktek dagang yang dilakukan oleh

sekolah sehingga sekolah menjadi lahan bisnis bagi para pendidik pada khususnya. Selain itu, hal tersebut juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan agar mampu bersaing dan unggul dengan sekolah lain melalui fasilitas yang digunakan.

Persoalan tentang pendidikan Indonesia semakin terasa apalagi bagi mereka yang kurang mampu sehingga terjadi kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Banyak berbagai jenjang pendidikan formal yang belum disentuh oleh golongan masyarakat. Tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, perbedaan pendidikan di era globalisasi saat ini adalah pendidikan untuk orang kaya, sekolah untuk orang menengah dan sekolah untuk orang miskin. Sehingga gejala diskriminasi sebagai dampak dari mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini yaitu dengan munculnya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Hal ini seperti yang dialami oleh Pak Bagyo saat menyekolahkan anaknya di sekolah yang telah bertaraf Internasional :

“...Alasane yo kuwi Mbak, yen mlebu kelas SBI duite tambah akeh opo maneh yen mlebu juga dipertimbangkan karo kemampuan kepinterane, lha wonk yen pelajaran pake bahasa inggris ko Mbak”. (...Alasane ya itu Mbak, kalo masuk kelas SBI duite tambah akeh apalagi kalo masuk juga mempertimbangkan masalah kemampuan kepintarannya, lha klo pelajaran juga pakai Bahasa Inggris ko Mbak). (W/ Pak Bagyo/02/04/2011).

Dari pengakuan Pak bagyo di atas munculnya sekolah-sekolah berbasis internasional seolah-olah dapat menaikkan mutu pendidikan di Indonesia apalagi dengan mengedepankan kelas dalam menggunakan Bahasa Inggris. Akibatnya hanya peserta didik yang mempunyai kemampuan kecerdasan lebih untuk masuk kelas bertaraf Internasional. Bahkan Sekolah Bertaraf Internasional (BSI) juga mematok biaya masuk sekolah yang sangat tinggi akibatnya mereka yang tidak mampu tidak bisa masuk disekolah tersebut. Dengan demikian, sekolah RSBI menjadikan sekolah di Indonesia yang berkelas-kelas dan terkotak-kotak sesuai dengan kelas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Persoalan mahal nya biaya pendidikan bukan lagi menjadi masalah baru, mulai dari biaya pendaftaran masuk sekolah dijenjang pendidikan Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Permasalahan tersebut merupakan persoalan klasik yang selalu hadir dari tahun ke tahun terutama menjelang tahun ajaran baru dimulai. Namun, persoalan mengenai besarnya biaya pendidikan yang timbul tidak dapat dianggap persoalan yang kecil, karena masalah tersebut menyangkut keadilan dan hak bagi seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama mendapat pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Akibatnya masyarakat yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini seperti yang dialami oleh Pak Bagyo dan Ibu Surti yang tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena alasan pendidikan sekarang yang mahal. Berikut penuturan langsung Pak Bagyo sebagai orang tua yang sedang menyekolahkan 3 anaknya :

“Yo kepiye maneh Mbak, adhike akeh kudu sekolah, ditambah nyekolahke jaman saiki ki gak sithik duite, makane si Lala gak mungkin sekolah maneh apalagi yen kuliah, ndak tambah pusing Mbak”. (Mau gimana lagi Mbak, adiknya banyak, harus sekolah, ditambah menyekolahkan jaman sekarang tidak sedikit biayanya, maka si Lala (anak pertama Pak Bagyo) tidak ada kemungkinan melanjutkan sekolah lagi apalagi kuliah, nanti jadi tambah pusing Mbak). (W/ Pak Bagyo/02/04/2011).

Berdasarkan pernyataan Pak Bagyo di atas bahwa beliau tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena kendala biaya pendidikan sekarang yang semakin mahal apalagi dengan keadaan jumlah tanggungan anaknya yang bersekolah. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Surti sebagai orang tua yang sedang menyekolahkan ketiga anaknya :

“....Pusing pokoke sithik-sithik emang kudu pake duwit. Makane anak kulo nggeh mboten nglanjutke kuliah mergone yo kuwi mboten kiyat biyai...”. (...Pusing pokoknya kalau sedikit-sedikit mengeluarkan uang. Makanya anak saya tidak melanjutkan kuliah karena tidak kuat membiayai....). (W/ Ibu Surti/20/04/2011).

Seperti halnya Pak Bagyo, Ibu Surti yang menyekolahkan ketiga anaknya juga mengalami kendala hampir sama dengan Pak Bagyo. Menurut

Ibu Surti, pendidikan mahal disertai dengan banyaknya pungutan-pungutan yang selalu dihitung dengan uang. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan beliau tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Baginya sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan memberinya keuntungan tersendiri karena anaknya mampu mencari kerja sesuai keterampilan yang diperoleh saat sekolah.

Masalah biaya pendidikan di era globalisasi yang semakin mahal juga berdampak pada terciptanya privatisasi pendidikan sehingga praktek komersialisasi pendidikan di Indonesia tidak dapat ditolak keberadaannya. Apalagi kondisi ini didukung oleh kebijakan pemerintah tentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memberikan hak otonomi kepada lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi Negeri. Akibatnya tanggungjawab negara membantu dan memberi subsidi untuk pendidikan semakin berkurang sehingga banyak lembaga pendidikan menaikkan biaya pendidikan dan menambah pungutan-pungutan di luar pungutan wajib untuk menambah kas (keuntungan). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Rudi bahwa :

“Mungkin jika lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus-kampus tidak menarik biaya yang tinggi maka kualitas pendidikan juga dipertanyakan, bagus atau tidak ??”. (W/ Pak Rudi/16/05/2011).

Menurut penuturan Pak Rudi bahwa pendidikan mahal saat ini memang tidak dapat ditolak keadaannya karena mampu menentukan kualitas pendidikan tersebut. Sehingga jika lembaga pendidikan tidak menarik biaya mahal maka kebutuhan untuk memperoleh fasilitas sekolah yang memadai juga mengalami kendala. Namun, dari pernyataan Pak Rudi di atas, disanggah oleh Pak Bondan yang juga seorang Pendidik, selain mahalnya pendidikan karena fasilitas yang digunakan, mahalnya pendidikan juga dipengaruhi oleh pungutan yang beranekaragam dari sekolah. Pungutan-pungutan diluar pungutan wajib kebanyakan hanya berlabel untuk pemenuhan aktivitas pendidikan. Berikut ungkapan langsung Pak Bondan :

commit to user

"Kasian dan iba dengan orang tua murid yang pekerjaannya gak tetap penghasilan kayak saya Mbak, apalagi di tempat saya mengajar, study tour yang notabene ditujukan untuk tujuan edukasi ternyata hanya embel-embel semata. Nyatanya malah banyak menguntungkan pihak sekolah terutama para guru". (W/ Pak Bondan/11/05/2011).

Menurut penuturan langsung Pak Bondan terbukti bahwa pendidikan mahal yang berasal dari luar pungutan wajib ternyata memberatkan orang tua yang mempunyai penghasilan tidak tetap (kurang mampu). Bahkan kegiatan-kegiatan yang berlabel pendidikan sekalipun ternyata kurang bermanfaat sehingga cenderung memberi keuntungan untuk pihak sekolah.

Pendidikan mahal, baik pungutan wajib maupun tidak wajib merupakan bentuk komersialisasi pendidikan yang semakin marak di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan berkualitas tidak bisa begitu saja mengesampingkan profit (keuntungan). Keuntungan yang diperoleh lembaga pendidikan terutama Perguruan Tinggi tidaklah sedikit, mulai dari awal pendaftaran calon mahasiswa dipungut biaya untuk mengikuti tes, pembayaran masuk perguruan tinggi, pemenuhan buku-buku untuk menunjang proses pendidikan bahkan hingga menjelang akhir sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Wagiyo sebagai orang tua yang sedang membiayai anaknya dibangku perkuliahan :

"Biaya pendidikan jaman sekarang memang berbeda jauh dengan biaya pendidikan anak saya yang pertama sekitar 5 tahun yang lalu. Walaupun anak saya kuliah di FKIP, tetapi untuk masalah biaya juga gak kalah mahalnya dengan fakultas-fakultas lainnya, opo maneh masuk lewat jalur swadana. Yen dipikir-pikir pendidikan saiki terlalu banyak iuran-iuran gak begitu jelas fokusnya". (W/ Pak Wagiyo/22/04/2011).

Berdasarkan penuturan Pak Wagiyo pendidikan mahal di era globalisasi saat ini jauh berbeda dengan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan beliau saat membiayai pendidikan anaknya yang pertama di bangku perkuliahan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah semakin berkurang dalam dunia pendidikan untuk *commit to user* mensubsidi serta membantu

menambah pemasukan kas lembaga pendidikan seperti halnya Perguruan Tinggi. Akibatnya berdampak buruk pada beban bea masuk dan sumbangan pendidikan tinggi yang harus dipikul oleh mahasiswa. Selain nasib yang dialami Pak Wagiyono, Ibu Pur juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan Pak Wagiyono :

“Pas awal masuk kuliah semester 1 kulo nggegek kudu lunasin uang pembayaran masuk hampir Rp 9.000.000,00...Durung ketambahan pengeluaran buku-buku ngge kuliah, kadang yo disiasati mending fotokopi daripada tuku buku asli karena lebih mahal...”. (Waktu awal masuk kuliah semester 1, saya kaget harus melunasi uang pembayaran masuk hampir Rp 9.000.000,00...Belum lagi ditambah pengeluaran buku-buku untuk kuliah, sehingga kadang disiasati fotokopi daripada membeli buku asli karena lebih mahal...). (W/ Ibu Pur/02/04/2011).

Seperti yang dialami oleh Pak Wagiyono dan Ibu Pur dalam menyekolahkan anaknya masuk ke jenjang Perguruan Tinggi walaupun pemerintah masih mensubsidi sekitar 40%, tetapi pada kenyataannya biaya pendidikan masih mahal. Untuk menambah pemasukan perguruan tinggi, maka ada beberapa lembaga pendidikan yang kemudian semakin menambah kuota masuk jalur mandiri daripada reguler. Sebagai contoh anak Pak Wagiyono yang tidak diterima melalui jalur SNMPTN harus masuk bangku perkuliahan melalui jalur swadana dengan biaya pendidikan tinggi agar dapat mengenyam bangku perkuliahan. Selain mahalnya pendidikan karena komersialisasi pendidikan, dampak lain juga terlihat dari para orang tua yang semakin selektif dalam memilih lembaga pendidikan baik sekolah atau perguruan tinggi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wati bahwa :

“....Dadi yen arep nglanjutke sekolah kudu pilih-pilih sekolah seng iuran atau pungutan-pungutan sekolah gak terlalu memberatkan, opo maneh eneng sekolah seng terima uang suap seko orang tua murid....”. (...Jadi kalau mau melanjutkan sekolah harus selektif memilih sekolah sesuai dengan iuran atau pungutan-pungutan sekolah yang tidak terlalu memberatkan apalagi ada sekolah yang menerima uang suap dari orangtua murid....) (W/ Ibu Wati 02/04/2011).

Berdasarkan penuturan Informan di atas bahwa untuk dapat menikmati pendidikan yang dicita-citakan tidak sedikit orang tua yang kemudian melakukan sistem suap atau politik uang (*money politics*) yang semakin sering terjadi dan banyak ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan dana tambahan dari para orang tua peserta didik. Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Ibu Pur bahwa :

"Yo saiki kathah kejadian ngene Mbak, seng cerdas dereng mesti saged sekolah, tapi seng kurang cerdas saged sekolah amargo bayar karo wonk jero, uang suap istilaha. Yen wes ngangge uang suap biasane wong-wong podo bangga yen anake sekolah maneh". (Sekarang banyak kejadian seperti ini Mbak, yang cerdas belum pasti bisa sekolah, tetapi yang kurang cerdas bisa sekolah karena membayar melalui orang dalam, uang suap istilahnya. Kalau sudah menggunakan uang suap biasanya orang-orang jadi bangga kalau anaknya sekolah lagi). (W/ Ibu Pur/02/04/2011).

Menurut penuturan dua Informan tersebut bahwa pendidikan mahal berdampak pada semakin maraknya politik uang (*money politic*). Hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi mampu menutup peluang masyarakat kurang mampu untuk menikmati pendidikan tinggi. Namun, dalam jangka waktu yang panjang, dampak buruk dapat terjadi pada kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia kelak dikemudian hari dalam menyongsong masa depan. Bahkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas hanya akan ditemukan di kelompok atau kelas masyarakat yang latar belakangnya memang memungkinkan secara materiil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pak Rudi, Pak Bagyo, Pak Bondan, Ibu Pur, Ibu Surti, Ibu Wati dan pak Wagiyono maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari adanya komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi adalah pendidikan yang semakin mahal tidak hanya dirasakan untuk membayar pungutan-pungutan wajib, tetapi pungutan di luar pungutan wajib juga semakin banyak ditemukan bahkan jumlahnya lebih tinggi. Semakin mahalnya pendidikan berdampak buruk pada sekolah-sekolah yang kemudian berlomba dalam memenuhi fasilitas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan untuk masuk ke sekolah favorit tidak

jarang orang tua peserta didik yang menggunakan cara dengan memberi sejumlah dana untuk pihak sekolah (*money politic*) sehingga terjadi diskriminasi bagi mereka yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya lembaga-lembaga pendidikan di era globalisasi saat ini tidak ubahnya seperti lading bisnis untuk memperoleh keuntungan dari pungutan-pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah.

3. Upaya Masyarakat dalam Menghadapi Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi.

Pendidikan merupakan rangkaian proses pemberdayaan potensi dan kompetensi individu untuk menjadi manusia berkualitas yang berlangsung sepanjang hayat. Sehingga pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia tidak akan pernah ada hentinya untuk dikaji karena menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat Bangsa Indonesia. Tekad untuk mencerdaskan bangsa juga tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tetapi upaya tersebut masih dipertanyakan keberhasilannya. Pendidikan adalah hak semua orang, bahkan para politikus oportunistis memandang pendidikan sebagai jalan menuju kekuasaan. Hal itulah yang kemudian mendorong seseorang untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, dalam sisi lain tidak ada habisnya membahas tentang permasalahan dunia pendidikan terutama di Indonesia.

Salah satu masalah tersebut adalah mahalny biaya pendidikan yang membuat kesenjangan sosial menjadi bagian dari potret permasalahan wajah dunia pendidikan di Indonesia. Persoalan mahalny biaya pendidikan tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan yang tinggi, seperti halnya Perguruan Tinggi, tetapi mahalny biaya pendidikan juga terjadi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas maupun pertama, Sekolah Dasar bahkan Taman Kanak-kanak. Selain harus menyediakan sejumlah dana sebagai uang titipan atau uang pangkal yang ditambah dengan uang sumbangan sukarela, orang tua peserta didik juga harus memindahkan sebagian penghasilan keluarga untuk membeli buku pelajaran dan seragam sekolah yang baru.

Sebagai orang tua, pendidikan merupakan hal yang mempunyai peranan penting terhadap masa depan anaknya. Sehingga demi mendapatkan pendidikan yang terbaik, maka menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan tinggi merupakan salah satu cara agar anak mampu mandiri secara finansial kelak dikemudian hari. Namun, mahalny biaya pendidikan di era globalisasi saat ini serta semakin naiknya biaya pendidikan dari tahun ke tahun seringkali membuat orang tua tidak mampu menyediakan dana pendidikan tersebut pada saat dibutuhkan. Sehingga setiap orang tua mempunyai upaya untuk menghadapi mahalny pendidikan di era globalisasi saat ini. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Pur untuk mempersiapkan mahalny pendidikan di era globalisasi saat ini beliau mengikuti asuransi pendidikan, berikut penuturan langsung beliau :

“Yen asuransine yo bayar tiap 3 bulan sekali Mbak Rp 300.000,00 jangka waktune selama 5 tahun. Dadi yen anak kulo lulus Sekolah Dasar, kulo nerimo bantuan ngge biaya...”. (Kalau asuransi ya bayarnya setiap 3 bulan sekali Mbak Rp 300.000,00 jangka waktunya selama 5 tahun. Jadi kalau anak saya lulus Sekolah Dasar, saya menerima bantuan untuk biaya pendidikan...). (W/ Ibu Pur/02/04/2011).

Berdasarkan penuturan Ibu Pur di atas, jelas bahwa jika dibandingkan dengan kebutuhan primer dan biaya hidup yang semakin mahal, kebutuhan terhadap pendidikan merupakan kebutuhan yang sifatnya jangka panjang sehingga tidak boleh dikesampingkan walaupun tidak terlalu mendesak. Dengan mengikuti asuransi pendidikan, Ibu Pur berharap agar mampu mengantisipasi dan mempersiapkan dana sedemikian besar untuk membayar biaya pendidikan anaknya kelak dikemudian hari. Serupa dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Pur, Ibu Wati juga melakukan cara yang hampir sama dengan Ibu Pur dengan mengikuti program tabungan pendidikan untuk menghadapi mahalny biaya pendidikan anaknya. Berikut pengungkapan Ibu Wati :

“Ngge ngringanke biaya pendidikan, kulo nggeh melu program tabungan pendidikan neng bank swasta, lumayan Mbak saged ngringanke beban kulo opo maneh saiki pendidikan tambah akeh pengeluarane”. (Untuk meringankan biaya pendidikan, saya

mengikuti program tabungan pendidikan di bank swasta, lumayan Mbak dapat meringankan beban saya apalagi pendidikan sekarang tambah banyak pengeluarannya). (W/ Ibu Wati 02/04/2011).

Berdasarkan penuturan Informan di atas, Upaya yang dilakukan oleh Ibu Pur dan Ibu Wati merupakan upaya secara finansial dalam mempersiapkan dan mengantisipasi mahalnya pendidikan kelak dikemudian hari apalagi kondisi dunia pendidikan terutama di Indonesia semakin marak dengan adanya komersialisasi pendidikan. Dengan mengikuti asuransi pendidikan dan program tabungan pendidikan maka Ibu Pur dan Ibu Wati memperoleh keuntungan keringanan biaya saat anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Semakin mahalnya biaya pendidikan di era globalisasi disinyalir karena semakin banyaknya pungutan-pungutan di luar pungutan wajib sehingga orang tua terbebani karena hal tersebut. Selain uang gedung yang ditarik saat awal masuk seorang anak ke lembaga pendidikan, biaya untuk Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) setiap bulannya maupun uang seragam, pungutan lain seperti buku pelajaran, kegiatan-kegiatan sekolah bahkan *study tour* semakin membebani biaya pendidikan saat ini. Pengeluaran terhadap pemenuhan buku-buku yang menunjang proses pendidikan yang tidak kalah mahal sebenarnya dapat diminimalisir sebagai upaya mengurangi beban pendidikan para orang tua. Sebagai Informan yang sedang menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, anak Pak Wagiyono mempunyai cara agar membantu beban orang tuanya membiaya kuliahnya.

“Pas awal masuk kuliah itu loh Mbak, buku terus. Kasian Bapakku dadi kadang gak beli buku langsung ke toko-toko buku, lha hargane selangit ko Mbak, dadi kadang ku fotokopi bareng-bareng karo temen-temen kampus”. (W/ Hesti/04/05/2011).

Dari pernyataan Hesti sebagai mahasiswa awal yang hampir 1 (satu) tahun mengikuti perkuliahan di jurusan terbaru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hesti mempunyai cara tersendiri untuk mengurangi beban orang tua yang telah membiayai kuliahnya. Pemenuhan kebutuhan buku-buku

perkuliahan yang tidak sedikit dapat dilakukan dengan cara fotokopi buku aslinya. Sehingga uang yang dikeluarkan tidak terlalu besar dibandingkan dengan membeli buku aslinya. Hal ini juga dipertegas oleh Pak Bondan sebagai seorang pendidik Sekolah Menengah Pertama di Kota Surakarta, beliau juga mempertegas masalah pemenuhan buku-buku yang dihadapi oleh para orang tua yang menyekolahkan anaknya :

“....Padahal keberadaan BSE mampu mengurangi beban orang tua termasuk saya yang sedang menyekolahkan anak saya apalagi di Kota Metropolitan yaitu Jakarta. Banyak pendidik yang kesulitan mengakses internet sehingga masih terkesan gaptek, akibatnya pendidik lebih memilih menjual buku-buku yang ditawarkan oleh penerbit buku....”. (W/ Pak Bondan/11/05/2011).

Menurut Pak Bondan yang sudah memanfaatkan adanya Buku Sekolah Elektronik (BSE) dalam proses kegiatan belajar mengajar, program buku digital yang dicanangkan pemerintah untuk menekan harga buku pada kenyataannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, untuk mengakses dan mengunduhnya lewat jaringan internet juga mengalami kesulitan ditambah keahlian pendidik yang masih kurang menguasai internet sehingga banyak sekolah yang belum menggunakan buku digital atau Buku Sekolah Elektronika (BSE) tersebut. Padahal jika semua pendidik menggunakan dan memanfaatkan program tersebut maka banyak orang tua peserta didik yang berkurang beban untuk membiayai pendidikan anaknya.

Namun, berbeda dengan yang Ibu Ratih yang menyekolahkan anaknya di Taman Kanak-kanak keadaan mahal nya pendidikan di era globalisasi saat ini telah membuat beliau hanya pasrah dengan keadaan.

“Mau kepiye maneh Mbak, wonk kene yo gur gaweane ngene, penghasilan ra ben dinone tentu yen masalah anak sekolah yen sampun wayahe rejeki yo teko dhewe, anak mesti nggowo rejeki dhewe to Mbak ??.” (Mau gimana lagi Mbak, orang cuma pekerjaane begini, penghasilan juga tidak menentu setiap harinya, kalau masalah anak sekolah kalau sudah waktunya rejeki ya datang sendiri, anak pasti membawa ejeki sendiri Mbak). (W/ Ibu Ratih/20/04/2011).

Berdasarkan penuturan Ibu Ratih walaupun beliau menyekolahkan anaknya dijenjang pendidikan masih taraf rendah, tetapi pada kenyataannya besarnya pengeluaran yang harus dibayarkan untuk pihak sekolah juga lumayan banyak. Dengan pekerjaan yang kurang memberi pendapatan yang tetap setiap harinya, beliau hanya pasrah dengan keadaan semakin mahalnya biaya pendidikan di era globalisasi saat ini, pepatah Jawa anak membawa rejeki sendiri masih dipegang teguh Ibu ratih tersebut. Sebagai orang tua yang sedang menyekolahkan ketiga anaknya, Pak Bagyo juga merasa keberatan dengan biaya pendidikan di era globalisasi saat ini, berikut pernyataan langsung beliau saat menghadapi mahalnya pendidikan saat ini :

“...Yen lagi akeh iuran ditambah duit lagi tipis yowes kadang pinjem ke bank, saudara yen gak yo terpaksane minjem nyang rentenir yen wes kepepet banget, pernah juga nggadakne perhiasan anak kulo ngge bayar semesteran”. (W/ Pak Bagyo/02/04/2011). (... Kalau lagi banyak iuran, ditambah uang lagi tipis maka kadang meminjam ke bank, saudara atau kalau tidak terpaksa meminjam ke rentenir kalau sudah begitu mendesak, pernah juga menggadaikan perhiasan anak saya untuk membayar semesteran).

Berdasarkan penuturan dari Pak Bagyo di atas mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini menuntut orang tua untuk menyiapkan besarnya biaya pendidikan yang tidak sedikit, apalagi keadaan Pak Bgayo yang sedang menyekolahkan ketiga anaknya. Dengan penghasilan yang tidak tetap setiap bulan, banyaknya iuran dan pungutan di sekolah anaknya terkadang memaksa beliau untuk meminjam uang ke bank, saudara, rentenir atau bahkan jika mendesak beliau pernah menggadaikan barang berharga anaknya agar dapat memperlancar proses kegiatan belajar anaknya.

Namun, hal ini berbeda dengan penuturan langsung Ibu Budi dan Ibu Surti yang sama-sama mempunyai usaha angkringan untuk menambah pendapatan perekonomian keluarga. Ibu Surti yang sedang menyekolahkan 3 orang anaknya menuturkan bahwa :

“....Ngge kemajuan hidup layak anak kulo ngge mboten masalah toh rejeki mesti enek malah dadi tambah semangat kerja keras ngge biyai sekolah anak-anak”. (W/ Ibu Surti/20/04/2011). (...Demi pendidikan untuk kemajuan hidup layak anak saya ya tidak masalah

toh rejeki pasti ada bahkan jadi tambah semangat kerja keras untuk biayai sekolah anak-anak).

Menurut Ibu Surti, walaupun biaya pendidikan semakin mahal tetapi bukan menjadi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Demi mendapat kehidupan yang layak kelak dikemudian hari maka pendidikan merupakan sarana untuk mencapainya. Pengeluaran untuk biaya pendidikan yang banyak menjadi beban tersendiri bagi beliau apalagi menjelang kenaikan kelas. Keadaan itulah yang kemudian menjadi pemicu semangat semakin bekerja keras untuk membiayai anak-anaknya. Hal serupa juga dilakukan oleh Ibu Budi sebagai perantau, semangat beliau untuk menyekolahkan anaknya juga tidak kalah dengan orang tua yang mempunyai penghasilan tetap.

“Kalo kerjane gak semangat anak saya bakal makan pake apa Neng, terus yang biayai sekolah siapa lagi kalo bukan dari hasil kerja keras saya. Kadang kalo penarikan biaya sekolah banyak terus penghasilan gak mencukupi kadang yo hutang, nggadaikan kalo gak yo menjual barang berharga Neng”. (W/ Ibu Budi/9/05/2011).

Berdasarkan pendapat Ibu Budi di atas, semangat kerja kerasnya untuk menambah pendapatan keluarga merupakan cara agar mampu membiayai hidup keseharian dan kebutuhan pendidikan anaknya. Bahkan jika penghasilan kurang mencukupi kadang beliau memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya dengan cara hutang, menggadaikan atau bahkan menjual barang berharga sekalipun.

Selain itu, bagi Ibu Dewi sebagai seorang pendidik upaya memberantas mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini, pemerintah juga harus dilakukan bukan hanya orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya. Berikut penuturan langsung Ibu Dewi :

“....Para petinggi pemerintahan serta jajarannya harusnya mampu menindak tegas dengan membuat aturan di daerah untuk melarang pungutan yang tidak ada dasarnya terhadap sekolah yang ada. Sehingga pemerintah daerah juga perlu memperbesar anggaran pendidikan agar biaya operasional sekolah semakin ringan dan tidak membebani masyarakat. (W/ Ibu Dewi/14/05/2011).

Dari penuturan Ibu Dewi di atas pendidikan mahal seharusnya mampu menjadikan pemerintah *commit to user* menindaklanjuti persoalan tersebut.

Pemerintah harus tegas membuat kebijakan agar sekolah-sekolah tidak memungut dana yang kurang begitu jelas bahkan memberatkan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga harus memperbesar anggaran untuk membantu biaya operasional sekolah agar semakin ringan dan tidak membebani masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya serta tokoh masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, maka upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi saat ini sangatlah beragam. Ada beberapa orang tua yang benar-benar menyiapkan dan mengantisipasi biaya pendidikan anaknya yang semakin mahal kelak dikemudian hari. Mengikuti asuransi pendidikan dan menabung untuk biaya pendidikan anak merupakan salah satu cara yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena mampu meringankan beban orang tua kelak saat seorang anak masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta secara tidak langsung memperoleh keuntungan dari dana yang sedang ditabung. Namun, ada juga orang tua yang hanya pasrah dengan keadaan semakin mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini. Walaupun komersialisasi pendidikan semakin marak, tetapi bukan menjadi pemicu beberapa orang tua untuk menyurutkan niatnya menyekolahkan anaknya. Beberapa orang tua menjadi semakin semangat dan bekerja keras untuk menyekolahkan anaknya walaupun biaya pendidikan semakin mahal.

C. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada sub bab berikut ini akan dibahas lebih lanjut tentang temuan studi yang dihubungkan dengan kajian teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh makna yang mendasari temuan-temuan penelitian berkaitan dengan teori-teori yang relevan dan dapat pula terjadi penemuan teori baru dari penelitian ini kemudian dinyatakan dalam bentuk kesimpulan. Temuan data-data yang dihasilkan dari penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori atau

pendapat yang ada dan sedang berkembang. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dilakukan pembahasan secara rinci.

1. Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi

Pendidikan dapat dijadikan alat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan serta kebiasaan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi utuh, mampu mengembangkan atau mengubah kognisi serta afeksi dirinya sebagai warganegara yang baik. Pendidikan sebagai proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang hayat dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah usaha yang sadar dilakukan orang dewasa untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, baik dewasa jasmani maupun rohani yang mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan dilakukan secara aktif untuk dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh individu dan masyarakat, dalam pendidikan nasional untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan sebenarnya sangat terkait dengan konteks kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pendidikan menjadi bagian dari berbagai kepentingan atau keinginan masyarakat yang tidak lepas dari kesejarahan dan cita-cita suatu negara bangsa dalam perubahan besar dunia untuk mencapai kemajuannya. Masalah itulah yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini. Lembaga-lembaga pendidikan Indonesia di era globalisasi saat ini, berlomba-lomba untuk menaikkan biaya pendidikan dengan alasan, karena semakin tinggi biaya pendidikan yang harus dipenuhi sekarang ini (*jer basuki mowo bea*). Peningkatan biaya pendidikan merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga pendidikan, tetapi tidak diikuti adanya pelayanan pendidikan yang maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan yang hasilnya tetap tidak meningkat. Dampak adanya globalisasi

telah memberi pengaruh terhadap pendidikan di Indonesia, karena telah mengancamnya kearah orientasi pasar.

Orientasi pasar di dunia pendidikan menjadi sebuah kenyataan yang berlaku dalam dunia pendidikan terutama pada saat tahun ajaran baru, banyak perguruan tinggi bahkan sekolah-sekolah berlomba untuk menarik berbagai tarif atau biaya pendidikan, baik dijenjang pendidikan tertinggi maupun yang terendah. Hal tersebut seperti yang dialami oleh 3 (tiga) Informan yaitu Ibu Budi, Ibu Ratih dan Ibu Surti yang sama-sama menyekolahkan anaknya di Taman Kanak-kanak menunjukkan bahwa biaya pendidikan di era globalisasi saat ini dapat dikatakan tidak mengenal tingkatan atau jenjang pendidikan. Walaupun masih duduk dibangku Taman Kanak-kanak, tetapi biaya yang harus dikeluarkan cukup menguras kantong para orang tua peserta didik, ditambah dengan pemungutan biaya lain-lain diluar pemungutan wajib dari sekolah. Bahkan menurut Ibu Budi pengeluaran untuk pendidikan anaknya tidak hanya digunakan untuk membayar pungutan wajib yang harus dibayar pada awal masuk sekolah ataupun Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), tetapi pungutan lain seperti rekreasi maupun kegiatan di luar sekolah juga menjadi beban tersendiri bagi orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya. (W/ Ibu Budi/22/04/2011). Pendapat Ibu Budi juga pertegas oleh Ibu Ratih dan Ibu Surti bahwa pengeluaran untuk pungutan-pungutan diluar pungutan wajib tersebut selain memberatkan juga bermacam-macam seperti pungutan untuk pentas seni, peringatan-peringatan hari besar nasional atau keagamaan. Semakin mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini menunjukkan bahwa era globalisasi saat ini telah mengancam peranan sosial pendidikan, sebagai contoh banyaknya sekolah yang didirikan dengan tujuan sebagai media bisnis. Pendidikan yang berkembang saat ini sesuai filsafat materialisme Marx, yang menyatakan bahwa sepanjang kehidupan manusia hidup dalam wilayah material yang nyata dalam rangka melakukan aktualisasi kebutuhan ekonomi, bahwa uang adalah sesuatu yang bernilai dan mewujudkan kualitas manusia.

Dalam pemikiran Marx, keadaan tersebut merupakan hubungan produksi sekolah dominan yang cenderung mempunyai kesempatan untuk menguasai alat produksi untuk melanggengkan kekuasaan penindasan yang komersial. Selain mahalnya pendidikan dijenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, mahalnya pendidikan juga semakin dirasakan dijenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti halnya Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Walaupun terdapat program pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang dicanangkan untuk meringankan beban orang tua peserta didik terutama dijenjang pendidikan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah, tetapi pada kenyataannya kurang membantu meringankan beban orang tua peserta didik.

Menurut Pak Bagyo dan Ibu Pur yang sedang menyekolahkan anaknya dijenjang pendidikan Sekolah Dasar, dana bantuan tersebut pada kenyataannya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu. Hal ini jelas bahwa lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah tersebut merupakan penguasa (kelas kapitalis) yang kemudian akan mengambil tenaga buruh demi kepentingannya yang tidak lain adalah masyarakat yang menyekolahkan anaknya terutama bagi yang kurang mampu. Fenomena dan fakta pendidikan yang bermasalah lambat laun secara politik akan menumbuhkan suburkan *culture capitalism* maupun *ideologi neoliberalism* di lembaga pendidikan khususnya di Indonesia dengan modus klasik “komersialisasi pendidikan”. Komersialisasi pendidikan berpengaruh terhadap menurunnya mutu pendidikan nasional serta merusak budaya bangsa tanpa menghiraukan nilai-nilai moral bahkan dari segi sosial pendidikan mahal tidak mengangkat strata sosial masyarakat yang kurang mampu. Hal inilah yang kemudian membuat Karl Marx yakin bahwa basis bagi pendidikan adalah perkembangan ekonomi sebagai cara manusia untuk menghadapi alam untuk memenuhi kehidupan dan mengembangkannya. Dalam perubahan masyarakat inilah yang kemudian memunculkan kelas-kelas

commit to user

yaitu kelas atas yang memegang kekuasaan untuk mengendalikan dan menindas kelas bawah.

Selain tingginya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) masih banyak pungutan-pungutan diluar pungutan wajib seperti buku-buku pelajaran, *study tour* maupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah juga menjadi hal yang hampir sama dengan yang dialami oleh Ibu Budi, Ibu Ratih dan Ibu Surti yang sedang menyekolahkan anaknya di Taman Kanak-kanak. Keluhan tentang biaya pendidikan mahal juga dialami oleh orang tua peserta didik yang sedang menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan Sekolah Dasar seperti Ibu Wati. Menurut beliau pendidikan sekarang semua dihitung dengan materi akibatnya banyak iuran atau pungutan diluar iuran wajib, seperti halnya iuran rekreasi, renang, biaya tambahan pelajaran bahkan *out bond* yang semakin banyak. Pendidikan yang mahal juga dirasakan sejak anaknya duduk dibangku sekolah Taman Kanak-kanak, hal ini dipertegas dengan ungkapan langsung beliau sebagai berikut :

“Pendidikan mahal ki yo tak rasakne pas anak saya masih TK....Yen biaya pendidikan anak saya saiki neng SD Ngoresan per bulan gratis, tapi pas masuk bayar uang gedung Rp 500.000,00, sak teruse gratis amargo enek keringanan biaya seko pemerintah”. (Pendidikan mahal sudah dirasakan sejak anak saya masih TK....Kalau biaya pendidikan anak saya sekarang duduk di SD Ngoresan per bulan gratis, tapi pas masuk bayar uang bangunan sebesar Rp 500.000,00, untuk selanjutnya gratis karena ada keringanan biaya dari pemerintah). (W/ Ibu Wati/02/04/2011).

Sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di bangku Sekolah Menengah Pertama, Ibu Budi dan Pak Bagyo juga mengeluh tentang mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini. Walaupun mendapat keringanan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), tetapi bantuan tersebut kurang membantu beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Selain itu, dalam UU Sisdiknas (pasal 49) juga telah diberlakukan peraturan yang merekomendasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mengalokasikan dana minimal 20 persen dari APBN dan APBD di luar gaji

pengelola pendidikan, tetapi pada kenyataannya pendidikan masih belum bersahabat terutama untuk masyarakat kecil. Hal ini disebabkan karena biaya pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama hanya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)-nya yang gratis. Bahkan biaya pendidikan masih tetap mahal bahkan semakin banyak pungutan-pungutan dengan label kegiatan yang berasal dari sekolah. Disisi lain bantuan pendidikan tersebut juga tidak diperuntukkan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (*playgroup*) hingga Perguruan Tinggi sehingga hanya orang-orang tertentu yang mampu mengenyam pendidikan layak hingga jenjang pendidikan lebih tinggi.

Dengan demikian, walaupun bantuan dari pemerintah sudah digalakkan untuk meringankan beban orang tua peserta didik, tetapi biaya pendidikan masih mahal menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang mampu membiayai pendidikan anaknya karena tingkat ekonominya relatif rendah dan dituntut untuk membiayai pelaksanaan pendidikan yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya rekayasa otonomi aturan sekolah yang menyebabkan orang yang kehidupan sosialnya rendah sulit untuk membiayai sekolah anaknya.

Komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pembiayaan sangat mahal juga menjadi beban dan keluhan tidak hanya bagi masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga dikeluhkan oleh masyarakat dengan berpendapatan tetap. Walaupun mempunyai penghasilan yang tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan berarti Pak Bondan tidak mengeluh tentang mahalunya pendidikan di era globalisasi. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh Pak Bondan yang sedang menyekolahkan anaknya di Kota Metropolitan.

"Kaget banget Mbak, masa uang masuk mencapai Rp 4.000.000,00 untuk uang gedung, sumbangan pengembangan pendidikan, seragam dan kegiatan orientasi sekolah. Pokoknya beban banget Mbak pas kuwi opo maneh keadaan anak saja jauh....". (W/ Pak Bondan/11/05/2011).

Biaya pendidikan yang melambung tinggi apalagi di Kota Metropolitan seperti Jakarta menjadi beban tersendiri bagi Pak Bondan. Tidak hanya dana yang dikeluarkan saat masuk pertama kali, tetapi dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan buku pelajaran juga tergolong mahal. Kegiatan ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh anak Pak Bagyo oleh sekolah ternyata juga menjadi tambahan pengeluaran apalagi jika kegiatan dilakukan di luar sekolah. Pengakuan Informan menunjukkan bahwa pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat. Akibat komersialisasi pendidikan inilah, banyak lembaga pendidikan yang kemudian menganut paradigma pendidikan yang bersifat ekonomis. Banyak lembaga pendidikan yang akhirnya gagal mengimplikasikan bahwa proses pembelajaran menjadi salah satu pilar utama dalam humanisasi hidup manusia. Selain itu, komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga telah menciptakan jurang pemisah antara pihak yang mempunyai modal dan pihak yang mempunyai sedikit modal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ivan Illich dalam Benny Susanto (2005 : 119), “komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern mengabdikan kepada kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas”. Akibatnya pendidikan yang humanisasi tidak tercapai dalam proses pendidikan karena adanya komersialisasi pendidikan menurut Satriyo Brojonegoro hanya mampu dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modal untuk mengakses pendidikan (Darmaningtyas, 2005 : 31).

Namun, lembaga tersebut tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi pendidikan karena lembaga pendidikan memang tidak memperdagangkan pendidikan, tetapi uang pembayaran sekolah yang sangat mahal. Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Surti yang sedang menyekolahkan anaknya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, beliau pun mengeluh tentang pembayaran sekolah yang mahal serta pungutan sekolah apalagi untuk Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajatnya yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ditambah dengan penghasilan beliau

yang terkadang kurang mencukupi kebutuhan ketiga anaknya yang sedang mengenyam pendidikan. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Surti

“Pendidikan saiki memang mahal, iuran praktek, buku-buku, apalagi anak kula seng pertama arep Ujian Nasional akeh ngluarke duwit. Pusing pokoke sithik-sithik emang kudu pake duwit. Makane anak kulo nggeh mboten nglanjutke kuliah mergone yo kuwi mboten kiyat biyai...”. (W/ Ibu Surti/20/04/2011).

Pungutan sekolah yang bermacam-macam sebenarnya merupakan pungutan biaya pendidikan yang digunakan untuk memfasilitasi jasa pendidikan serta menyediakan infrastruktur pendidikan bermutu, seperti menyediakan fasilitas teknologi informasi maupun laboratorium praktikum apalagi latar belakang pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan untuk sisa anggaran yang diperoleh, digunakan untuk menanamkan kembali bentuk infrastruktur pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, tetapi dapat menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan nasional.

Berdasarkan penuturan Informan di atas yaitu Pak Bagyo, Pak Bondan, Ibu Ratih, Ibu Wati, Ibu Surti dan Ibu Budi dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pendidikan mahal yang disebabkan karena banyaknya pungutan-pungutan lain seperti piknik atau *study tour* yang disertai label sebagai kegiatan rutin sekolah, praktek-praktek, kegiatan-kegiatan sekolah dalam rangka memperingati hari keagamaan maupun hari besar nasional serta buku-buku pelajaran bahkan LKS yang ternyata masih begitu memberatkan orang tua peserta didik untuk memenuhinya. Diungkapkan oleh Habibie dalam Darmaningtyas (2005: 257), bahwa “komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrument untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat”. Adanya komersialisasi pendidikan telah menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bahwa pendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin yang siap mem-*supplay* pasar industri dan diukur secara ekonomis. A. Kahar (Universitas Sumatra

Utaranya, 23/01/2007) menyebutkan bahwa “pendidikan mahal di Indonesia juga masih jauh dari mutu, sehingga menimbulkan adanya komersialisasi di dunia pendidikan”. Hal ini ditegaskan oleh Pak Bondan dan Ibu Dewi bahwa pungutan-pungutan pendidikan yang semakin banyak dan melambung tinggi, serta acara-acara atau kegiatan sekolah yang kurang begitu memberi manfaat secara edukasi juga memberi dampak terhadap semakin maraknya komersialisasi pendidikan di Indonesia. Piknik, rekreasi, *study tour* yang hanya berlabel sebagai kegiatan untuk edukasi pada kenyataannya kurang maksimal pelaksanaannya bahkan hanya menambah beban orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya.

Dari penuturan Informan yang sedang menyekolahkan anaknya khususnya dilembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah, menurut Peter McLaren yang juga mengatakan bahwa dalam dunia kapitalisme, sekolah adalah bagian dari industri, sebab sekolah adalah penyedia tenaga kerja atau buruh bagi industri. Berdasarkan fakta yang dialami oleh beberapa Informan dalam menyekolahkan anaknya maka terdapat tiga pengaruh kapitalisme terhadap sekolah yaitu :

- 1) Hubungan antara kapitalisme dan pendidikan telah mengakibatkan praktek-praktek sekolah yang cenderung mengarah kepada kontrol ekonomi oleh kaum kelas sosial tinggi atau elit.
- 2) Hubungan antara kapitalisme dan ilmu telah menjadikan tujuan ilmu pengetahuan sebatas mengejar keuntungan.
- 3) Perkawinan antara kapitalisme dengan pendidikan serta kapitalisme dan ilmu telah menciptakan pondasi bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai material dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan martabat manusia. Pada akhirnya peserta didik dalam dunia pendidikan kita kehilangan sensitifitas kemanusiaan digantikan dengan kalkulasi kehidupan materialisme.

Pendidikan dikomersilkan dengan alasan karena mutu pendidikan memerlukan biaya pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berkualitas

memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga semua orang yang ingin menikmati pendidikan tinggi juga harus mengeluarkan dan membayar dengan biaya yang mahal. Walaupun Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010, tetapi pengkajian penerapan konsep Undang-undang tersebut dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan masih menjadi momok dan teror bagi orang tua yang akan meneruskan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti Perguruan Tinggi.

Mahalnya biaya pendidikan yang dialami oleh Ibu Pur ternyata juga dialami oleh Pak Wagiyono yang menyekolahkan anaknya di bangku kuliah salah satu Perguruan Tinggi favorit di Kota Surakarta selama hampir 2 semester. Menurut Ibu Pur dan Pak Wagiyono yang sedang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, biaya pendidikan mahal dan melambung tinggi begitu dirasakan apalagi saat awal masuk kuliah. Komersialisasi pendidikan ini lebih mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang kuliah, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini biasa dilakukan oleh lembaga atau sekolah-sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan, tetapi tidak sepadan dengan uang yang pungut. Bahkan menurut Agus Wibowo (2008 : 111) komersialisasi pendidikan juga mengacu pada dua pengertian yang berbeda bahwa :

komersialisasi hanya mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pendidikan serta perlengkapan yang serba mahal. Selain itu, komersialisasi pendidikan juga mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan penarikan uang pendaftaran dan uang sekolah saja, tetapi mengabaikan kewajiban yang harus diberikan kepada siswa.

Pendapat ini ditegaskan oleh Hesti, sebagai mahasiswa semester 2 di salah satu universitas favorit di Kota Surakarta, pelayanan dan fasilitas yang diperolehnya saat kuliah hampir sama bahkan dibawah mahasiswa regular yang bayarnya lebih sedikit dibawahnya. (W/ Hesti/04/05/2011). Laba atau selisih anggaran yang diperoleh oleh lembaga pendidikan biasanya tidak

ditanam kembali ke dalam infrastruktur pendidikan, tetapi dipergunakan untuk memperkaya atau menghidupi pihak-pihak yang tidak secara langsung bekerja menyajikan pelayanan di lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ideologi kapitalisme menjadi sumber ketimpangan sehingga terdapat pandangan bahwa orang yang berkualitas adalah orang yang memiliki banyak kelimpahan material. Dalam pemikiran Marx tentang masalah pendidikan yang menyatakan bahwa :

Pendidikan merupakan proses historis dalam kehidupan manusia yang ditentukan oleh perkembangan masyarakat berdasarkan kondisi material ekonomi yang berkembang. Pendidikan sebagai struktur atas (superstruktur) yang ditentukan oleh ekonomi (hubungan produksi dan alat-alat produksi) sebagai struktur bawah (basis struktur) yang merupakan suatu pondasi perkembangan masyarakat. Pendidikan sebagai proses diajarkannya filsafat, ideologi, agama dan seni diajarkan sehingga menjadi media sosialisasi pandangan hidup dan kecakapan yang harus diterima masyarakat (terutama anak-anak). Selain itu, pendidikan juga sangat berkaitan erat dengan politik karena berada pada wilayah atas dari struktur masyarakat yang ada (Marx dalam Nurani Soyomukti, 2010: 358)

Menurut Marx, pendidikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai kecakapan hidup serta media sosialisasi dalam masyarakat. Namun, peran pendidikan juga mempunyai keterkaitan dengan masalah ekonomi bahkan menjadi faktor yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses tercapainya pendidikan yang berkualitas. Banyaknya pungutan-pungutan selain pungutan wajib seperti Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan maupun uang bangunan serta beraneka ragam pungutan-pungutan mulai dari pungutan buku-buku pelajaran yang dijual oleh pihak pendidik, seragam sekolah pada awal masuk sekolah, iuran untuk kegiatan-kegiatan sekolah (pentas seni, peringatan hari besar nasional maupun keagamaan), praktek-praktek di dalam maupun di lapangan (di luar sekolah atau kampus) bahkan pungutan untuk kegiatan *study tour* atau piknik yang berlabelkan untuk tujuan edukasi menjadi hal yang tidak asing

lagi. Sehingga maraknya komersialisasi pendidikan di era globalisasi saat ini juga menimbulkan berbagai opini pro dan kontra yang dilontarkan oleh masyarakat melalui tulisan-tulisan di media massa yang merupakan suatu fenomena yang begitu memprihatinkan pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan nasional dalam praktiknya masih jauh dari yang diharapkan. Apalagi mahalnya biaya pendidikan tidak hanya dirasakan di jenjang Perguruan Tinggi, tetapi di jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak biaya pendidikan juga tidak kalah mahal. Sedangkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar walaupun mendapat bantuan keringanan dari pemerintah, tetapi biaya pendidikan tetap mahal begitu juga biaya pendidikan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Hal ini yang kemudian berakibat pada kecenderungan dunia pendidikan saat ini yang banyak terjebak ke arah komersialisasi bahwa pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

2. Dampak adanya Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi Bagi Masyarakat

Pendidikan yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan dan taraf hidup manusia agar menjadi lebih baik serta memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai manusia untuk saat ini sulit untuk tercapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena fungsi dan tujuan luhur pendidikan tersebut sekarang mulai luntur oleh prioritas melayani persaingan global daripada memeliharanya. Praktik lembaga pendidikan formal yang seharusnya menjadi transformasi dan konservasi nilai-nilai budaya telah terpengaruh oleh kepentingan kaum pemodal. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, apalagi menyangkut dengan situasi pendidikan yang banyak berorientasi dengan masalah mahalnya biaya pendidikan sekarang. Selain itu, era pasar bebas juga merupakan tantangan baru bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia.

Komersialisasi pendidikan di era globalisasi telah memberi banyak dampak terhadap proses pendidikan di Indonesia sehingga berpengaruh juga terhadap masyarakat. Pendidikan berorientasi pasar, berlogika kuantitas hingga upaya privatisasi pendidikan merupakan beberapa contoh dari gejala ketertundukan hakikat pendidikan terhadap hasrat kapitalisme global. Akibatnya pendidikan yang bermutu di era globalisasi saat ini juga tidak jauh berbeda dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai sekolah anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rudi sebagai pendidik yang sudah hampir 30 tahun berkecimpung di dunia pendidikan :

“Pendidikan sekarang tak tidak ubahnya pasar atau supermarket yang menyediakan berbagai barang yang diperlukan oleh pelanggan, sedangkan guru atau dosen merupakan kasir yang selalu melayani pelanggan yang tidak lain adalah para murid mereka sendiri....” (W/ Pak Rudi/16/05/2011).

Pendidikan mahal di era globalisasi saat ini sudah menjadi *trend* tersendiri di dunia pendidikan, pendidikan diibaratkan sebagai pasar atau supermarket yang menyediakan berbagai barang yang diperlukan oleh pelanggan, sedangkan pendidik (guru atau dosen) sebagai kasir yang selalu melayani pelanggan yaitu peserta didik mereka sendiri. Biaya pendidikan yang mahal sebenarnya mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas lembaga pendidikan di Indonesia, apalagi di era globalisasi saat ini segala sesuatu banyak dinilai dengan materi. Akibatnya sekolah negeri favorit saat ini hampir tidak berbeda jauh dengan sekolah swasta dalam masalah biaya pendidikan. Lembaga pendidikan saling bersaing (kompetitif) dalam masalah mutu dan fasilitas untuk menarik peminat yang banyak sehingga biaya pendidikannya pun semakin mahal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Pur bahwa anjuran sekolah tempat anaknya menuntut ilmu untuk memakai buku dengan *bermerk* tertentu pada kenyataannya memberatkan orang tua peserta didik. Apalagi harganya yang mahal daripada buku dengan merk lain yang pada kenyataannya kualitas dan mutunya hampir sama. Walaupun mahal, tetapi anjuran sekolah untuk memakai buku tersebut menunjukkan

bahwa terdapat praktek dagang yang dilakukan oleh sekolah sehingga sekolah menjadi lahan bisnis bagi para pendidik pada khususnya. Selain itu, hal tersebut juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan agar mampu bersaing dan unggul dengan sekolah lain melalui fasilitas yang digunakan.

Persoalan tentang pendidikan di Indonesia semakin terasa terutama bagi mereka yang kurang mampu sehingga terjadi kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Banyak berbagai jenjang pendidikan formal yang belum disentuh oleh golongan masyarakat bawah sehingga terjadi diskriminasi dan kesempatan memperoleh pendidikan semakin sempit. Tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, perbedaan pendidikan di era globalisasi saat ini adalah pendidikan untuk orang kaya, sekolah untuk orang menengah dan sekolah untuk orang miskin. Selain itu, gejala diskriminasi sebagai dampak dari mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini juga terlihat dengan munculnya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Munculnya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) seolah-olah dapat dijadikan upaya untuk menaikkan mutu pendidikan di Indonesia apalagi dengan mengedepankan kelas dalam menggunakan Bahasa Inggris. Namun, menurut Pak Bagyo hanya peserta didik yang mempunyai kemampuan kecerdasan lebih untuk masuk kelas bertaraf Internasional. Bahkan Sekolah Bertaraf Internasional (BSI) juga mematok biaya masuk sekolah yang sangat tinggi akibatnya mereka yang tidak mampu tidak bisa masuk disekolah tersebut. Dengan demikian, sekolah RSBI telah menciptakan adanya stigmatisasi yang menjadikan sekolah di Indonesia yang berkelas-kelas dan terkotak-kotak sesuai dengan kelas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Persoalan mahalnya biaya pendidikan sebagai akibat adanya komersialisasi pendidikan di era globalisasi bukan lagi menjadi masalah baru, mulai dari biaya pendaftaran masuk sekolah dijenjang pendidikan Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Permasalahan tersebut merupakan persoalan klasik yang selalu hadir dari tahun ke tahun terutama menjelang

tahun ajaran baru dimulai. Namun, persoalan mengenai besarnya biaya pendidikan yang timbul tidak dapat dianggap persoalan yang kecil, karena masalah tersebut menyangkut keadilan dan hak bagi seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama mendapat pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Akibatnya masyarakat yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini seperti yang dialami oleh Pak Bagyo dan Ibu Surti yang tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena alasan pendidikan sekarang yang mahal. Pak Bagyo tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena kendala biaya pendidikan sekarang yang semakin mahal apalagi dengan keadaan jumlah tanggungan anaknya yang bersekolah. Hal tersebut juga dipertegas oleh Ibu Surti sebagai orang tua yang sedang menyekolahkan ketiga anaknya bahwa pendidikan mahal saat ini diakibatkan karena terlalu banyak pungutan-pungutan yang selalu dihitung dengan uang. Alasan itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab beliau tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Baginya sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan memberinya keuntungan tersendiri karena anaknya mampu mencari kerja sesuai keterampilan yang diperoleh saat sekolah.

Kurangnya kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi secara tidak langsung telah membuktikan bahwa rantai kemiskinan semakin mustahil diputuskan oleh pendidikan. Secara sederhana, rantai kemiskinan dapat digambarkan karena miskin orang tidak dapat sekolah, karena tidak sekolah, seseorang tidak dapat pekerjaan yang baik karena tidak dapat pekerjaan sehingga menjadi miskin begitu seterusnya. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutus rantai kemiskinan (*vicious circle of povery*) semakin kehilangan fungsinya. Dalam konteks ini, komersialisasi pendidikan dapat mengarah pada pelanggaran “*poverty trap*” jebakan kemiskinan.

Masalah biaya pendidikan di era globalisasi yang semakin mahal juga berdampak pada terciptanya *commit to user* privatisasi pendidikan sehingga praktek

komersialisasi pendidikan di Indonesia tidak dapat ditolak keberadaanya. Apalagi kondisi ini didukung oleh kebijakan pemerintah tentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memberikan hak otonomi kepada lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi Negeri. Akibatnya tanggungjawab negara membantu dan memberi subsidi untuk pendidikan semakin berkurang sehingga banyak lembaga pendidikan menaikkan biaya pendidikan dan memperbanyak pungutan-pungutan di luar pungutan wajib untuk menambah kas (keuntungan). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Rudi bahwa :

“Mungkin jika lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus-kampus tidak menarik biaya yang tinggi maka kualitas pendidikan juga dipertanyakan, bagus atau tidak ??”. (W/ Pak Rudi/16/05/2011).

Pendidikan mahal saat ini memang tidak dapat ditolak keadaannya karena mampu menentukan kualitas pendidikan tersebut. Sehingga jika lembaga pendidikan tidak menarik biaya mahal maka kebutuhan untuk memperoleh fasilitas sekolah yang memadai juga mengalami kendala. Namun menurut Pak Bondan yang juga seorang pendidik, selain mahalnya pendidikan karena fasilitas yang digunakan, mahalnya pendidikan juga dipengaruhi oleh pungutan yang beranekaragam dari sekolah. Pungutan-pungutan diluar pungutan wajib kebanyakan hanya berlabel untuk pemenuhan aktivitas pendidikan ternyata juga memberatkan orang tua yang mempunyai penghasilan tidak tetap (kurang mampu). Bahkan kegiatan-kegiatan yang berlabel pendidikan sekalipun ternyata kurang bermanfaat sehingga cenderung memberi keuntungan untuk pihak sekolah.

Pendidikan mahal yang disebabkan karena pungutan wajib maupun tidak wajib merupakan bentuk komersialisasi pendidikan yang semakin marak di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan berkualitas tidak bisa begitu saja mengesampingkan profit (keuntungan). Keuntungan yang diperoleh lembaga pendidikan terutama Perguruan Tinggi tidaklah sedikit, mulai dari awal pendaftaran calon mahasiswa dipungut biaya untuk mengikuti tes, pembayaran masuk

perguruan tinggi, pemenuhan buku-buku untuk menunjang proses pendidikan bahkan hingga menjelang akhir sekolah.

Sebagai orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya di bangku perkuliahan, menurut Pak Wagiyono pendidikan saat ini jauh berbeda dengan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan beliau saat membiayai pendidikan anaknya yang pertama di bangku perkuliahan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah semakin berkurang dalam dunia pendidikan untuk mensubsidi serta membantu menambah pemasukan kas lembaga pendidikan seperti halnya Perguruan Tinggi. Akibatnya berdampak buruk pada beban bea masuk dan sumbangan pendidikan tinggi yang harus dipikul oleh mahasiswa. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Pur yang mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan Pak Wagiyono. Berikut pernyataan Ibu Pur :

“...Paling ribet maneh yen wes enek pungutan ngge praktek-praktek, pihak kampus mesti memungut dewe mbak, opo maneh yen prakteke gak di dalam kampus”. (...Paling ribet lagi kalau sudah ada pungutan untuk praktek-praktek, pihak kampus mesti memungut sendiri Mbak, apalagi kalau prakteknya tidak di dalam kampus). (W/ Ibu Pur/02/04/2011).

Walaupun pemerintah masih mensubsidi sekitar 40% untuk pendidikan di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, tetapi pada kenyataannya biaya pendidikan masih tetap mahal. Untuk menambah pemasukan perguruan tinggi, maka ada beberapa lembaga pendidikan yang kemudian semakin menambah kuota masuk jalur mandiri daripada regular. Sebagai contoh anak Pak Wagiyono yang tidak diterima melalui jalur SNMPTN harus masuk bangku perkuliahan melalui jalur swadana dengan biaya pendidikan tinggi agar dapat mengenyam bangku perkuliahan. Selain mahalnya pendidikan karena komersialisasi pendidikan, dampak lain juga dialami oleh Ibu Wati yang semakin selektif dalam memilih lembaga pendidikan baik sekolah atau perguruan tinggi. Bahkan menurut Ibu Wati dan Ibu Pur untuk dapat menikmati pendidikan yang dicita-citakan tidak sedikit orang tua yang kemudian melakukan sistem suap atau politik uang (*money politics*) yang semakin sering terjadi dan banyak ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan

di Indonesia untuk mendapatkan dana tambahan dari para orang tua peserta didik. Hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi mampu menutup peluang masyarakat kurang mampu untuk menikmati pendidikan tinggi. Sehingga dampak komersialisasi pendidikan dapat berdampak pada semakin meningkatnya gaya hidup masyarakat Indonesia yang berpangkal pada peribahasa ‘besar pasak daripada tiang’. Bahkan, dalam jangka waktu yang panjang, dampak buruk dapat terjadi pada kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia kelak dikemudian hari dalam menyongsong masa depan. Bahkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas hanya akan ditemukan di kelompok atau kelas masyarakat yang latar belakangnya memang memungkinkan secara materiil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada Pak Rudi, Pak Bagyo, Pak Bondan, Ibu Pur, Ibu Surti, Ibu Wati dan pak Wagiyono maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari adanya komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi adalah pendidikan yang semakin mahal tidak hanya dirasakan untuk membayar pungutan-pungutan wajib, tetapi pungutan di luar pungutan wajib juga semakin banyak ditemukan bahkan jumlahnya lebih tinggi. Semakin mahalnya pendidikan berdampak buruk pada sekolah-sekolah yang kemudian berlomba dalam memenuhi fasilitas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan untuk masuk ke sekolah favorit tidak jarang orang tua peserta didik yang menggunakan cara dengan memberi sejumlah dana untuk pihak sekolah (*money politic*) sehingga terjadi diskriminasi bagi mereka yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya lembaga-lembaga pendidikan di era globalisasi saat ini tidak ubahnya seperti lading bisnis untuk memperoleh keuntungan dari pungutan-pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah.

3. Upaya Masyarakat dalam Menghadapi Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi

Pendidikan merupakan hal yang berperan penting terhadap masa depan seorang anak sehingga *commit to user* demi mendapatkan pendidikan yang terbaik,

maka menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan tinggi merupakan salah satu cara agar anak mampu mandiri secara finansial kelak dikemudian hari. Namun, mahalnya biaya pendidikan di era globalisasi saat ini serta semakin naiknya biaya pendidikan dari tahun ke tahun seringkali membuat orang tua tidak mampu menyediakan dana pendidikan tersebut pada saat dibutuhkan. Sehingga setiap orang tua mempunyai cara dan upaya yang berbeda untuk menghadapi mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Pur untuk mempersiapkan mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini beliau mengikuti asuransi pendidikan. Hal ini disebabkan karena dibandingkan dengan kebutuhan primer dan biaya hidup yang semakin mahal, kebutuhan terhadap pendidikan merupakan kebutuhan yang sifatnya jangka panjang sehingga tidak boleh dikesampingkan walaupun tidak terlalu mendesak. Sehingga dengan mengikuti asuransi pendidikan, Ibu Pur berharap agar mampu mengantisipasi dan mempersiapkan dana sedemikian besar untuk membayar biaya pendidikan anaknya kelak dikemudian hari. Selain upaya yang dilakukan oleh Ibu Pur, Ibu Wati juga melakukan cara yang hampir sama dengan Ibu Pur dengan mengikuti program tabungan pendidikan untuk menghadapi mahalnya biaya pendidikan anaknya.

Upaya yang dilakukan oleh Ibu Pur dan Ibu Wati merupakan upaya secara finansial dalam mempersiapkan dan mengantisipasi mahalnya pendidikan kelak dikemudian hari apalagi kondisi dunia pendidikan terutama di Indonesia semakin marak dengan adanya komersialisasi pendidikan. Dengan mengikuti asuransi pendidikan dan program tabungan pendidikan maka Ibu Pur dan Ibu Wati memperoleh keuntungan keringanan biaya saat anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Semakin mahalnya biaya pendidikan di era globalisasi disinyalir karena semakin banyaknya pungutan-pungutan di luar pungutan wajib sehingga orang tua terbebani karena hal tersebut. Selain uang gedung yang ditarik saat awal masuk seorang anak ke lembaga pendidikan, biaya untuk Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) setiap bulannya maupun uang

seragam, pungutan lain seperti buku pelajaran, kegiatan-kegiatan sekolah bahkan *study tour* semakin membebani biaya pendidikan saat ini. Pengeluaran terhadap pemenuhan buku-buku yang menunjang proses pendidikan yang tidak kalah mahal sebenarnya dapat diminimalisir sebagai upaya mengurangi beban pendidikan para orang tua.

Sebagai Informan yang sedang menyekolahkan anaknya dijenjang pendidikan Perguruan Tinggi, anak Pak Wagiyono juga mempunyai cara sendiri agar membantu beban orang tuanya membiayai kuliahnya. Sebagai mahasiswa awal yang hampir 1 (satu) tahun mengikuti perkuliahan di jurusan terbaru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hesti mempunyai cara tersendiri untuk mengurangi beban orang tua yang telah membiayai kuliahnya. Pemenuhan kebutuhan buku-buku perkuliahan yang tidak sedikit dapat dilakukan dengan cara fotokopi buku aslinya. Sehingga uang yang dikeluarkan tidak terlalu besar dibandingkan dengan membeli buku aslinya. Hal ini juga dipertegas oleh Pak Bondan sebagai seorang pendidik Sekolah Menengah Pertama di Kota Surakarta dalam menghadapi permasalahan pemenuhan buku-buku yang dihadapi oleh para orang tua yang menyekolahkan anaknya. (W/ Pak Bondan/11/05/2011). Untuk membantu meringankan beban orang tua menghadapi biaya pendidikan sekarang yang semakin mahal, Pak Bondan memanfaatkan adanya Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dicanangkan pemerintah dalam kegiatan belajar mengajar untuk menekan pengeluaran orang tua. Namun, beliau juga menegaskan bahwa hal tersebut kurang begitu dimanfaatkan oleh para pendidik sehingga banyak orang tua peserta didik yang masih terbebani dengan mahalnya biaya pendidikan saat ini. Selain itu, kendala banyaknya pendidik yang mengalami kesulitan serta keahlian pendidik yang masih kurang menguasai internet berakibat banyak sekolah yang belum menggunakan buku digital atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) tersebut.

Biaya pendidikan yang semakin mahal menjadi keluhan dan beban tersendiri bagi orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya di jenjang perguruan tinggi hingga terendah seperti halnya Taman Kanak-kanak.

Menurut Ibu Ratih yang menyekolahkan anaknya di Taman Kanak-kanak keadaan mahal nya pendidikan di era globalisasi saat ini telah membuat beliau hanya pasrah dengan keadaan. Hal ini diungkapkan langsung oleh beliau bahwa :

“Mau kepiye maneh Mbak, wonk kene yo gur gaweane ngene, penghasilan ra ben dinone tentu yen masalah anak sekolah yen sampun wayahe rejeki yo teko dhewe, anak mesti nggowo rejeki dhewe to Mbak ??.” (Mau gimana lagi Mbak, orang cuma pekerjaane begini, penghasilan juga tidak menentu setiap harinya, kalau masalah anak sekolah kalau sudah waktunya rejeki ya datang sendiri, anak pasti membawa rejeki sendiri Mbak). (W/ Ibu Ratih/20/04/2011).

Dengan pekerjaan yang kurang memberi pendapatan yang tetap setiap harinya, beliau hanya pasrah dengan keadaan semakin mahal nya biaya pendidikan di era globalisasi saat ini, pepatah Jawa anak membawa rejeki sendiri masih dipegang teguh Ibu ratih tersebut. Selain itu, sebagai orang tua yang sedang menyekolahkan ketiga anaknya, Pak Bagyo juga merasa keberatan dengan biaya pendidikan di era globalisasi saat ini sehingga menuntut orang tua untuk menyiapkan besarnya biaya pendidikan yang tidak sedikit, apalagi keadaan Pak Bgayo yang sedang menyekolahkan ketiga anaknya. Dengan penghasilan yang tidak tetap setiap bulan, banyaknya iuran dan pungutan di sekolah anaknya terkadang memaksa beliau untuk meminjam uang ke bank, saudara, rentenir atau bahkan jika mendesak beliau pernah menggadaikan barang berharga anaknya agar dapat memperlancar proses kegiatan belajar anaknya.

Namun, berbeda dengan penuturan langsung Ibu Budi dan Ibu Surti yang sama-sama mempunyai usaha angkringan untuk menambah pendapatan perekonomian keluarga. Menurut Ibu Surti, walaupun biaya pendidikan semakin mahal tetapi bukan menjadi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. (W/ Ibu Surti/20/04/2011). Demi mendapat kehidupan yang layak kelak dikemudian hari maka pendidikan merupakan sarana untuk mencapainya. Pengeluaran untuk biaya pendidikan yang banyak menjadi beban tersendiri bagi beliau apalagi menjelang kenaikan kelas.

Namun, keadaan tersebut bukan menjadi alasan beliau untuk menyerah bahkan menjadi pemicu semangat untuk semakin bekerja keras dalam membiayai anak-anaknya. Hal serupa juga dilakukan oleh Ibu Budi sebagai perantau, semangat beliau untuk menyekolahkan anaknya juga tidak kalah dengan orang tua yang mempunyai penghasilan tetap. Semangat kerja kerasnya untuk menambah pendapatan keluarga merupakan cara agar mampu membiayai hidup keseharian dan kebutuhan pendidikan anaknya. Bahkan jika penghasilan kurang mencukupi kadang beliau memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya dengan cara hutang, menggadaikan atau bahkan menjual barang berharga sekalipun.

Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh para orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya, menurut Ibu Dewi sebagai seorang pendidik upaya memberantas mahalunya pendidikan juga harus dilakukan oleh pemerintah apalagi untuk menindaklanjuti persoalan semakin mahalunya pendidikan di era globalisasi saat ini. Pemerintah harus tegas membuat kebijakan agar sekolah-sekolah tidak memungut dana yang kurang begitu jelas bahkan memberatkan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga harus memperbesar anggaran untuk membantu biaya operasional sekolah agar semakin ringan dan tidak membebani masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya serta tokoh masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, maka upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi saat ini sangatlah beragam. Ada beberapa orang tua yang benar-benar menyiapkan dan mengantisipasi biaya pendidikan anaknya yang semakin mahal kelak dikemudian hari. Mengikuti asuransi pendidikan dan menabung untuk biaya pendidikan anak merupakan salah satu cara yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena mampu meringankan beban orang tua kelak saat seorang anak masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta secara tidak langsung memperoleh keuntungan dari dana yang sedang ditabung. Namun, ada juga orang tua yang hanya pasrah dengan keadaan semakin

mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini. Walaupun komersialisasi pendidikan semakin marak, tetapi bukan menjadi pemicu beberapa orang tua untuk menyurutkan niatnya menyekolahkan anaknya. Beberapa orang tua menjadi semakin semangat dan bekerja keras untuk menyekolahkan anaknya walaupun biaya pendidikan semakin mahal.



BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis data yang diperoleh mengenai komersialisasi pendidikan di era globalisasi (studi kasus tentang persepsi masyarakat terhadap kuasa modal dalam dunia pendidikan di Kelurahan Jebres, Surakarta) maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi yaitu :
 - a. Biaya pendidikan mahal di era globalisasi tidak mengenal tingkatan atau jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan tertinggi maupun terendah.
 - b. Banyaknya pungutan-pungutan diluar pungutan wajib seperti buku-buku pelajaran, *study tour*, pentas seni, peringatan-peringatan hari besar nasional, keagamaan maupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah menjadi salah satu penyebab masyarakat semakin mengeluh dengan biaya pendidikan yang semakin mahal dari jenjang pendidikan tertinggi hingga terendah.
2. Dampak adanya komersialisasi pendidikan di era globalisasi bagi masyarakat dibagi menjadi dampak positif dan negatif yaitu :
 - a. Dampak Positif :
 - 1) Beban pemerintah membiayai pendidikan semakin berkurang sebab banyaknya pungutan-pungutan yang ditarik lembaga-lembaga pendidikan, baik pungutan wajib maupun tidak wajib.
 - 2) Menambah keuntungan dan pemasukan kas lembaga pendidikan karena biaya pendidikan mahal serta banyaknya pungutan-pungutan sehingga secara tidak langsung lembaga pendidikan memperoleh profit (keuntungan).
 - 3) Lembaga pendidikan semakin kompetitif meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan untuk menarik peminat yang banyak sehingga biaya pendidikan semakin mahal.

- b. Dampak Negatif :
- 1) Pendidikan semakin mahal tidak mengenal jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan tertinggi maupun terendah serta semakin banyaknya pungutan-pungutan yang dilakukan lembaga pendidikan.
 - 2) Pendidikan sebagai ladang bisnis menjadi *trend* di dunia pendidikan, pendidikan diibaratkan pasar atau supermarket yang menyediakan berbagai barang untuk para pelanggan, sedangkan pendidik (guru atau dosen) sebagai kasir yang selalu melayani pelanggan yaitu peserta didik.
 - 3) Gejala stigmatisasi dan diskriminasi antara kaya dan miskin berdampak bagi yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan layak.
 - 4) Rantai kemiskinan sulit diputuskan melalui pendidikan.
 - 5) Tercipta privatisasi pendidikan sehingga memberikan hak otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mengurus anggaran lembaga pendidikan yang dikelola.
 - 6) Sistem suap atau politik uang (*money politics*) semakin banyak ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia untuk mendapatkan dana tambahan dari para orang tua peserta didik.
 - 7) Memacu gaya hidup “besar pasak daripada tiang” akibatnya dalam jangka waktu panjang banyak ditemukan individu berkualitas hanya akan ditemukan di kelompok masyarakat yang bermateri.
 - 8) Perubahan misi pendidikan dari budaya akademik menjadi budaya ekonomi.
3. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi komersialisasi pendidikan di era globalisasi yaitu
- a. Pasrah dengan keadaan semakin mahalnya biaya pendidikan di era globalisasi saat ini.
 - b. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meminimalisir pengeluaran dengan memanfaatkan adanya Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dicanangkan pemerintah dalam kegiatan belajar mengajar untuk menekan pengeluaran orang tua.

- c. Pendidikan mahal serta keuangan keluarga yang minim memaksa masyarakat untuk meminjam dana dari bank atau orang lain bahkan menggadaikan atau menjual barang berharga.
- d. Kerja keras untuk menambah pendapatan agar besarnya pengeluaran untuk biaya pendidikan yang semakin banyak dan menjadi beban bagi masyarakat teratasi.
- e. Mengikuti program asuransi maupun tabungan pendidikan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan dana biaya pendidikan anaknya kelak dikemudian hari.
- f. Pemerintah sebaiknya memperbesar anggaran untuk membantu pendidikan serta membuat kebijakan terhadap pembatasan lembaga-lembaga pendidikan dalam memungut dana yang terlalu besar sehingga tidak membebani masyarakat.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai komersialisasi pendidikan di era globalisasi (studi kasus tentang persepsi masyarakat terhadap kuasa modal dalam dunia pendidikan di Kelurahan Jebres, Surakarta) maka implikasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Pertama, menambah wawasan masyarakat mengenai komersialisasi pendidikan yang terjadi di era globalisasi sehingga masyarakat menjadi semakin selektif dalam memilih lembaga pendidikan yang tidak menarik banyaknya pungutan-pungutan baik wajib maupun tidak wajib.

Kedua, menambah wawasan bahwa pendidikan bermutu di era globalisasi saat ini sudah menjadi *trend* tersendiri di dunia pendidikan, pendidikan diibaratkan sebagai pasar atau supermarket yang menyediakan berbagai barang yang diperlukan oleh pelanggan, sedangkan pendidik (guru atau dosen) sebagai kasir yang selalu melayani pelanggan yaitu peserta didik mereka sendiri.

Fenomena pendidikan Indonesia inilah yang kemudian menjadi masalah yang secara politik semakin berdampak pada *culture capitalism* maupun *ideologi neoliberalism* di lembaga pendidikan khususnya di Indonesia dengan modus klasik “komersialisasi pendidikan”. Akibatnya mutu pendidikan nasional menurun serta merusak budaya bangsa tanpa menghiraukan nilai-nilai moral bahkan dari segi sosial pendidikan mahal tidak mengangkat strata sosial masyarakat yang kurang mampu.

Ketiga, menambah wawasan mengenai teori kapitalisme Marx bahwa semakin mahalnya pendidikan di era globalisasi saat ini menunjukkan bahwa era globalisasi saat ini telah mengancam kemurnian pendidikan sebagai contoh banyaknya sekolah yang didirikan dengan tujuan sebagai media bisnis. Sehingga sesuai dalam filsafat materialisme Marx, yang menyatakan bahwa sepanjang kehidupan manusia hidup dalam wilayah material yang nyata dalam rangka melakukan aktualisasi kebutuhan ekonomi, bahwa uang adalah sesuatu yang bernilai dan mewujudkan kualitas manusia. Sehingga dalam pemikiran Marx, keadaan tersebut merupakan hubungan produksi kelas dominan yang cenderung mempunyai kesempatan untuk menguasai alat produksi dan melanggengkan kekuasaan penindasan.

Keempat, menambah wawasan mengenai teori yang dikemukakan oleh McLaren dalam dunia kapitalisme, sekolah adalah bagian dari industri karena sekolah adalah penyedia tenaga kerja atau buruh bagi industri. Menyekolahkan berarti mempunyai pengaruh terhadap kapitalisme yang dilakukan sekolah yaitu

- 1) Hubungan antara kapitalisme dan pendidikan telah mengakibatkan praktek-praktek sekolah yang cenderung mengarah kepada kontrol ekonomi oleh kaum kelas sosial tinggi atau elit.
- 2) Hubungan antara kapitalisme dan ilmu telah menjadikan tujuan ilmu pengetahuan sebatas mengejar keuntungan.
- 3) Kapitalisme dan pendidikan serta kapitalisme dan ilmu telah menciptakan pondasi bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai material dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan martabat manusia.

2. Implikasi Praktis

Dengan semakin maraknya komersialisasi pendidikan di era globalisasi terutama di Kelurahan Jebres maka masyarakat yang sedang menyekolahkan anaknya, baik di jenjang pendidikan yang tertinggi maupun terendah mampu mempersiapkan dan mengantisipasi mahalannya pendidikan. Hal ini dilakukan agar praktek komersialisasi pendidikan tidak berdampak pada pemutusan sekolah anak dalam memperoleh dan menikmati dunia pendidikan yang layak. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas tidak akan terhindar dari mahalannya biaya pendidikan sehingga para peserta didik juga harus memanfaatkan sebaik mungkin jenjang pendidikan yang sedang ditempuh agar biaya pendidikan yang dikeluarkan menuai hasil.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komersialisasi pendidikan di era globalisasi (studi kasus tentang persepsi masyarakat terhadap kuasa modal dalam dunia pendidikan di Kelurahan Jebres, Surakarta) maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan kepada :

1. Untuk anak sekolah khususnya di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, dengan semakin mahalannya pendidikan di era globalisasi saat ini diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan pendidikan yang sedang atau bahkan pendidikan yang akan dijalani mengingat biaya pendidikan saat ini yang memerlukan dana yang tidak sedikit.
2. Untuk masyarakat Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta diharapkan mempersiapkan dan mengantisipasi dampak komersialisasi pendidikan yang semakin mengancam pendidikan di era globalisasi saat ini agar anak mampu menikmati pendidikan hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Untuk lembaga pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi sebaiknya tidak terlalu banyak memungut dana yang kurang jelas sehingga memberatkan masyarakat yang menyekolahkan anaknya.

Sehingga banyaknya pungutan serta mahalnya biaya pendidikan harus diseimbangkan dengan fasilitas dan mutu pendidikan yang berkualitas.

4. Untuk Pemerintah Dinas Kependidikan diharapkan tegas membuat kebijakan agar sekolah-sekolah tidak memungut dana yang kurang begitu jelas bahkan memberatkan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga harus memperbesar anggaran untuk membantu biaya operasional sekolah agar semakin ringan dan tidak membebani masyarakat.

